



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Budianto;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/27 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cinambo Indah No. 05 RT.001 / RW. 005  
Kelurahan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo  
Kota Bandung.AtauJl. Cinambo Indah No. 05  
RT.001 / RW. 005 Kelurahan Pakemitan Kecamatan  
Cinambo Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Komisaris / Direktur / Direktur  
Operasional / Pengurus PT. Ayaro Mulya Konstruksi)

Terdakwa Agus Budianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16  
Maret 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan  
tanggal 27 April 2021

Terdakwa Agus Budianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Indra Bayu, S.H., dan Sdr. Wahyu Adri Prabowo,  
S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada IDR Law Firm,  
berkedudukan di Jl. Danau Toba, Ruko Danau Toba A.20, Sawojajar, Kota  
Malang, Jawa Timur, E-mail: [indrabay999@hotmail.com](mailto:indrabay999@hotmail.com) berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Hukum di bawah register Nomor 411/PH/IV/2021 tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN  
Mlg tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yakni "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 39 Ayat (1) Huruf I UU RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar 1.711.347.278,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti:

No.	Nama Barang Bukti			Disita dari
a.	No.	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
	1.	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor : S-6032/WPJ.12/KP.14/2015, tanggal 12 Nopember 2015;	Satu set	Asli
	2.	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor : S-6033/WPJ.12/KP.14/2015, tanggal 12 Nopember 2015;	Satu set	Asli
	3.	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (VISIT), Nomor : LAP-436/WPJ.12/KP1409/2016, tanggal 24 Mei 2016;	Satu set	Asli

Halaman 2 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4.	Profil Wajib Pajak a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000.	Satu set	Asli	
b.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	ERLIK ONO selaku Kasi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan
	1	SPT Tahunan 1771 Tahun 2014	1 set		
	2	SPT Masa PPN Januari 2015	1 set		
	3	SPT Masa PPN Pebruari 2015	1 set		
	4	SPT Masa PPN Maret 2015	1 set		
	5	SPT Masa PPN April 2015	1 set		
	6	SPT Masa PPN Mei 2015	1 set		
	7	SPT Masa PPN Juni 2015	1 set		
	8	SPT Masa PPN Juli 2015	1 set		
	9	SPT Masa PPN Agustus 2014	1 set		
	10	SPT Masa PPN September 2014	1 set		
	11	SPT Masa PPN Oktober 2014	1 set		
	12	SPT Masa PPN Nopember 2014	1 set		
	13	SPT Masa PPN Desember 2014	1 set		
C.	I.	FAKTUR PAJAK			
		Nomor FP	Tanggal	DPP	PPN
	1	010.002-14.05980595	1-Jun-14	1.300.968.000	130.096.800
	2	010.002-14.05050596	24-Jun-14	1.300.968.000	130.096.800
	3	010.002-14.05050597	25-Aug-14	1.347.802.848	134.780.285
	4	010.002-14.05050598	25-Sep-14	1.277.550.576	127.755.058
	5	010.002-14.05050599	25-Oct-14	1.353.006.720	135.300.672
	6	010.002-14.05050600	25-Nov-14	1.691.258.400	169.125.840
	7	010.002-14.05050601	15-Dec-14	1.709.471.952	170.947.195
		Faktur Pajak Januari s.d. Desember 2014		9.981.026.496	998.102.650
	8	010.001-15.10641740	25-Jan-15	1.636.617.744	163.661.774
	9	010.001-15.10641741	25-Feb-15	1.176.075.072	117.607.507
	10	010.001-15.10641742	27-Mar-15	1.790.131.968	179.013.197
	11	010.001-15.10641743	27-Apr-15	824.813.712	82.481.371
	12	010.001-15.10641743	2-Apr-15	150.269.927	15.026.993
	13	010.001-15.10641745	27-May-15	387.688.464	38.768.846
	14	010.001-15.10641746	27-May-15	190.830.590	19.083.059
	15	010.001-15.10641747	29-Jun-15	588.037.536	58.803.754
	16	010.001-15.10641748	30-Jun-15	106.288.485	10.628.849
	17	010.001-15.10641749	31-Jul-15	699.920.784	69.992.078
	18	010.001-15.10641750	31-Aug-15	840.425.328	84.042.533
	19	011.001-15.10641751	30-Sep-15	214.287.359	21.428.736
	20	011.001-15.10641752	30-Sep-15	483.960.096	48.396.010
		Faktur Pajak Januari s.d. Desember 2015		9.089.347.065	908.934.707
	II.	INVOICE & DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN			
		Invoice			
		Nomor	Tanggal	Nilai	Jumlah
	21	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IV/2014	25-Apr-14	1.431.064.800	satu set
	22	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VI/2014	24-Jun-14	1.431.064.800	satu set
	23	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VIII/2014	25-Aug-14	1.482.583.133	satu set
	24	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IX/2014	25-Sep-14	1.405.305.634	satu set
	25	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/X/2014	25-Oct-14	1.488.307.392	satu set
	26	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/XI/2014	25-Nov-14	1.860.384.240	satu set



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/XII/2014	15-Des-14	1.880.419.147	satu set	Asli
	28	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/II/2015	25-Jan-15	1.800.279.518	satu set	Asli
	29	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/III/2015	25-Feb-15	1.293.682.579	satu set	Asli
	30	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/III/2015	27-Mar-15	1.969.145.165	satu set	Asli
	31	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IV/2015	27-Apr-15	907.295.083	satu set	Asli
	32	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/III/2015	02-Apr-15	165.296.919	satu set	Asli
	33	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/V/2015	27-May-15	426.457.310	satu set	Asli
	34	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/V/2015	27-May-15	209.913.649	satu set	Asli
	35	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VI/2015	29-Jun-15	646.841.290	satu set	Asli
	36	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/VI/2015	30-Jun-15	116.917.333	satu set	Asli
	37	2D/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VI/2015	31-Jul-15	769.912.862	satu set	Asli
	38	2D/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/III/2015	31-Aug-15	924.467.861	satu set	Asli
	39	2D/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/IX/2015	30-Sep-15	235.716.094	satu set	Asli
	40	2D/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IX/2015	30-Sep-15	532.356.105	satu set	Asli
	<b>III. SURAT PERJANJIAN KERJA</b>					
		<b>Nomor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
	41	011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014	25-Apr-14	30.127.680.000	satu set	Asli
	42	028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014	23-Oct-14	2.829.215.565	satu set	Asli
d.	<b>I. Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2014</b>					<b>SALMIN H</b>
		<b>Nomor FP</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>	Karyawan PT
	1	0100021409996552	03-07-2014	1 set	Asli	BUMI SARANA
	2	0100021409996586	17-07-2014	1 set	Asli	BETON
	3	0100021409996596	23-07-2014	1 set	Asli	
	4	0100021409996620	19-08-2014	1 set	Asli	
	5	0100021409996716	29-09-2014	1 set	Asli	
	6	0100021409996717	29-09-2014	1 set	Asli	
	7	0100021409996701	19-09-2014	1 set	Asli	
	8	0100021409996724	29-09-2014	1 set	Asli	
	9	0100031425788219	30-09-2014	1 set	Asli	
	10	0100021409996656	02-09-2014	1 set	Asli	
	11	0100021409996674	09-09-2014	1 set	Asli	
	12	0100021409996678	10-09-2014	1 set	Asli	
	13	0100031425788275	27-10-2014	1 set	Asli	
	14	0100031425788244	16-10-2014	1 set	Asli	
	15	0100031425788245	16-10-2014	1 set	Asli	
	16	0100031425788318	20-11-2014	1 set	Asli	
	17	0100031425788344	28-11-2014	1 set	Asli	
	18	0100031425788356	28-11-2014	1 set	Asli	
	19	0100031425788332	25-11-2014	1 set	Asli	
	20	0100031496644861	29-12-2014	1 set	Asli	
	21	0100031496644860	29-12-2014	1 set	Asli	
	22	0100031496644885	30-12-2014	1 set	Asli	
	<b>II. Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2015</b>					
		<b>Nomor FP</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>	
	23	0100001551855400	12-01-2015	1 set	Asli	
	24	0100001551855462	05-02-2015	1 set	Asli	
	25	0100001551855515	26-02-2015	1 set	Asli	
	26	0100001551855577	27-03-2015	1 set	Asli	
	27	0100001551855552	18-03-2015	1 set	Asli	
	28	0100001551855643	28-04-2015	1 set	Asli	
	29	0100001551855655	30-04-2015	1 set	Asli	
	30	0100001551855608	07-04-2015	1 set	Asli	
	31	0100001551855613	09-04-2015	1 set	Asli	
	32	0100021527831598	29-05-2015	1 set	Asli	

Halaman 4 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	33	0100021527831555	22-05-2015	1 set	Asli	
	34	0100021527831538	19-05-2015	1 set	Asli	
	35	0100021527831666	29-06-2015	1 set	Asli	
	36	0100021527831699	27-07-2015	1 set	Asli	
	37	0100031563258510	31-08-2015	1 set	Asli	
	38	0100021527831769	18-08-2015	1 set	Asli	
	39	0100031563258534	09-09-2015	1 set	Asli	
	40	0100031563258597	28-09-2015	1 set	Asli	
	41	0100031563258695	30-10-2015	1 set	Asli	
	42	0100031563258742	13-11-2015	1 set	Asli	
e.	<b>Faktur Pajak dan Lampirannya :</b>					<b>ALAN JEFRI</b> Karyawan PT CATUR KENCANA SAKTI
	I.	<b>Masa Januari s.d. Desember 2014</b>				
		<b>Nomor Faktur Pajak</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>	
	1	0100021487053628	13-09-2014	1 set	asli	
	2	0100031433163634	30-10-2014	1 set	asli	
	3	0100021487054198	17-10-2014	1 set	asli	
	4	0100031433163866	29-11-2014	1 set	asli	
	5	0100031433163758	15-11-2014	1 set	asli	
	6	0100031433163650	01-11-2014	1 set	asli	
	7	0100031433163859	28-11-2014	1 set	asli	
	8	0100031433163744	13-11-2014	1 set	asli	
	9	0100031433163948	10-12-2014	1 set	asli	
	10	0100031433164032	20-12-2014	1 set	asli	
	11	0100031433164003	17-12-2014	1 set	asli	
	II.	<b>Masa Januari s.d. Desember 2015</b>				
		<b>Nomor Faktur Pajak</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>	
	12	0100001582226070	31-01-2015	1 set	asli	
	13	0100001582225937	12-01-2015	1 set	asli	
	14	0100001582225955	15-01-2015	1 set	asli	
	15	0100001582226503	07-02-2015	1 set	asli	
	16	0100001582226531	14-02-2015	1 set	asli	
	17	0100001582226627	07-03-2015	1 set	asli	
	18	0100001582226753	30-03-2015	1 set	asli	
	19	0100001582226706	20-03-2015	1 set	asli	
	20	0100001582226712	23-03-2015	1 set	asli	
	21	0100001582226820	10-04-2015	1 set	asli	
	22	0100001582226832	13-04-2015	1 set	asli	
	23	0100001582226890	25-04-2015	1 set	asli	
	24	0100011559709702	15-05-2015	1 set	asli	
	25	0100011559709764	30-05-2015	1 set	asli	
	26	0100011559709717	19-05-2015	1 set	asli	
	27	0100011559709739	23-05-2015	1 set	asli	
	28	0100011559709825	15-06-2015	1 set	asli	
	29	0100011559709889	30-06-2015	1 set	asli	
	30	0100011559709804	10-06-2015	1 set	asli	
	31	0100011559709779	04-06-2015	1 set	asli	
	32	0100011559709880	27-06-2015	1 set	asli	
	33	0100011559710063	23-07-2015	1 set	asli	
	34	0100011559710006	04-07-2015	1 set	asli	
	35	0100011559710280	27-08-2015	1 set	asli	
	36	0100011559710236	13-08-2015	1 set	asli	
	37	0100011559710212	06-08-2015	1 set	asli	
	38	0100031579144306	29-09-2015	1 set	asli	
	39	0100031579144225	20-09-2015	1 set	asli	
	40	0100031579144200	15-09-2015	1 set	asli	
	41	0100031579144388	05-10-2015	1 set	asli	
	42	0100031579144566	28-10-2015	1 set	asli	
	43	0100031579144650	03-11-2015	1 set	asli	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.	No.	Jenis Dokumen Yang Disita		Banyaknya	<b>ANDRI IRAWAN, SE</b> Finance Manager PT MONIER
	1.	A/R Customer Transactions (ARCTRN01) tanggal 11/06/2019 pukul 10:38:42		1 set	
	2.	Invoice, Faktur Pajak, Delivery Docket, Purchase Order		9 set	
	3.	Rekap setoran dari PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI senilai Rp. 496.460.000 dan lampiran rekening koran no 0182719003		1 set	
	4.	Faktur Pajak No. 010.000-15.97740055 dengan DPP PPN senilai Rp. 4.772.727		1 set	
g.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	<b>RUDYANTO</b> Direktur PT KEPUH KENCANA ARUM
	1	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854868	1 set		
	2	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854563	1 set		
	3	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54853976	1 set		
	4	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54853975	1 set		
	5	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854857	1 set		
	6	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54855566	1 set		
	7	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54856533	1 set		
	8	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54860823	1 set		
	9	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54860856	1 set		
	10	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54863593	1 set		
	11	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54865020	1 set		
	12	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48566424	1 set		
	13	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48566163	1 set		
	14	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48565209	1 set		
	15	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48565173	1 set		
	16	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48564937	1 set		
	17	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48575431	1 set		
	18	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48578082	1 set		
	19	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788408	1 set		
	20	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30787208	1 set		
	21	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30786587	1 set		
	22	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788058	1 set		
	23	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30789104	1 set		
	24	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788825	1 set		
	25	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30790390	1 set		
	26	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30792241	1 set		
	27	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30791214	1 set		
	28	Daftar Faktur Pajak dari PT KEPUH KENCANA ARUM	3 Lembar		
h.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	<b>MARKUS YAN RAHARJO,</b> Accounting Manager PT SURYA PERTIWI
	1	Rekap Invoice dan Surat Jalan kepada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 set	Asli	
	2	Invoice dan Surat Jalan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 set	Asli	
	3	Faktur Pajak Kepada PT AYARO MULYA KOSNTRUKSI	16 lembar	Asli	
i.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	<b>AGUS PURWO SANTOSO</b> Branch Operation Service Manager Bank CIMB NIAGA KC Malang
	1	Aplikasi Pembukaan Rekening & Electronic Banking CIMB NIAGA	6 lembar	Fotokopi dan sudah dilegalisasi	
	2	Print Out Mutasi Bank periode mutasi 15 Juni s/d Desember 2015 bank CIMB NIAGA	3 lembar	Asli	

Halaman 6 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3	Salinan Akta No: 01 tanggal 06-01-2015 Notaris HILDA, S.H., M.M., M.Kn. mengenai : Penjualan Saham Perubahan Susunan Direksi	9 lembar	Fotokopi	Basuki Rakhmad
	4	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI Nomor 22 tanggal 27 September 2007 Notaris ANIEK YULAICHAH, S.H.	9 lembar	Fotokopi	
	5	Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama Bandung Cicadas No. Pem-2893/WPJ.09/KP.0303/2009 tanggal 02 September 2019 atas nama DINA MARANETTA	1 lembar	Fotokopi	
	6	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 230815201244 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 lembar	Fotokopi	
	7	Surat Keterangan Terdaftar dari No. Pem-0004118ER/WPJ.12/KP.0103/2007 tanggal 10 Oktober 2007 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 lembar	Fotokopi	
	8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 517/19/35.73.311/2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 lembar	Fotokopi	
j.	1. Fotokopi Akte Nomor : 27 tanggal 24 Maret 2009 tentang Berita Acara Rapat umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000; 2. Fotokopi Akte Nomor : 28 tanggal 24 Maret 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000;				<b>CHUSEN BISRI, SH, M.Kn</b> Notaris di Malang.
k.	- Copy Legalisir Minuta Nomor : 34 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Perubahan Susunan Pengurus dan Pengalihan Saham a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000				<b>GALUH EVA PURNAMA, SH, M.Kn</b> Notaris di Malang.
l.	1. Salinan Akte Nomor : 04 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rapat umum Luar Biasa para Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI berkedudukan di Kota Malang; 2. Salinan Akte Nomor : 05, tanggal 15 Juli 2010 tentang Jual Beli Saham pada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI berkedudukan di Kota Malang;				<b>SRI HENDROWATI, SH, M.Kn</b> Notaris di Malang.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA:**

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan:

1. Keluarga saya sendiri dengan isteri dan 2 orang awak yang masih bersekolah SD dan SMA;
2. Keluarga adik isteri saya, janda dengan satu orang anak;
3. Ibu dan bapak mertua saya yang sudah berumur di atas 70 tahun, selama ditahan di Lapas, saya tidak bisa menafkahi keluarga dan saya juga 2 kali menjalani perawatan di Poliklinik Lapas;

Halaman 7 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENASIHAT HUKUM:

Tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi:

1. Bahwa pajak yang dibayarkan Terdakwa dengan memerintahkan saksi Mitha, dan pembayaran tersebut telah diterima dan tidak ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak;
2. Bahwa kontrak kerja Terdakwa telah diputus sepihak oleh PT RKM dan pembayaran termin diputus;
3. Bahwa dalam keterangan saksi tidak dijelaskan berapa kisaran berat dari barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Menurut pendapat Penasihat Hukum, walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan ini, kami berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal ini, alasannya adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka kami mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada yang mulia majelis hakim;
2. Bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai asset apapun untuk membayar kekurangan pajak maupun denda yang dituntutkan oleh Penuntut Umum
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dengan tanggungan anak-anak yang masih kecil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional / Pengurus PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI, bergerak dalam bidang usaha jasa Konstruksi dan leveransir serta terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 10 Oktober 2007 dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 7 Januari 2008 di KPP Pratama Malang Selatan dengan NPWP 21.014.497.8-632.000 pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan September 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di kantor PT AYARO MULYA KONSTRUKSI di Jalan Singgalang No.1 RT.003/RW.009, Pisang candi, Kota Malang, dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Jalan Merdeka Utara Nomor 3 Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Malang, Terdakwa **dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan** sehingga dapat menimbulkan kerugian

Halaman 8 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendapatan negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional / Pengurus PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI dengan kewenangan adalah bertanggung jawab atas jalannya perusahaan termasuk menandatangani kontrak / perjanjian, kwitansi, faktur pajak dan pelaporan perpajakan (SPT) ;
- Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI telah terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 10 Oktober 2007 dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 7 Januari 2008 di KPP Pratama Malang Selatan dengan NPWP 21.014.497.8-632.000 yang beralamat di Jl. Singgalang No.01 RT.003/RW.009 Pisang Candi, Sukun, Malang Jawa Timur. dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 7 Januari 2008 di KPP Pratama Malang Selatan;
- Bahwa proses bisnis kegiatan usaha PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI adalah sebagai berikut :
  1. PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI mendapatkan proyek dari pengguna jasa konstruksi yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja yang berisi nilai proyek dan kesepakatan yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak ;
  2. Pengguna jasa Konstruksi kemudian menerbitkan rincian pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan proyek yang dituangkan dalam dokumen Surat Perintah Kerja sebagai pedoman PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI untuk melaksanakan pekerjaan ;
  3. Pelaksanaan pekerjaan proyek dilakukan dilokasi proyek oleh pekerja bangunan yang terdiri dari kuli, tukang, mandor, pengawas mandor dan dipimpin seorang pimpinan proyek ;
  4. Pengguna jasa konstruksi menunjuk tim yang bertugas menilai persentase penyelesaian pekerjaan pembangunan proyek konstruksi sebagai dasar untuk menentukan termin pembayaran kepada PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI ;
  5. Hasil penilaian perkembangan penyelesaian proyek dijadikan dasar oleh PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI untuk membuat surat tagihan kepada pengguna jasa konstruksi untuk menyampaikan kwitansi dan faktur PPN ;
  6. Tagihan yang disampaikan oleh PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI dibayarkan dengan cara ditransfer melalui rekening BANK CENTRAL

Halaman 9 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIA KCP Bandung Ujung Berung nomor 2830694555 a.n. AGUS

BUDIANTO:

7. PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI melakukan pembukuan di Makasar

dilokasi proyek dilakukan oleh staf keuangan ;

- Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI, bergerak dalam bidang usaha jasa Konstruksi dan leveransir, pada tahun pajak 2014 dan 2015 hanya mendapatkan proyek konstruksi bangunan rumah tinggal dari PT. RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 dengan lokasi proyek di Waterfront City Pavillion Residen, Makasar, Jl. Metro Tanjung Bunga Makasar (samping Trans Studio Makasar), Tidak menyampaikan SPT secara berturut-turut Masa Agustus s/d September 2015 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak Keluaran :

No	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100011510641 750	31-08- 2015	029831559804 001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	84,042, 533
2	0110011510641 751	30-09- 2015	029831559804 001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	21,428, 736
3	0110011510641 752	30-09- 2015	029831559804 001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	48,396, 010
Jumlah Pajak Keluaran yang seharusnya dilaporkan Masa Agustus s/d September 2015					153.867.279

b. Pajak Masukan :

No	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	01000115544974 58	07-08- 2015	0130591180380 00	SURYA PERTIWI	7,070,490
2	01000315307884 08	21-08- 2015	0144016656410 00	KEPUH KENCANA ARUM	1,936,36 4
3	01000315307872 08	15-08- 2015	0144016656410 00	KEPUH KENCANA ARUM	1,930,909
4	01000315307865 87	13-08- 2015	0144016656410 00	KEPUH KENCANA ARUM	64,09 1
5	01000315307891 04	25-08- 2015	0144016656410 00	KEPUH KENCANA ARUM	85,4 55
6	01000315307903 90	29-08- 2015	0144016656410 00	KEPUH KENCANA ARUM	1,540,90 9
7	01000315307888 25	24-08- 2015	0144016656410 00	KEPUH KENCANA ARUM	427,27 3
8	01000315307880 58	20-08- 2015	0144016656410 00	KEPUH KENCANA ARUM	1,609,0 91
9	01000315632585 10	31-08- 2015	0173562968120 00	BUMI SARANA BETON	1,670,45 5
10	01000215278317 69	18-08- 2015	0173562968120 00	BUMI SARANA BETON	2,940,00 0
11	01000115943536 53	11-08- 2015	0169647850470 00	DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO	3,773,95 2
12	01000315255833 69	12-08- 2015	0141145658120 00	BOSOWA MINING	117,81 8
13	01000115597102 80	27-08- 2015	0120459858120 00	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,54 5
14	01000115597102 36	13-08- 2015	0120459858120 00	CATUR KENCANA SAKTI	1,272,7 27
15	01000115597102 12	06-08- 2015	0120459858120 00	CATUR KENCANA SAKTI	2,545,45 5
16	01000315582201	22-09-	0320564838050	MANDIRI PERKASA UTAMA	964,727

Halaman 10 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



	35	2015	00		
17	01000315632585	09-09-	0173562968120	BUMI SARANA BETON	1,470,00
	34	2015	00		0
18	01000315632585	28-09-	0173562968120	BUMI SARANA BETON	467,72
	97	2015	00		7
19	01000315307922	07-09-	0144016656410	KEPUH KENCANA ARUM	580,90
	41	2015	00		9
20	01000315307912	02-09-	0144016656410	KEPUH KENCANA ARUM	322,72
	14	2015	00		7
21	01000315791443	29-09-	0120459858120	CATUR KENCANA SAKTI	1,288,63
	06	2015	00		6
22	01000315791442	20-09-	0120459858120	CATUR KENCANA SAKTI	552,2
	25	2015	00		72
23	01000315791442	15-09-	0120459858120	CATUR KENCANA SAKTI	3,681,8
	00	2015	00		18
Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Agustus s/d September 2015					(37.768.350)

c. Penyetoran PPN Masa Agustus s/d September 2015:

No	Masa	Tanggal Setor	Nilai Setoran
1	Agustus	-	-
2	September	-	-
Jumlah setoran PPN Agustus s/d September 2015			NIHIL

PPN kurang Setor (Jumlah a – Jumlah b – Jumlah c) Rp 116.098.929.

- Bahwa sesuai dengan penghitungan Kerugian Pendapatan Negara oleh Ahli ARIEF SULTONY (Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara), besarnya PPN yang tidak disetorkan ke Negara oleh Terdakwa sehingga menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebesar Rp 116.098.929 (seratus enam belas juta sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN  
KEDUA

Halaman 11 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional / Pengurus PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI, bergerak dalam bidang usaha jasa Konstruksi dan leveransir serta terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 10 Oktober 2007 dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 7 Januari 2008 di KPP Pratama Malang Selatan dengan NPWP 21.014.497.8-632.000 pada bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di kantor PT AYARO MULYA KONSTRUKSI di Jalan Singgalang No.1 RT.003/RW.009, Pisang candi, Kota Malang, dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Jalan Merdeka Utara Nomor 3 Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Malang, Terdakwa **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap** sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional / Pengurus PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI dengan kewenangan adalah bertanggung jawab atas jalannya perusahaan termasuk menandatangani kontrak / perjanjian, kwitansi, faktur pajak dan pelaporan perpajakan (SPT) ;
- Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI telah terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 10 Oktober 2007 dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 7 Januari 2008 di KPP Pratama Malang Selatan dengan NPWP 21.014.497.8-632.000 yang beralamat di Jl. Singgalang No.01 RT.003/RW.009 Pisang Candi, Sukun, Malang Jawa Timur.dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 7 Januari 2008 di KPP Pratama Malang Selatan;
- Bahwa proses bisnis kegiatan usaha PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI adalah sebagai berikut :
  1. PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI mendapatkan proyek dari pengguna jasa konstruksi yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja yang berisi nilai proyek dan kesepakatan yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak ;
  2. Pengguna jasa Konstruksi kemudian menerbitkan rincian pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan proyek yang

Halaman 12 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dituangkan dalam dokumen Surat Perintah Kerja sebagai pedoman PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI untuk melaksanakan pekerjaan ;
3. Pelaksanaan pekerjaan proyek dilakukan dilokasi proyek oleh pekerja bangunan yang terdiri dari kuli, tukang, mandor, pengawas mandor dan dipimpin seorang pimpinan proyek ;
  4. Pengguna jasa konstruksi menunjuk tim yang bertugas menilai persentase penyelesaian pekerjaan pembangunan proyek konstruksi sebagai dasar untuk menentukan termin pembayaran kepada PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI ; ;
  5. Hasil penilaian perkembangan penyelesaian proyek dijadikan dasar oleh PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI untuk membuat surat tagihan kepada pengguna jasa konstruksi untuk menyampaikan kwitansi dan faktur PPN ;
  6. Tagihan yang disampaikan oleh PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI dibayarkan dengan cara ditransfer melalui rekening BANK CENTRAL ASIA KCP Bandung Ujung Berung nomor 2830694555 a.n. AGUS BUDIANTO;
  7. PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI melakukan pembukuan di Makasar dilokasi proyek dilakukan oleh staf keuangan ;
- Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI, bergerak dalam bidang usaha jasa Konstruksi dan leveransir, pada tahun pajak 2014 dan 2015 hanya mendapatkan proyek konstruksi bangunan rumah tinggal dari PT. RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 dengan lokasi proyek di Waterfront City Pavillion Residen, Makasar, Jl. Metro Tanjung Bunga Makasar (samping Trans Studio Makasar) secara berturut-turut telah menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan rincian sebagai berikut :
- Masa Agustus 2014 s/d Desember 2014 :
- a. Pajak Keluaran :

No	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	010002140505059 7	25-08- 2014	02983155980400 1	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	134,780,285
2	010002140505059 8	25-09- 2014	02983155980400 1	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	127,755,058
3	010002140505059 9	25-10- 2014	02983155980400 1	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	135,300,672
4	010002140505060 0	25-11- 2014	02983155980400 1	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	169,125,840
5	010002140505060 1	15-12- 2014	02983155980400 1	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	170,947,195
Jumlah Pajak Keluaran yg seharusnya dilaporkan Masa Agustus s/d Desember 2014					737.909.05 0

b. Pajak Masukan :

Halaman 13 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100021409996620	19-08-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,272,727
2	0100021475046052	26-08-2014	011262821812000	BARAWAJA	11,708,303
3	0100021475046005	11-08-2014	011262821812000	BARAWAJA	13,984,651
4	0100021487053628	13-09-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
5	0100021409996716	29-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	5,472,727
6	0100021409996717	29-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	6,809,091
7	0100021409996701	19-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,781,818
8	0100021409996724	29-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	4,900,000
9	0100031425788219	30-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,336,364
10	0100021409996656	02-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,227,273
11	0100021409996674	09-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,563,636
12	0100021409996678	10-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,100,000
13	0100021475046083	06-09-2014	011262821812000	BARAWAJA	12,422,651
14	0100031433163634	30-10-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
15	0100021487054198	17-10-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
16	0100021475046207	09-10-2014	011262821812000	BARAWAJA	10,485,000
17	0100031425788275	27-10-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	6,618,182
18	0100031425788244	16-10-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,400,000
19	0100031425788245	16-10-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	6,363,636
20	0100031434447247	27-11-2014	011262821812000	BARAWAJA	16,078,059
21	0100031434447162	01-11-2014	011262821812000	BARAWAJA	8,682,300
22	0100031434447208	15-11-2014	011262821812000	BARAWAJA	12,711,050
23	0100031433163866	29-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
24	0100031433163758	15-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
25	0100031433163650	01-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	909,091
26	0100031433163859	28-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	363,636
27	0100031433163744	13-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	363,636
28	0100031425788318	20-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	4,327,273
29	0100031425788344	28-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	4,009,091
30	0100031425788356	28-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,309,091
31	0100031425788332	25-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,818,182
32	0100031479659173	25-11-2014	010001204052000	MONIER	5,708,727
33	0100031479659415	29-11-2014	010001204052000	MONIER	3,777,272
34	0100031479659418	29-11-2014	010001204052000	MONIER	11,499,363
35	0100031479659416	29-11-2014	010001204052000	MONIER	3,777,272
36	0100031477242912	22-12-2014	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	784,982
37	0100031477242747	20-12-2014	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	432,364
38	0100031479660522	31-12-2014	010001204052000	MONIER	3,536,180
39	0100031479660519	31-12-2014	010001204052000	MONIER	3,602,182
40	0100031479660640	31-12-2014	010001204052000	MONIER	3,777,274
41	0100031479660641	31-12-2014	010001204052000	MONIER	4,173,543
42	0100031433163948	10-12-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
43	0100031433164032	20-12-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	909,091
44	0100031433164003	17-12-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
45	0100031468188130	11-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	15,230,164
46	0100031468188129	11-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	3,691,391
47	0100031468188438	23-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	11,316,000
48	0100031468188437	23-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	3,737,964
49	0100031468188585	31-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	2,247,964
50	0100031455136145	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	68,208
51	0100031455136142	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	565,152
52	0100031455136143	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	14,819,464
53	0100031455136144	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	2,479,268
54	0100031455136146	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	227,360
55	0100031496644861	29-12-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	5,918,182
56	0100031496644860	29-12-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	890,909
57	0100031496644885	30-12-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,272,727
Jumlah Pajak Masukan yg seharusnya dilaporkan Masa Agustus s/d Desember 2014					(259.278.652)

## c. Penyeteroran PPN Masa Agustus 2014 s/d Desember 2014

N o	Masa	Tanggal Setor	Nilai Setoran
1	Agustus	-	-
2	September	-	-
3	Oktober	-	-
4	November	-	-
5	Desember	-	-
Jumlah setoran PPN Masa Agustus s/d Desember 2014			NIHIL

PPN kurang Setor ----- Rp 478.630.398



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Januari 2015 s/d Juli 2015 :

## a. Pajak Keluaran :

No	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100011510641740	25-01-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	163,661,774
2	0100011510641741	25-02-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	117,607,507
3	0100011510641742	27-03-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	179,013,197
4	0100011510641743	02-04-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	15,026,993
5	0100011510641744	25-04-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	82,481,371
6	0100011510641745	27-05-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	38,768,846
7	0100011510641746	27-05-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	19,083,059
8	0100011510641747	29-06-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	58,803,754
9	0100011510641748	30-06-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	10,628,849
10	0100011510641749	31-07-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	69,992,078
Jumlah Pajak Keluaran yg seharusnya dilaporkan masa Januari s/d Juli 2015					755.067.428

## b. Pajak Masukan :

No	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100001568998087	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	4,133,080
2	0100001568998093	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	516,142
3	0100001568998092	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	504,252
4	0100001568998091	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	7,424,000
5	0100001568998090	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	2,806,736
6	0100001568998089	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	363,776
7	0100001568998088	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	1,015,928
8	0100001554854868	29-01-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	436,364
9	0100001554853976	26-01-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	654,545
10	0100001554853975	26-01-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	182,045
11	0100001554854563	28-01-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	436,364
12	0100001554854857	29-01-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	60,682
13	0100001551855400	12-01-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,227,273
14	0100011502265402	23-01-2015	030795538805000	BERKAT JAYATRINDO	668,181
15	0100011502265411	23-01-2015	030795538805000	BERKAT JAYATRINDO	668,181
16	0100001582226070	30-01-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	2,545,455
17	0100001582225937	12-01-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	2,909,091
18	0100001582225955	13-01-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
19	010000159774005	24-01-2015	010001204052000	MONIER	477,272



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	2015	0		
20	01000159774026	24-01-	01000120405200	MONIER	4,840,909
	0	2015	0		
21	010001150456470	31-01-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	13,910,618
	7	2015	0	PRATAMA	
22	010001150456470	31-01-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	14,382,545
	8	2015	0	PRATAMA	
23	010001150456425	21-01-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	141,818
	3	2015	0	PRATAMA	
24	010001150456458	26-01-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	14,382,545
	2	2015	0	PRATAMA	
25	010001150456427	21-01-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	13,768,991
	9	2015	0	PRATAMA	
26	010001150456458	26-01-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	14,382,545
	3	2015	0	PRATAMA	
27	010001155485556	02-02-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	364,091
	6	2015	0		
28	010001159262850	12-02-	01126282181200	BARAWAJA	11,407,800
	4	2015	0		
29	010001150456472	02-02-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	14,382,545
	4	2015	0	PRATAMA	
30	010001150456478	05-02-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	7,117,127
	7	2015	0	PRATAMA	
31	010001150456479	05-02-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	9,145,800
	1	2015	0	PRATAMA	
32	010001150456479	05-02-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	8,781,818
	0	2015	0	PRATAMA	
33	010001156901911	16-02-	01305911803800	SURYA PERTIWI	14,863,254
	8	2015	0		
34	010001156901911	16-02-	01305911803800	SURYA PERTIWI	5,160,492
	9	2015	0		
35	010001155185546	05-02-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,945,455
	2	2015	0		
36	010001155185551	26-02-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,118,182
	5	2015	0		
37	010001158222650	07-02-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
	3	2015	0		
38	010001158222653	14-02-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
	1	2015	0		
39	010001157908495	13-02-	03205648380500	MANDIRI PERKASA UTAMA	5,440,909
	3	2015	0		
40	010001155485653	05-02-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	130,909
	3	2015	0		
41	010001155486085	23-02-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	86,473
	6	2015	0		
42	010001155486082	23-02-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	43,636
	3	2015	0		
43	010001156902849	03-03-	01305911803800	SURYA PERTIWI	9,870,672
	1	2015	0		
44	010001155486359	06-03-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	815,455
	3	2015	0		
45	010001155486502	12-03-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	872,727
	0	2015	0		
46	010001159262859	23-03-	01126282181200	BARAWAJA	13,512,200
	5	2015	0		
47	010001150456550	18-03-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	8,333,182
	5	2015	0	PRATAMA	
48	010001150456571	30-03-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	1,714,608
	6	2015	0	PRATAMA	
49	010001155185557	27-03-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,881,818
	7	2015	0		
50	010001155185555	18-03-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	5,090,909
	2	2015	0		
51	010001158222662	07-03-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
	7	2015	0		
52	010001158222675	30-03-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	2,363,636
	3	2015	0		
53	010001158222670	20-03-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
	6	2015	0		
54	010001158222671	23-03-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
	2	2015	0		
55	010001159262862	07-04-	01126282181200	BARAWAJA	13,512,200
	6	2015	0		
56	010001159262865	20-04-	01126282181200	BARAWAJA	13,512,200

Halaman 16 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	2015	0		
57	010000158222682	10-04-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
	0	2015	0		
58	010000158222683	13-04-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	909,091
	2	2015	0		
59	010000158222689	25-04-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
	0	2015	0		
60	010000155185564	28-04-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	9,609,091
	3	2015	0		
61	010000155185565	30-04-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	1,781,818
	5	2015	0		
62	010000155185560	07-04-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,181,818
	8	2015	0		
63	010000155185561	09-04-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,118,182
	3	2015	0		
64	010001154856642	17-04-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	113,455
	4	2015	0		
65	010001154856616	16-04-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	170,182
	3	2015	0		
66	010001154856517	11-04-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	736,364
	3	2015	0		
67	010001154856493	10-04-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	1,003,636
	7	2015	0		
68	010001154856520	13-04-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	1,138,909
	9	2015	0		
69	010000158254897	08-04-	01318664880100	ABETAMA SEMPURNA	2,262,000
	5	2015	1		
70	010002152783159	29-05-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	4,009,091
	8	2015	0		
71	010002152783155	22-05-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,818,182
	5	2015	0		
72	010002152783153	19-05-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	4,390,909
	8	2015	0		
73	010001155970970	15-05-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,490,909
	2	2015	0		
74	010001155970976	30-05-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
	4	2015	0		
75	010001155970971	19-05-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	909,091
	7	2015	0		
76	010001155970973	23-05-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
	9	2015	0		
77	010001156840175	23-05-	01318664880100	ABETAMA SEMPURNA	260,000
	5	2015	1		
78	010001155970982	15-06-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,272,727
	5	2015	0		
79	010001155970988	30-06-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
	9	2015	0		
80	010001155970980	10-06-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,272,727
	4	2015	0		
81	010001155970977	04-06-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
	9	2015	0		
82	010001155970988	27-06-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,818,182
	0	2015	0		
83	010002152783166	29-06-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	5,679,545
	6	2015	0		
84	010001154857543	01-06-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	931,455
	1	2015	0		
85	010001154857808	12-06-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	968,182
	2	2015	0		
86	010001155971006	23-07-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
	3	2015	0		
87	010001155971000	04-07-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
	6	2015	0		
88	010002152783169	27-07-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	2,405,455
	9	2015	0		
Jumlah Pajak Masukan yg seharusnya dilaporkan Masa Januari s/d Juli 2015					(326.558.439)

## c. Penyetoran PPN Masa Januari 2015 s/d Juli 2015 :

No.	Masa	Tanggal Setor	Nilai Setoran (Rp)
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-

Halaman 17 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	12-Agst-15	38.768.846
6	Juni	12-Agst-15	58.803.754
7	Juli	19-Okt-15	69.992.078
Jumlah setoran PPN Masa Januari s/d Juli 2015			(167.564.677)

PPN kurang Setor ----- Rp 260.944.312

- Bahwa sesuai dengan penghitungan kerugian pendapatan Negara oleh Ahli ARIEF SULTONY (Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara), besarnya PPN yang tidak disetorkan ke negara oleh Terdakwa sehingga menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebesar Rp 739.574.710 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

---Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional / Pengurus PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI, bergerak dalam bidang usaha jasa Konstruksi dan leveransir serta terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 10 Oktober 2007 dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 7 Januari 2008 di KPP Pratama Malang Selatan dengan NPWP 21.014.497.8-632.000; pada bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan September 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di kantor PT AYARO MULYA KONSTRUKSI di

Halaman 18 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Singgalang No.1 RT.003/RW.009, Pisang candi, Kota Malang, dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Jalan Merdeka Utara Nomor 3 Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Malang, Terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional / Pengurus PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI dengan kewenangan adalah bertanggung jawab atas jalannya perusahaan termasuk menandatangani kontrak / perjanjian, kwitansi, faktur pajak dan pelaporan perpajakan (SPT) ;
- Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI telah terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 10 Oktober 2007 dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 7 Januari 2008 di KPP Pratama Malang Selatan dengan NPWP 21.014.497.8-632.000 yang beralamat di Jl. Singgalang No.01 RT.003/RW.009 Pisang Candi, Sukun, Malang Jawa Timur.dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 7 Januari 2008 di KPP Pratama Malang Selatan;
- Bahwa proses bisnis kegiatan usaha PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI adalah sebagai berikut :
  1. PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI mendapatkan proyek dari pengguna jasa konstruksi yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja yang berisi nilai proyek dan kesepakatan yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak ;
  2. Pengguna jasa Konstruksi kemudian menerbitkan rincian pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan proyek yang dituangkan dalam dokumen Surat Perintah Kerja sebagai pedoman PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI untuk melaksanakan pekerjaan ;
  3. Pelaksanaan pekerjaan proyek dilakukan dilokasi proyek oleh pekerja bangunan yang terdiri dari kuli, tukang, mandor, pengawas mandor dan dipimpin seorang pimpinan proyek ;
  4. Pengguna jasa konstruksi menunjuk tim yang bertugas menilai persentase penyelesaian pekerjaan pembangunan proyek konstruksi sebagai dasar untuk menentukan termin pembayaran kepada PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI ; ;
  5. Hasil penilaian perkembangan penyelesaian proyek dijadikan dasar oleh PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI untuk membuat surat tagihan

Halaman 19 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengguna jasa konstruksi untuk menyampaikan kwitansi dan faktur PPN ;

6. Tagihan yang disampaikan oleh PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI dibayarkan dengan cara ditransfer melalui rekening BANK CENTRAL ASIA KCP Bandung Ujung Berung nomor 2830694555 a.n. AGUS BUDIANTO;

7. PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI melakukan pembukuan di Makasar dilokasi proyek dilakukan oleh staf keuangan ;

- Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI, bergerak dalam bidang usaha jasa Konstruksi dan leveransir, pada tahun pajak 2014 dan 2015 hanya mendapatkan proyek konstruksi bangunan rumah tinggal dari PT. RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 dengan lokasi proyek di Waterfront City Pavillion Residen, Makasar, Jl. Metro Tanjung Bunga Makasar (samping Trans Studio Makasar) telah menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berturut-turut dengan rincian sebagai berikut :  
Masa Agustus 2014 s/d Desember 2014 :

a. Pajak Keluaran :

No.	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	01000214050505	25-08-2014	0298315598040	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	134,780,285
	97	2014	01	MANDIRI	
2	01000214050505	25-09-2014	0298315598040	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	127,755,058
	98	2014	01	MANDIRI	
3	01000214050505	25-10-2014	0298315598040	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	135,300,672
	99	2014	01	MANDIRI	
4	01000214050506	25-11-2014	0298315598040	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	169,125,840
	00	2014	01	MANDIRI	
5	01000214050506	15-12-2014	0298315598040	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	170,947,195
	01	2014	01	MANDIRI	
Jumlah Pajak Keluaran yg seharusnya dilaporkan Masa Agustus s/d Desember 2014					737.909.050

b. Pajak Masukan :

No	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100021409996620	19-08-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,272,727
2	0100021475046052	26-08-2014	011262821812000	BARAWAJA	11,708,303
3	0100021475046005	11-08-2014	011262821812000	BARAWAJA	13,984,651
4	0100021487053628	13-09-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
5	0100021409996716	29-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	5,472,727
6	0100021409996717	29-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	6,809,091
7	0100021409996701	19-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,781,818
8	0100021409996724	29-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	4,900,000
9	0100031425788219	30-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,336,364
10	0100021409996656	02-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,227,273
11	0100021409996674	09-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,563,636
12	0100021409996678	10-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,100,000
13	0100021475046083	06-09-2014	011262821812000	BARAWAJA	12,422,651
14	0100031433163634	30-10-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
15	0100021487054198	17-10-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
16	0100021475046207	09-10-2014	011262821812000	BARAWAJA	10,485,000
17	0100031425788275	27-10-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	6,618,182
18	0100031425788244	16-10-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,400,000
19	0100031425788245	16-10-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	6,363,636
20	0100031434447247	27-11-2014	011262821812000	BARAWAJA	16,078,059
21	0100031434447162	01-11-2014	011262821812000	BARAWAJA	8,682,300
22	0100031434447208	15-11-2014	011262821812000	BARAWAJA	12,711,050



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	0100031433163866	29-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
24	0100031433163758	15-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
25	0100031433163650	01-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	909,091
26	0100031433163859	28-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	363,636
27	0100031433163744	13-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	363,636
28	0100031425788318	20-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	4,327,273
29	0100031425788344	28-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	4,009,091
30	0100031425788356	28-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,309,091
31	0100031425788332	25-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,818,182
32	0100031479659173	25-11-2014	010001204052000	MONIER	5,708,727
33	0100031479659415	29-11-2014	010001204052000	MONIER	3,777,272
34	0100031479659418	29-11-2014	010001204052000	MONIER	11,499,363
35	0100031479659416	29-11-2014	010001204052000	MONIER	3,777,272
36	0100031477242912	22-12-2014	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	784,982
37	0100031477242747	20-12-2014	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	432,364
38	0100031479660522	31-12-2014	010001204052000	MONIER	3,536,180
39	0100031479660519	31-12-2014	010001204052000	MONIER	3,602,182
40	0100031479660640	31-12-2014	010001204052000	MONIER	3,777,274
41	0100031479660641	31-12-2014	010001204052000	MONIER	4,173,543
42	0100031433163948	10-12-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
43	0100031433164032	20-12-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	909,091
44	0100031433164003	17-12-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
45	0100031468188130	11-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	15,230,164
46	0100031468188129	11-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	3,691,391
47	0100031468188438	23-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	11,316,000
48	0100031468188437	23-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	3,737,964
49	0100031468188585	31-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	2,247,964
50	0100031455136145	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	68,208
51	0100031455136142	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	565,152
52	0100031455136143	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	14,819,464
53	0100031455136144	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	2,479,268
54	0100031455136146	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	227,360
55	0100031496644861	29-12-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	5,918,182
56	0100031496644860	29-12-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	890,909
57	0100031496644885	30-12-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,272,727
Jumlah Pajak Masukan yg seharusnya dilaporkan Masa Agustus s/d Desember 2014					(259.278.652)

## c. Penyetoran PPN Masa Agustus 2014 s/d Desember 2014

N o	Masa	Tanggal Setor	Nilai Setoran
1	Agustus	-	-
2	September	-	-
3	Oktober	-	-
4	Nopember	-	-
5	Desember	-	-
Jumlah setoran PPN Masa Agustus s/d Desember 2014			NIHIL

PPN kurang Setor ----- Rp 478.630.398

Masa Januari 2015 s/d Juli 2015 :

## a. Pajak Keluaran :

No	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	01000115106417 40	25-01- 2015	0298315598040 01	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	163,661,7 74
2	01000115106417 41	25-02- 2015	0298315598040 01	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	117,607,5 07
3	01000115106417 42	27-03- 2015	0298315598040 01	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	179,013,1 97
4	01000115106417 43	02-04- 2015	0298315598040 01	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	15,026,9 93
5	01000115106417 44	25-04- 2015	0298315598040 01	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	82,481,3 71
6	01000115106417 45	27-05- 2015	0298315598040 01	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	38,768,8 46

Halaman 21 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	01000115106417 46	27-05- 2015	0298315598040 01	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	19,083,0 59
8	01000115106417 47	29-06- 2015	0298315598040 01	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	58,803,7 54
9	01000115106417 48	30-06- 2015	0298315598040 01	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	10,628,8 49
10	01000115106417 49	31-07- 2015	0298315598040 01	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	69,992,0 78
Jumlah Pajak Keluaran yg seharusnya dilaporkan masa Januari s/d Juli 2015					755.067.428

## b. Pajak Masukan :

N o	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	010000156899808 7	17-01- 2015	01305911803800 0	SURYA PERTIWI	4,133,080
2	010000156899809 3	17-01- 2015	01305911803800 0	SURYA PERTIWI	516,142
3	010000156899809 2	17-01- 2015	01305911803800 0	SURYA PERTIWI	504,252
4	010000156899809 1	17-01- 2015	01305911803800 0	SURYA PERTIWI	7,424,000
5	010000156899809 0	17-01- 2015	01305911803800 0	SURYA PERTIWI	2,806,736
6	010000156899808 9	17-01- 2015	01305911803800 0	SURYA PERTIWI	363,776
7	010000156899808 8	17-01- 2015	01305911803800 0	SURYA PERTIWI	1,015,928
8	010000155485486 8	29-01- 2015	01440166564100 0	KEPUH KENCANA ARUM	436,364
9	010000155485397 6	26-01- 2015	01440166564100 0	KEPUH KENCANA ARUM	654,545
10	010000155485397 5	26-01- 2015	01440166564100 0	KEPUH KENCANA ARUM	182,045
11	010000155485456 3	28-01- 2015	01440166564100 0	KEPUH KENCANA ARUM	436,364
12	010000155485485 7	29-01- 2015	01440166564100 0	KEPUH KENCANA ARUM	60,682
13	010000155185540 0	12-01- 2015	01735629681200 0	BUMI SARANA BETON	2,227,273
14	010001150226540 2	23-01- 2015	03079553880500 0	BERKAT JAYATRINDO	668,181
15	010001150226541 1	23-01- 2015	03079553880500 0	BERKAT JAYATRINDO	668,181
16	010000158222607 0	30-01- 2015	01204598581200 0	CATUR KENCANA SAKTI	2,545,455
17	010000158222593 7	12-01- 2015	01204598581200 0	CATUR KENCANA SAKTI	2,909,091
18	010000158222595 5	13-01- 2015	01204598581200 0	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
19	010000159774005 5	24-01- 2015	01000120405200 0	MONIER	477,272
20	010000159774026 0	24-01- 2015	01000120405200 0	MONIER	4,840,909
21	010001150456470 7	31-01- 2015	02469992880400 0	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	13,910,618
22	010001150456470 8	31-01- 2015	02469992880400 0	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14,382,545
23	010001150456425 3	21-01- 2015	02469992880400 0	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	141,818
24	010001150456458 2	26-01- 2015	02469992880400 0	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14,382,545
25	010001150456427 9	21-01- 2015	02469992880400 0	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	13,768,991
26	010001150456458 3	26-01- 2015	02469992880400 0	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14,382,545
27	010000155485556 6	02-02- 2015	01440166564100 0	KEPUH KENCANA ARUM	364,091
28	010000159262850 4	12-02- 2015	01126282181200 0	BARAWAJA	11,407,800
29	010001150456472 4	02-02- 2015	02469992880400 0	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14,382,545
30	010001150456478	05-02-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	7,117,127



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	2015	0	PRATAMA	
31	010001150456479	05-02-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	9,145,800
	1	2015	0	PRATAMA	
32	010001150456479	05-02-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	8,781,818
	0	2015	0	PRATAMA	
33	010000156901911	16-02-	01305911803800	SURYA PERTIWI	14,863,254
	8	2015	0		
34	010000156901911	16-02-	01305911803800	SURYA PERTIWI	5,160,492
	9	2015	0		
35	010000155185546	05-02-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,945,455
	2	2015	0		
36	010000155185551	26-02-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,118,182
	5	2015	0		
37	010000158222650	07-02-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
	3	2015	0		
38	010000158222653	14-02-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
	1	2015	0		
39	010000157908495	13-02-	03205648380500	MANDIRI PERKASA UTAMA	5,440,909
	3	2015	0		
40	010000155485653	05-02-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	130,909
	3	2015	0		
41	010000155486085	23-02-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	86,473
	6	2015	0		
42	010000155486082	23-02-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	43,636
	3	2015	0		
43	010000156902849	03-03-	01305911803800	SURYA PERTIWI	9,870,672
	1	2015	0		
44	010000155486359	06-03-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	815,455
	3	2015	0		
45	010000155486502	12-03-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	872,727
	0	2015	0		
46	010000159262859	23-03-	01126282181200	BARAWAJA	13,512,200
	5	2015	0		
47	010001150456550	18-03-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	8,333,182
	5	2015	0		
48	010001150456571	30-03-	02469992880400	CITRA INDAH MITRA	1,714,608
	6	2015	0		
49	010000155185557	27-03-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,881,818
	7	2015	0		
50	010000155185555	18-03-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	5,090,909
	2	2015	0		
51	010000158222662	07-03-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
	7	2015	0		
52	010000158222675	30-03-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	2,363,636
	3	2015	0		
53	010000158222670	20-03-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
	6	2015	0		
54	010000158222671	23-03-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
	2	2015	0		
55	010000159262862	07-04-	01126282181200	BARAWAJA	13,512,200
	6	2015	0		
56	010000159262865	20-04-	01126282181200	BARAWAJA	13,512,200
	8	2015	0		
57	010000158222682	10-04-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
	0	2015	0		
58	010000158222683	13-04-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	909,091
	2	2015	0		
59	010000158222689	25-04-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
	0	2015	0		
60	010000155185564	28-04-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	9,609,091
	3	2015	0		
61	010000155185565	30-04-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	1,781,818
	5	2015	0		
62	010000155185560	07-04-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,181,818
	8	2015	0		
63	010000155185561	09-04-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,118,182
	3	2015	0		
64	010001154856642	17-04-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	113,455
	4	2015	0		
65	010001154856616	16-04-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	170,182
	3	2015	0		
66	010001154856517	11-04-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	736,364
	3	2015	0		
67	010001154856493	10-04-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	1,003,636





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	2015	0		
68	010001154856520	13-04-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	1,138,90
	9	2015	0		9
69	010000158254897	08-04-	01318664880100	ABETAMA SEMPURNA	2,262,000
	5	2015	1		
70	010002152783159	29-05-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	4,009,091
	8	2015	0		
71	010002152783155	22-05-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	3,818,182
	5	2015	0		
72	010002152783153	19-05-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	4,390,90
	8	2015	0		9
73	010001155970970	15-05-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,490,909
	2	2015	0		
74	010001155970976	30-05-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,90
	4	2015	0		9
75	010001155970971	19-05-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	909,09
	7	2015	0		1
76	010001155970973	23-05-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
	9	2015	0		
77	010001156840175	23-05-	01318664880100	ABETAMA SEMPURNA	260,000
	5	2015	1		
78	010001155970982	15-06-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,272,727
	5	2015	0		
79	010001155970988	30-06-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	545,45
	9	2015	0		5
80	010001155970980	10-06-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,272,727
	4	2015	0		
81	010001155970977	04-06-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
	9	2015	0		
82	010001155970988	27-06-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,818,182
	0	2015	0		
83	010002152783166	29-06-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	5,679,545
	6	2015	0		
84	010001154857543	01-06-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	931,45
	1	2015	0		5
85	010001154857808	12-06-	01440166564100	KEPUH KENCANA ARUM	968,182
	2	2015	0		
86	010001155971006	23-07-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
	3	2015	0		
87	010001155971000	04-07-	01204598581200	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
	6	2015	0		
88	010002152783169	27-07-	01735629681200	BUMI SARANA BETON	2,405,455
	9	2015	0		
Jumlah Pajak Masukan yg seharusnya dilaporkan Masa Januari s/d Juli 2015					(326.558.439)

## c. Penyetoran PPN Masa Januari 2015 s/d Juli 2015 :

No.	Masa	Tanggal Setor	Nilai Setoran (Rp)
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	12-Agst-15	38.768.846
6	Juni	12-Agst-15	58.803.754
7	Juli	19-Okt-15	69.992.078
Jumlah setoran PPN Masa Januari 2015 s/d Juli 2015			(167.564.677)

PPN kurang Setor ----- Rp 260.944.312

- Bahwa Terdakwa AGUS BUDIANTO selaku Komisaris / Direktur / Direktur Operasional PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI, bergerak dalam bidang usaha jasa Konstruksi dan leveransir, Tidak menyampaikan SPT Masa Agustus 2015 s/d September 2015 dengan rincian sebgagai berikut :
  - a. Pajak Keluaran :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100011510641750	31-08-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	84,042,533
2	0110011510641751	30-09-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	21,428,736
3	0110011510641752	30-09-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	48,396,010
Jumlah Pajak Keluaran yang seharusnya dilaporkan Masa Agustus s/d September 2015					153.867.279

## b. Pajak Masukan :

No	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP LAWAN	PPN
	NOMOR	TGL			
1	01000115544974	07-08-2015	0130591180380	SURYA PERTIWI	7,070,490
2	01000315307884	21-08-2015	0144016656410	KEPUH KENCANA ARUM	1,936,364
3	01000315307872	15-08-2015	0144016656410	KEPUH KENCANA ARUM	1,930,909
4	01000315307865	13-08-2015	0144016656410	KEPUH KENCANA ARUM	64,091
5	01000315307891	25-08-2015	0144016656410	KEPUH KENCANA ARUM	85,455
6	01000315307903	29-08-2015	0144016656410	KEPUH KENCANA ARUM	1,540,909
7	01000315307888	24-08-2015	0144016656410	KEPUH KENCANA ARUM	427,273
8	01000315307880	20-08-2015	0144016656410	KEPUH KENCANA ARUM	1,609,091
9	01000315632585	31-08-2015	0173562968120	BUMI SARANA BETON	1,670,455
10	01000215278317	18-08-2015	0173562968120	BUMI SARANA BETON	2,940,000
11	01000115943536	11-08-2015	0169647850470	DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO	3,773,952
12	01000315255833	12-08-2015	0141145658120	BOSOWA MINING	117,818
13	01000115597102	27-08-2015	0120459858120	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
14	01000115597102	13-08-2015	0120459858120	CATUR KENCANA SAKTI	1,272,727
15	01000115597102	06-08-2015	0120459858120	CATUR KENCANA SAKTI	2,545,455
16	01000315582201	22-09-2015	0320564838050	MANDIRI PERKASA UTAMA	964,727
17	01000315632585	09-09-2015	0173562968120	BUMI SARANA BETON	1,470,000
18	01000315632585	28-09-2015	0173562968120	BUMI SARANA BETON	467,727
19	01000315307922	07-09-2015	0144016656410	KEPUH KENCANA ARUM	580,909
20	01000315307912	02-09-2015	0144016656410	KEPUH KENCANA ARUM	322,727
21	01000315791443	29-09-2015	0120459858120	CATUR KENCANA SAKTI	1,288,636
22	01000315791442	20-09-2015	0120459858120	CATUR KENCANA SAKTI	552,272
23	01000315791442	15-09-2015	0120459858120	CATUR KENCANA SAKTI	3,681,818
Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Agustus s/d September 2015					(37.768.350)

## c. Penyetoran PPN Masa Agustus 2015 s/d September 2015:

No	Masa	Tanggal Setor	Nilai Setoran
1	Agustus	-	-
2	September	-	-
Jumlah setoran PPN Agustus 2015 s/d September 2015			NIHIL

PPN kurang Setor (Jumlah a – Jumlah b – Jumlah c) Rp 116.098.929;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan penghitungan kerugian pendapatan Negara oleh Ahli ARIEF SULTONY (Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara), besarnya PPN yang tidak disetorkan ke negara oleh Terdakwa sehingga menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebesar Rp 855.673.639,- (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO YULIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik PNS dan di persidangan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk diminta keterangan berkaitan dengan Terdakwa AGUS BUDIANTO melalui PT AYAROH MULYA KONSTRUKSI NPWP 21014 497 8-623 000 ;
- Bahwa sebagai sebagai Account Representative (AR) seksi Pengawasan dan Konsultasi III di KPP Pratama Malang Selatan Tugas dan wewenang Saksi adalah ;
  - a. Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
  - b. Melakukan penatausahaan penerimaan pajak ;

Halaman 26 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan konsultasi dan bimbingan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya ;
- d. Membuat Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi ;
- e. Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan pengurus PT AYARO MULYA KONSTRUKSI yaitu AGUS BUDIYANTO bersama dengan pegawainya yaitu MITA ANDILA pada saat berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan untuk berkonsultasi masalah e-SPT, e-Faktur dan melakukan instalasi aplikasi e-SPT PPN ;
- Bahwa, Wajb Pajak an. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, Tahun Pajak 2014 dan 2015 termasuk dalam Wajb Pajak dalam wilayah kerja pengawasan Saksi sejak 27 Juli 2015 sampai dengan sekarang ;
- Berdasarkan master file pada aplikasi portal DJP. Wajb Paak an PT.AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP 21014 497 8-623000 mempunyai kegiatan usaha kontruksi gedung perkantoran (KLU 41012) Akte Notaris yang tercatat di Master file adalah Akte Nomor 04 Tanggal 15 Juli 2010 Notaris Sri Hendrowati. SH M.KN berkedudukan di Kab Malang ;
- Bahwa berdasarkan hasil visit yang penah Saksi lakukan, kegiatan usaha PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP 21 014 497 8-623 000 tidak dapat dijelaskan karena pada alamat Wajib Pajak hanya terdapat bangunan rumah tinggal tanpa penghuni dan telah telah berganti kepemilikan beberap. Namun sekitar Juli sampai dengan Agustus 2015, pada saat Wakil Wajib Pajak yaitu Sdr Agus Budianto berkonsultasi di KPP Pratama Malang Selatan Saksi mendapatkan informasi bahwa kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut adalah kegiatan kontruksi bangunan. Yang bersangkutan pada saat itu mengaku sebagai penanggungjawab PT AYARO;
- Bahwa Saksi telah mengirimkan surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (SP2DK) agar Wajb Pajak segera melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Bahwa Surat Himbauan yang sudah disampaikan kepada Wajib Pajak adalah :
  1. S-6032/WPJ. 12/KP. 14/2015, tanggal 12 Nopember 2015 tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan terkait kewajiban perpajakan pelaporan tahun pajak 2014 yaitu pelaporan SPT

Halaman 27 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masa PPh Pasal 21, pelaporan bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2) dalam SPT Tahunan PPh Badan, dan pelaporan SPT masa PPN ;

2. S.6033/WPJ.12/KP.14/2015, tanggal 12 Nopember 2015 tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait kewajiban perpajakan pelaporan tahun pajak 2015 yaitu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, dan pelaporan SPT Masa PPN ;

- Bahwa Pada tahun pajak 2014 dan 2015 Wajib Pajak mendapatkan proyek konstruksi pembangunan perumahan elit dari PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI NPWP: 02 983 155 9-804 001 (anak perusahaan Grup Lippo) dengan lokasi proyek konstruksi di kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar ;
- Bahwa sesuai dengan data master file pada aplikasi portal DJP. Alamat usaha Wajib Pajak adalah di Jalan Singgalang No 01 RT 003/RW 009 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang Namun berdasarkan hasil visit yang pernah Saksi lakukan sebagaimana telah Saksi uraikan dalam dokumen Laporan Kunjungan ke WP Nomor 436WPJ 12/KP1409/2016, tanggal 24 Mei 2016, Saksi tidak mendapatkan informasi dan data apapun karena di alamat tersebut hanya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal tidak berpenghuni . Tetangga sekitar bangunan rumah tersebut memberikan informasi bahwa rumah tersebut telah berganti kepemilikan beberapa kali. Sampai dengan saat Saksi memberikan keterangan ini Saksi tidak mengetahui keberadaan kantor Wajib Pajak tersebut ;
- Bahwa berdasarkan data pada aplikasi internal DJP, kewajiban pelaporan SPT Masa PPN an PT AYARO MULYA KONSTRUKSI. NPWP. 21 014 497 8-623 000 Januari smpai dengan Desember 2014 sampai dengan Desember 2015 sebagai berikut :

a. Pelaporan SPT PPN, Masa Januari s d Desember 2014;

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	01-Jan	Normal	<a href="#">S-01021361/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
2	03-Mar	Normal	<a href="#">S-01021360/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
3	04-Apr	Normal	<a href="#">S-01021359/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
4	05-May	Normal	<a href="#">S-01026010/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	130,096,800	27/06/2014
5	06-Jun	Normal	<a href="#">S-01033332/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	130,096,800	21/08/2014
6	07-Jul	Normal	<a href="#">S-01033331/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/08/2014
7	08-Aug	Normal	<a href="#">S-01004271/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
8	09-Sep	Normal	<a href="#">S-01004273/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
9	10-Oct	Normal	<a href="#">S-01004274/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
10	11-Nov	Normal	<a href="#">S-01004275/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
11	12-Dec	Normal	<a href="#">S-01004276/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015





Pelaporan SPT PPN, Masa februari 2014 tidak dilaporkan

b. Pelaporan SPT PPN, Masa Januari s d Desember 2015;

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	01-Jan	Normal	<a href="#">S-01030840/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
2	02-Feb	Normal	<a href="#">S-01030842/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
3	03-Mar	Normal	<a href="#">S-01030843/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
4	04-Apr	Normal	<a href="#">S-01030844/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
5	05-May	Normal	<a href="#">S-01030845/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	38,768,846	13/08/2015
6	06-Jun	Normal	<a href="#">S-01030846/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	58,803,753	13/08/2015
7	07-Jul	Normal	<a href="#">S-01043153/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	69,992,078	12/11/2015

Pelaporan SPT PPN, Masa Agustus s.d.Desember 2015 tidak dilaporkan

Berdasarkan data pada aplikasi interna DJP, pembayaran jenis pajak PPN an PT AYARO MULYA KONSIRUKSI NPWP 21 014 497 8-623 000 yang telah disetorkan adalah sebagai berikut:

a. Penyetoran PPN Masa Januari s d. Desember 2014 ;

No.	Masa	Tanggal Setor	Nilai	NTPN
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	130.096.800	1412140101120910
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	130.096.800	1302030605130314
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	Nopember	-	-	-
12	Desember	-	-	-
Jumlah setoran PPN Januari s.d. Desember 2014			260.193.600	

b. Penyetoran PPN Masa Januari s.d Desember 2015

No.	Masa	Tanggal Setor	Nilai Setoran	NTPN
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	12-Agst-15	38.768.846	1508061012060309
6	Juni	12-Agst-15	58.803.754	1113051513090309
7	Juli	19-Okt-15	69.992.078	1502081408121003
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	Nopember	-	-	-
12	Desember	-	-	-



Jumlah setoran PPN Januari s.d. Desember 2015

167.564.677

- Bahwa Surat himbauan tersebut sudah Saksi sampaikan melalui jasa ekspedisi. Namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi baik secara langsung ke KPP Pratama Malang Selatan atau tanggapan tertulis atas surat himbauan tersebut sehingga tidak dbuatkan Berita Acara konseling .Sekitar akhir Nopember 2015 Aquus Budianto menghubungi Saksi melalui telepon menyampaikan bahwa PT AYARO MULYA KONSTRUKSI mengalami kesulitan likuiditas Karena pembayaran termin pengerjaan proyek belum dilakukan oleh pemberi kerja yaitu PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI;
- Bahwa peredaran usaha yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak tahun pajak 2014 dan 2015 seharusnya adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak	Peredaran Usaha (Rp)		Selisih (Rp)
	Seharusnya Dilaporkan	Telah dilaporkan	
2014	9.981.026.496	5.277.289.424	4.703.737.072
2015	9.089.347.065		9.089.347.065
Jumlah	19.070.373.561	5.277.289.424	13.793.084.137

Wajib Pajak telah melaporkan nilai peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2014 hanya sebesar Rp 5.277.289.424 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat Rp 4.703.737.072 (empat tujuh ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah) yang tidak dilaporkan. Wajib Pajak seharusnya melaporkan peredaran usaha tahun pajak 2015 sebesar Rp 10.798.818.990 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), namun Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2015.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. **ERLIK ONO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik PPNS Pajak;
  - Bahwa Saksi mengerti yaitu dalam rangka Penyidikan atas Tindak Pidana Bidang Perpajakan yang sedang dilakukan terhadap PT AYARO

Halaman 30 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYA KONSTRUKSI, NPWP: 21.014.497.8-623.000, Tahun Pajak 2014 dan 2015;

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai KEPALA SEKSI PELAYANAN pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN adalah Mengkoordinasikan pendaftaran/registrasi Wajib Pajak (WP) – Pengusaha Kena Pajak (PKP), Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, penerimaan surat masuk, penerbitan produk ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP), keputusan, pengadministrasian dokumen dan berkas Wajib;
  - Bahwa Wajib Pajak a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP 21.014.497.8-623.000 hanya terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan pada tanggal 10 Oktober 2007 dan tidak memiliki NPWP cabang di Kantor Pelayanan Pajak lainnya.
  - Bahwa wajib pajak atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP: 21.014.497.8623.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 07 Januari 2008 sehingga memiliki kewajiban perpajakan untuk jenis pajak PPN;
  - Bahwa benar Wajib Pajak a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP 21.014.497.8-623.000 hanya terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan pada tanggal 10 Oktober 2007 dan tidak memiliki NPWP cabang di Kantor Pelayanan Pajak lainnya.
- Bahwa wajib pajak atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8623.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 07 Januari 2008 sehingga memiliki kewajiban perpajakan untuk jenis pajak PPN;
- Bahwa Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan dari Wajib Pajak yang disampaikan langsung ke KPP Pratama Malang Selatan diterima di bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) oleh Petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) yang bertugas menerima pelaporan SPT dari Wajib Pajak.
  - Bahwa berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Data Perpajakan pada Seksi Pelayanan di KPP Pratama Malang Selatan, pelaporan SPT Wajib Pajak a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000, Tahun Pajak 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Tahun Pajak 2014

### a. SPT PPh Masa Pasal 25

No.	N	M	P	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	0	0	N	S-01021226/PPH25/WPJ.12/KP.1403/2014	Nihil	21/05/2014
2	0	0	N	S-01021224/PPH25/WPJ.12/KP.1403/2014	Nihil	21/05/2014
3	0	0	N	S-01021221/PPH25/WPJ.12/KP.1403/2014	Nihil	21/05/2014
4	0	0	N	S-01021219/PPH25/WPJ.12/KP.1403/2014	Nihil	21/05/2014

SPT PPh Pasal 25 masa Mei s.d. Desember 2014 tidak dilaporkan

### b. SPT Masa PPh Pasal 21

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	01-Jan	Normal	<a href="#">S-01021227/PPH2114/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	78,000	21/05/2014
2	02-Feb	Normal	<a href="#">S-01021225/PPH2114/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	78,000	21/05/2014
3	03-Mar	Normal	<a href="#">S-01021223/PPH2114/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	78,000	21/05/2014
4	04-Apr	Normal	<a href="#">S-01021220/PPH2114/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	78,000	21/05/2014

SPT PPh Pasal 21 Masa Mei s.d. Desember 2014 tidak dilaporkan.

### c. SPT Masa PPN

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	01-Jan	Normal	<a href="#">S-01021361/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
2	03-Mar	Normal	<a href="#">S-01021360/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
3	04-Apr	Normal	<a href="#">S-01021359/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
4	05-May	Normal	<a href="#">S-01026010/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	130,096,800	27/06/2014
5	06-Jun	Normal	<a href="#">S-01033332/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	130,096,800	21/08/2014
6	07-Jul	Normal	<a href="#">S-01033331/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/08/2014
7	08-Aug	Normal	<a href="#">S-01004271/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
8	09-Sep	Normal	<a href="#">S-01004273/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
9	10-Oct	Normal	<a href="#">S-01004274/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
10	11-Nov	Normal	<a href="#">S-01004275/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
11	12-Dec	Normal	<a href="#">S-01004276/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015

## 2. Tahun Pajak 2015

a. SPT PPh 25 masa Januari s.d. Desember 2015 tidak dilaporkan;

b. SPT PPh Pasal 21 Masa Januari s.d. Desember 2015 tidak dilaporkan;

c. Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2015 ;

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	01-Jan	Normal	<a href="#">S-01030840/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
2	02-Feb	Normal	<a href="#">S-01030842/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
3	03-Mar	Normal	<a href="#">S-01030843/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
4	04-Apr	Normal	<a href="#">S-01030844/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
5	05-May	Normal	<a href="#">S-01030845/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	38,768,846	13/08/2015
6	06-Jun	Normal	<a href="#">S-01030846/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	58,803,753	13/08/2015
7	07-Jul	Normal	<a href="#">S-01043153/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	69,992,078	12/11/2015

d. SPT PPN masa Agustus s.d. Desember 2015 tidak dilaporkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SPT Masa PPN yang ditunjukan yang bersangkutan menerangkan bahwa SPT PPN Masa Agustus 2014 s.d. Desember 2014 dilaporkan secara ESPT. SPT PPN tersebut ditandatangani dengan cap stempel PT. AYARO MULYA KONTRUKSI, Nama Jelas AGUS BUDIANTO IR.MT dan Jabatan KOMISARIS PT. AYARO MULYA KONTRUKSI. Selain itu juga terdapat gambar kotak disilang dengan tulisan PKP SPT PPN Masa Januari 2015 s.d. Juli 2015 dilaporkan secara ESPT. SPT PPN tersebut ditandatangani dengan cap stempel PT. AYARO MULYA KONTRUKSI, Nama Jelas MITA ANDILA dan Jabatan STAF KEUANGAN. Selain itu juga terdapat gambar kotak disilang dengan tulisan Kuasa.
- Bahwa Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dengan membawa Formulir Induk 1111 yang sudah ditandatangani, SSP Lembar ke-3 kalo ada pembayaran dan flask disk yang berisi file Lampiran 1111 ke TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) untuk di upload ke SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) oleh petugas TPT. Petugas TPT meneliti kesuaian isi file dengan dengan Formulir Induk dan bila sudah lengkap petugas TPT memberikan tanda terima ke Wajib pajak berupa Bukti Penerimaan Surat dan menyimpan sebagai arsip berupa Lembar Pengawasan Arus Dokumen;
- Bahwa berdasarkan SPT PPh Badan yang ditunjukan penyidik yang bersangkutan menerangkan bahwa Saksi telah melihat SPT (Normal) 1771 Tahun Pajak 2014 beserta lampiran dengan nomor Bukti Penerimaan Surat nomor: S-02029855/PPWBIDR/WPJ.12/KP.1403/2015 tanggal 31 Agustus 2015 a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP: 21.014.497.8-623.000, nama yang tertera pada tandatangan di SPT Induk tersebut dan lampiran termasuk laporan keuangan adalah AGUS BUDIANTO, NPWP : 25.857.672.7-429.000.
- Bahwa Susunan pengurus dan komisaris tahun pajak 2014 adalah sebagai berikut
  1. DINA MARANETTA, NPWP : 27.253.412.4-429.000 sebagai Direktur;
  2. AGUS BUDIANTO, NPWP : 25.857.672.7-429.000 sebagai Komisaris.
- Bahwa Sistem Operasional Prosedure (SOP) mengenai penerimaan SPT Masa PPN yang Saksi ketahui adalah petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima SPT Masa PPN dengan meneliti kelengkapan

Halaman 33 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dokumen antara lain lampiran, SSP kurang bayar dan dokumen Surat Kuasa apabila ada kotak tertulis Kuasa yang di conteng pada halaman depan SPT Masa PPN yang dilaporkan;

- Bahwa Petugas penerima SPT masa tidak melakukan pengujian kebenaran dari dokumen maupun pengujian kebenaran penghitungan angka dalam elemen surat pemberitahuan (SPT) karena wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan hak **self assesment** yaitu hak untuk menghitung sendiri, hak untuk melakukan pembayaran pajak sendiri, dan hak untuk melaksanakan pelaporan.
- Bahwa apabila Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan Wajib Pajak masih terdapat data yang belum sesuai Wajib Pajak masih diberikan kesempatan melakukan pembetulan, pembetulan SPT dapat dilakukan berulang kali, pembetulan SPT tersebut tidak dapat dilakukan lagi apabila terhadap SPT tersebut sedang dilakukan tindakan **law enforcement** yaitu pemeriksaan baik yang bersifat administratif ataupun bersifat pidana.

Pengujian material atas SPT dan lampirannya yang disampaikan oleh Wajib Pajak akan ditindaklanjuti dalam tahap berikutnya yaitu dalam tahap **law enforcement** yang kewenangannya dimiliki oleh pemeriksa pajak atau penyidik PPNS.

- Bahwa tidak ada prosedur yang mengharuskan adanya pengujian material terhadap pelaporan isi elemen SPT dan lampirannya, karena kebenaran isi elemen SPT dan lampirannya adalah tanggung jawab Wajib Pajak sendiri sesuai hak **self assesment**.
- Bahwa dalam "SPT PPN Masa Januari 2015 s.d. Juli 2015" yang dilaporkan secara ESPT. SPT PPN tersebut ditandatangani dengan cap stempel PT. AYARO MULYA KONTRUKSI, Nama Jelas MITA ANDILA dan Jabatan STAF KEUANGAN. Selain itu juga terdapat gambar kotak disilang dengan tulisan Kuasa, dan Surat Kuasa tersebut terlampir dalam SPT PPN, tertulis pemberi kuasa adalah AGUS BUDIANTO IR. MT dan Penerima Kuasa adalah MITA ANDILA, Kewenangan Kuasa adalah untuk pengurusan dan pembayaran pajak PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. MITA ANDILA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sepupu dari Sdr. Agus Budianto dari garis bapak Saksi dan Sdr. Agus Budianto adalah paman dari Sdr. Yosse Armando dari garis Ibu Sdr. Agus Budianto;
- Bahwa Setahu Saksi berdasarkan faktur pajak yang diberikan Sdr. Agus Budianto PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 tahun pajak 2014 dan 2015 memiliki kegiatan usaha berupa kontruksi bangunan di Makassar dengan pemberi kerja adalah PT. RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001;
- Bahwa PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 tidak memiliki kantor di Malang, setelah mendapatkan perintah untuk membuat SPT Masa PPN dari Sdr. AGUS BUDIANTO Saksi melaksanakan tugas tersebut di rumah orang tua Saksi di Jl. Muharto VI/24, RT.007/RW.007, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT AYARO MULYA KONSTRUKSI memiliki kantor di lokasi proyek di Makassar/lainnya, karena Saksi tidak pernah ke lokasi proyek di Makassar ataupun di lokasi lainnya;
- Bahwa Kepengurusan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI Sepengetahuan Saksi Sdr. AGUS BUDIANTO sebagai Komisaris dan Sdr. Yosse Armando sebagai Direktur Namun pada tahun 2014 s.d. 2015 Sdr. Yosse Armando tidak pernah aktif dalam operasional kegiatan usaha, karena dalam aktifitas kegiatan Saksi di PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 Saksi hanya berhubungan dengan Sdr. AGUS BUDIANTO.
- Bahwa Tugas Saksi adalah :
  1. Menerima Faktur Pajak Keluaran dari Sdr. AGUS BUDIANTO secara langsung atau melalui email Saksi, sebagai bahan untuk membuat SPT PPN Masa Mei 2014 s.d. Masa Juli 2015;
  2. Melakukan pembayaran atas Kurang Bayar SPT PPN;
  3. Membuat SPT PPN Masa Mei 2014 s.d. Juli 2015 dan melaporkannya ke KPP Pratama Malang Selatan.
- Bahwa Saksi tidak melakukan tugas administrasi selain hanya membantu membuat SPT Masa PPN.
- Bahwa pengurus yang menyuruh Saksi untuk membuat SPT PPN Masa Mei 2014 s.d. Juli 2015 dan melaporkannya ke KPP Pratama Malang Selatan adalah AGUS BUDIANTO;
- Bahwa SPT SPT PPN Masa Agustus 2014 s.d. Desember 2014 dilaporkan secara ESPT. Tandatangan di SPT PPN tersebut tidak ada, tetapi ada Nama Jelas AGUS BUDIANTO IR.MT dan Jabatan KOMISARIS PT. AYARO MULYA KONTRUKSI. Selain itu juga terdapat gambar kotak disilang dengan tulisan PKP;

Halaman 35 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPT PPN Masa Januari 2015 s.d. Juli 2015 dilaporkan secara ESPT. Tandatangan di SPT PPN tersebut adalah tandatangan Saksi dengan cap stempel PT. AYARO MULYA KONTRUKSI, Nama Jelas MITA ANDILA dan Jabatan STAF KEUANGAN. Selain itu juga terdapat gambar kotak disilang dengan tulisan Kuasa. Surat Kuasa sudah Saksi serahkan ke Kantor Pajak Malang Selatan;
- Bahwa SPT PPN Masa Mei 2015 s.d. Juli 2015 dilaporkan secara ESPT. Tandatangan di SPT PPN tersebut adalah tandatangan Saksi dengan cap stempel PT. AYARO MULYA KONTRUKSI, Nama Jelas MITA ANDILA;
- Bahwa Pengurus yang menyuruh Saksi untuk menandatangani SPT PPN Masa Mei 2015 s.d. Juli 2015 adalah Pak AGUS BUDIANTO. Karena Pak AGUS BUDIANTO sering ada di Makasar sehingga Saksi yang disuruh atau diberi kuasa untuk mengurus perpajakan termasuk menandatangani SPT Masa PPN;
- Bahwa Saksi hanya membantu mengisi kolom Identitas halaman induk dan lampiran SPT 1771 sedangkan kolom yang lainnya diisi sendiri oleh Sdr. Agus Budianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan keuangan dan pembukuan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000;
- Bahwa Saksi menerima penghasilan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui transfer dari rekening Sdr. Agus Budianto;
- Bahwa Pada tahun 2014 dan 2015, status Saksi bukan karyawan tetap PT AYARO MULYA KONSTRUKSI karena pada saat itu Saksi masih kuliah di POLTEKES Malang. Saksi menandatangani SPT PT AYARO MULYA KONSTRUKSI karena pada saat itu diminta oleh AGUS BUDIANTO karena karyawannya berhenti dan diberi imbalan Rp 500.000,- setiap bulan. Hubungan Saksi dengan AGUS BUDIANTO adalah saudara sepupu. Mengenai SPT PPh 21 sepengetahuan Saksi PT AYARO tidak pernah melaporkan SPT PPh Pasal 21 sehingga Saksi tidak pernah tercatat sebagai karyawan;
- Bahwa Pada tahun 2014 dan 2015 :
  - Saksi sama sekali belum memahami masalah perpajakan karena status Saksi sebagai mahasiswa di bidang kesehatan..
  - Saksi menandatangani surat kuasa khusus dengan pemberi kuasa AGUS BUDIANTO untuk pengurusan dan pembayaran pajak PT AYARO MULYA KONSTRUKSI.
  - Saksi belum mempunyai NPWP.

Halaman 36 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak pernah menyampaikan SPT PPh karena belum mempunyai NPWP.
- Saksi tidak memiliki brevet di bidang perpajakan.
- Saksi tidak mempunyai pendidikan formal di bidang perpajakan.
- Saksi tidak memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara

Sertifikasi Konsultan Pajak.

- Bahwa Saksi tidak memahami ketentuan dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI Nomor : 229/PMK.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 karena belum pernah mempelajari ketentuan tersebut.
- Bahwa Setelah membaca peraturan tersebut Saksi memahami bahwa Saksi tidak memenuhi syarat untuk menjadi kuasa mengurus masalah perpajakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4.RANDOLPH LATUMAHINA**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa AGUS BUDIANTO tetapi Saksi tahu dengan yang bersangkutan dari Surat Pelaksanaan Pekerjaan (SP3);
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Direktur PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI adalah bertanggungjawab atas kelangsungan perusahaan secara umum baik dalam mengatur kebijakan usaha dan strategi perusahaan termasuk mengawasi keuangan perusahaan.
- Bahwa PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI mempunyai proyek di Makasar, kemudian mengadakan tender untuk mengerjakan proyek tersebut. PT AYARO merupakan salah satu kontraktor yang mengikuti tender tersebut, PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI memilih PT AYARO karena menawarkan harga yang murah dengan spek sesuai yang diinginkan;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 berdasarkan dokumen administrasi yang kami terima yaitu, Alamat Kantor Pusat di Jalan Singgalang No.01, Malang dan Kantor Cabang di Jalan Cinambo Indah no.05, Bandung. Sedangkan alamat di Makassar Saksi tidak mengetahui karena dokumen administrasi semuanya menggunakan alamat di Jl. Singgalang No. 01, Kota Malang  
Saksi tidak pernah berkunjung pada kedua alamat tersebut karena Saksi tidak melakukan pengecekan ke lapangan hanya melakukan penelitian secara administrasi saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2014 dan 2015 ada transaksi usaha antara PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 dengan PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001;
- Bahwa Transaksi usaha antara PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 dengan PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 pada tahun 2014 dan 2015 adalah Pembangunan Perumahan *Double Decker Spesial Type Fase 1*, Proyek Waterfront City Pavillion Residen, Makassar;
- Bahwa transaksi usaha antara PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, dengan PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI dituangkan dalam perjanjian;
- Bahwa Perjanjian yang telah ditandatangani antara PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 dengan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 secara ringkas Saksi jelaskan sebagai berikut :
  1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 29 (duapuluh sembilan) unit Pembangunan Perumahan *Double Decker Phase 1*, Waterfront City Pavillion Residen, Makassar.  
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 100% dari tanggal 24 Maret s.d. 31 Desember 2014 dengan nilai proyek sebesar Rp 27.388.800.000 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp 2.738.880.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
  2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 2 (dua) unit Pembangunan Perumahan *Double Decker Spesial Type Fase 1*, Proyek Waterfront City Pavillion Residen, Makassar.  
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 100% dari tanggal 1 Oktober 2014 s.d. 1 Juli 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp 2.572.014.150 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu seratus lima puluh rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp 257.201.415,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu empat ratus lima belas rupiah).
- Bahwa Proyek konstruksi berlokasi di *Waterfront City Pavillion Residen*, Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar (samping Trans Studio Makassar).

Halaman 38 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 beserta lampiran ditandatangani dan diberikan paraf oleh Sdr. **EKO BUDI BUDI SULISTIYO** dan Sdr. **MARTHA A.L. MARPAUNG** bertindak selaku Kuasa Direksi PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI dan Sdr. **AGUS BUDIANTO** bertindak selaku Direktur PT AYARO MULYA KONSTRUKSI.
- Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 beserta lampiran ditandatangani dan diberikan paraf oleh Sdr. **EKO BUDI BUDI SULISTIYO** dan Sdr. **DJAJADI** bertindak selaku Kuasa Direksi PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI dan Sdr. **AGUS BUDIANTO** bertindak selaku Direktur PT AYARO MULYA KONSTRUKSI.
- Bahwa YOSSE ARMANDO SUBANDHI tidak ikut menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)
- Bahwa Pada waktu penandatanganan - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 AGUS BUDIANTO mengaku sebagai Direktur PT AYARO MULYA KONSTRUKSI;
- Bahwa Proyek konstruksi sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 29 (duapuluh sembilan) unit Pembangunan Perumahan *Double Decker Phase 1*, Waterfront City Pavillion Residen, Makassar hanya dapat diselesaikan sebagian sehingga nilai yang dibayarkan kepada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 adalah sebesar Rp 18.408.697.200 (delapan belas miliar empat ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	FAKTUR PAJAK			
	NOMOR	TANGGAL	DPP	PPN
1	0100021405980595	01/06/2014	1,300,968,000	130,096,800
2	0100021405050596	24/06/2014	1,300,968,000	130,096,800
3	0100021405050597	25/08/2014	1,347,802,848	134,780,285
4	0100021405050598	25/09/2014	1,277,550,576	127,755,058
5	0100021405050599	25/10/2014	1,353,006,720	135,300,672
6	0100021405050600	25/11/2014	1,691,258,400	169,125,840
7	0100021405050601	15/12/2014	1,709,471,952	170,947,195
8	0100011510641740	25-01-2015	1,636,617,744	163,661,774
9	0100011510641741	25-02-2015	1,176,075,072	117,607,507

Halaman 39 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



10	0100011510641742	27-03-2015	1,790,131,968	179,013,197
11	0100011510641744	25-04-2015	824,813,712	82,481,371
12	0100011510641745	27-05-2015	387,688,464	38,768,846
13	0100011510641747	29-06-2015	588,037,536	58,803,754
14	0100011510641749	31-07-2015	699,920,784	69,992,078
15	0100011510641750	31-08-2015	840,425,328	84,042,533
16	0110011510641752	30-09-2015	483,960,096	48,396,010
Jumlah			18,408,697,200	1,840,869,720

Proyek konstruksi sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 2 (dua) unit Pembangunan *Perumahan Double Decker Spesial Type Fase 1*, Proyek Waterfront City Pavillion Residen, Makassar juga hanya dapat diselesaikan sebagian sehingga nilai yang dibayarkan kepada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 adalah sebesar Rp 661.676.361,- (enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	FAKTUR PAJAK			
	NOMOR	TANGGAL	DPP	PPN
1	0100011510641743	02-04-2015	150,269,927	15,026,993
2	0100011510641746	27-05-2015	190,830,590	19,083,059
3	0100011510641748	30-06-2015	106,288,485	10,628,849
4	0110011510641751	30-09-2015	214,287,359	21,428,736
Jumlah			661,676,361	66,167,637

- Bahwa Realisasi pembayaran dari PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI kepada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI pada tahun pajak 2014 adalah sebesar Rp 10.632.160.980,- (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN	Tagihan	Potongan PPh Final	Biaya-Biaya	Realisasi Pembayaran	Dibayar melalui Rekening.. / tanggal
1	2	3	4 = 2+3	6	7	8 = 4-6-7	9
1	1.300.968.000	130.096.800	1.431.064.800	39.029.040	30.000	1.392.005.760	BCA-Agus Budianto 17/06/2014
2	1.300.968.000	130.096.800	1.431.064.800	39.029.040	30.000	1.392.005.760	BCA-Agus Budianto 08/08/2014
3	1.347.802.848	134.780.285	1.482.583.133	40.434.085	30.000	1.442.119.048	BCA-Agus Budianto 03/10/2014
4	1.277.550.576	127.755.058	1.405.305.634	38.326.518	30.000	1.366.949.116	BCA-Agus Budianto 28/10/2014
5	1.353.006.720	135.300.672	1.488.307.392	54.120.268	30.000	1.434.157.124	BCA-Agus Budianto 08/12/2014
6	1.691.258.400	169.125.840	1.860.384.240	67.650.336	0	1.792.733.904	BCA-Agus Budianto 26/01/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	1.709.471.952	170.947.195	1.880.419.147	68.378.879	25.000	1.812.015.268	BCA-Agus Budianto 04/03/2015
	9.981.026.496	998.102.650	10.979.129.146	346.968.166	175.000	10.631.985.980	

Realisasi pembayaran dari PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI kepada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI pada tahun pajak 2015 adalah sebesar Rp 9.634.707.887,- (sembilan miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN	Tagihan	Potongan PPh Final	Biaya-Biaya	Realisasi Pembayaran	Dibayar melalui Rek / tanggal
1	2	3	4 = 2+3	6	7	8 = 4-6-7	9
1	1.636.617.744	163.661.774	1.800.279.518	65.464.710	25.000	1.734.789.808	BCA-Agus Budianto 18/03/2015
2	1.176.075.072	117.607.507	1.293.682.579	47.043.003	25.000	1.246.614.576	BCA-Agus Budianto 06/05/2015
3	1.790.131.968	179.013.197	1.969.145.165	71.605.279		1.897.514.886	
5	150.269.927	15.026.993	165.296.920	6.010.797		159.286.123	
			2.134.442.085	77.616.076	25.000	2.056.801.009	BCA-Agus Budianto 13/05/2015
4	824.813.712	82.481.371	907.295.083	32.992.548	25.000	874.277.535	BCA-Agus Budianto 28/05/2015
6	387.688.464	38.768.846	426.457.310	15.507.538		410.924.772	
7	190.830.590	19.083.059	209.913.649	7.633.224		202.280.425	
			636.370.959	23.140.762	25.000	613.205.197	BCA-Agus Budianto 13/07/2015
8	588.037.536	58.803.754	646.841.290	23.521.502	-	623.319.788	CIMB Niaga - AYARO, 04/08/2015
9	106.288.485	10.628.849	116.917.334	4.251.540	-	112.665.794	CIMB Niaga - AYARO, 18/08/2015
10	699.920.784	69.992.078	769.912.862	27.996.831	50.000	741.916.031	
						111.873.188	Bayar ke PT Citra Indah Mitra
						630.042.843	CIMB Niaga - AYARO, 18/09/2015
11	840.425.328	84.042.533	924.467.861	33.617.013	25.000	890.850.848	
						184.403.054	Bayar ke PT Surya Pertiwi
						58.500.000	Bayar ke PT Monier
						65.755.900	Bayar ke Roselina Randa
						179.200.000	Bayar ke PT Bumi SB
						40.000.000	Bayar ke PT Kepuh KA
						362.991.894	CIMB Niaga - AYARO, 09/10/2015
12	214.287.359	21.428.736	235.716.095	8.571.495	5.000	227.144.600	BCA - DINA MARANETTA 04/12/2015
13	483.960.096	48.396.010	532.356.106	19.358.405	5.000	512.997.701	
						41.513.472	Bayar ke PT Duta Kreasi Bersama Real
						149.039.566	Bayar ke PT Barawaja
						115.425.000	Bayar ke Roselina Randa
						130.060.000	Bayar ke PT Bumi SB
						76.915.000	Bayar ke PT Kepuh KA
						39.663	CIMB Niaga - AYARO, 22/01/2016
	9.089.347.065	908.934.707	9.998.281.772	363.573.885	210.000	9.634.582.887	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran kepada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 pada tahun pajak 2014 dan 2015 **sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** dan saat dilakukan realisasi pembayaran terlebih dahulu dipotong dengan PPh Final atas jasa konstruksi
- Bahwa Realisasi pembayaran atas pelaksanaan proyek konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah disepakati sebelumnya dibayarkan bertahap per termin sesuai dengan progress penyelesaian proyek konstruksi.  
Realisasi pembayaran dari PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI kepada wakil PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 melalui rekening bank tahun pajak 2014 dan 2015 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Nomor Rekening **2830694555**, pada **BANK CENTRAL ASIA KCP Bandung Ujung Berung** a.n. **AGUS BUDIANTO**;
  2. Nomor Rekening **0280100015199**, pada **BANK CIMB NIAGA KC Bandung Buah Batu** a.n. **PT AYARO MULYA KONSTRUKSI**;
  3. Nomor Rekening **2830393211**, pada **BANK CENTRAL ASIA KC AH Nasution Bandung** a.n. **DINA MARANETTA**;
- Bahwa Pembayaran tahun 2015 nomor urut 10 dan 11 yang ditransfer ke rekening **BANK CIMB NIAGA KC Bandung Buah Batu** Nomor **0280100015199** a.n. **PT AYARO MULYA KONSTRUKSI** setelah terlebih dahulu dipotong untuk pembayaran ke beberapa perusahaan karena sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan (SP3) Lampiran 2 angka 2 mengenai Cara pembayaran point 2.5 dan 2.6 PT AYARO MULYA KONSTRUKSI memberi hak dan kuasa kepada PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI untuk memotong secara langsung hutang Supplier yang direkomendasikan oleh PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI;
- Bahwa PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 telah menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan jasa konstruksi kepada PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 dengan perincian sebagai berikut :

a. Faktur Pajak Masa Januari s.d. Desember 2014 :

No.	FAKTUR PAJAK				
	NOMOR	TANGGAL	DPP	PPN	JUMLAH
1	0100021405980595	01/06/2014	1,300,968,000	130,096,800	1.431.064.800
2	0100021405050596	24/06/2014	1,300,968,000	130,096,800	1.431.064.800
3	0100021405050597	25/08/2014	1,347,802,848	134,780,285	1.482.583.133
4	0100021405050598	25/09/2014	1,277,550,576	127,755,058	1.405.305.634
5	0100021405050599	25/10/2014	1,353,006,720	135,300,672	1.488.307.392

Halaman 42 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



6	0100021405050600	25/11/2014	1,691,258,400	169,125,840	1.860.384.240
7	0100021405050601	15/12/2014	1,709,471,952	170,947,195	1.880.419.147
Jumlah Faktur Pajak 2014			9,981,026,496	998,102,650	10.979.129.146

b. Faktur Pajak Masa Januari s.d. Desember 2015 :

No.	FAKTUR PAJAK				
	NOMOR	TANGGAL	DPP	PPN	JUMLAH
1	0100011510641740	25-01-2015	1,636,617,744	163,661,774	1.800.279.518
2	0100011510641741	25-02-2015	1,176,075,072	117,607,507	1.293.682.579
3	0100011510641742	27-03-2015	1,790,131,968	179,013,197	1.969.145.165
4	0100011510641743	02-04-2015	150,269,927	15,026,993	907.295.083
5	0100011510641744	25-04-2015	824,813,712	82,481,371	165.296.920
6	0100011510641745	27-05-2015	387,688,464	38,768,846	426.457.310
7	0100011510641746	27-05-2015	190,830,590	19,083,059	209.913.649
8	0100011510641747	29-06-2015	588,037,536	58,803,754	646.841.290
9	0100011510641748	30-06-2015	106,288,485	10,628,849	116.917.334
10	0100011510641749	31-07-2015	699,920,784	69,992,078	769.912.862
11	0100011510641750	31-08-2015	840,425,328	84,042,533	924.467.861
12	0110011510641751	30-09-2015	214,287,359	21,428,736	235.716.095
13	0110011510641752	30-09-2015	483,960,096	48,396,010	532.356.106
Jumlah Faktur Pajak 2015			9,089,347,065	908,934,707	9.998.281.772

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5.RUDYANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AGUS BUDIANTO;
- Bahwa Barang kena pajak yang dibeli oleh PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 pada tahun pajak 2014 dan 2015 berupa Kerangka atap dari bahan galfalum dengan berbagai macam type dan merk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang mewakili PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 dalam pembelian barang kena pajak pada perusahaan Saksi, yang Saksi ketahui hanya nama badan hukum nya yaitu PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 sesuai yang tertera dalam faktur pajak dan invoice..
- Bahwa Dokumen yang berkaitan dengan proses pembelian adalah Faktur (Invoice), *Delivery Note* (surat jalan) dan Faktur Pajak.
- Perincian Tanda Terima Barang tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nomor Invoice	Nilai (Rp)
1	22/12/2014	221214027	8.634.800
2	20/12/2014	201214002	4.756.000
Jumlah			13.390.800

- Perincian Nota Penjualan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nomor Invoice	Nilai (Rp)
1	29-01-2015	290115041	4.800.000





2	26-01-2015	260115045	7.200.000
3	26-01-2015	260115044	2.002.500
4	28-01-2015	280115043	4.800.000
5	29-01-2015	290115030	667.500
6	02-02-2015	020215027	4.005.000
7	05-02-2015	050215003	1.440.000
8	23-02-2015	230215034	951.200
9	23-02-2015	230215001	480.000
10	06-03-2015	060315005	8.970.000
11	12-03-2015	120315019	9.600.000
12	17-04-2015	170415018	1.248.000
13	16-04-2015	160415052	1.872.000
14	11-04-2015	110415041	8.100.000
15	10-04-2015	100415031	11.040.000
16	13-04-2015	130415004	12.528.000
17	01-06-2015	010615038	10.246.000
18	12-06-2015	120615043	10.650.000
19	21-08-2015	210815041	21.300.000
20	15-08-2015	150815041	21.240.000
21	13-08-2015	130815036	705.000
22	25-08-2015	250815021	940.000
23	29-08-2015	290815048	16.950.000
24	24-08-2015	240815065	4.700.000
25	20-08-2015	200815045	17.700.000
26	07-09-2015	070915058	6.390.000
27	02-09-2015	020915037	3.550.000
Jumlah			194.075.200

- Bahwa Barang kena pajak berupa kerangka atap dari bahan galfalum dengan berbagai *type* dikirimkan dari PT Kepuh Kencana Arum cabang Makassar ke lokasi proyek konstruksi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar (samping Trans Studio Makassar).
- Bahwa Pembayaran atas pembelian barang kena pajak dilakukan dengan cara setoran tunai ke rekening milik PT KEPUH KENCANA ARUM, NPWP : 01.440.166.5-641.000 di Bank BCA cabang Mojokerto, nomor rekening : 050 153 3008.
- Bahwa Saksi tidak tahu rekening dari PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang kena pajak tersebut karena disetor tunai ke rekening perusahaan kami bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer antar rekening tetapi Saksi bisa pastikan bahwa seluruh tagihan pembelian telah dibayar lunas.

- Bahwa Pembayaran atas pembelian dari PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 pada tahun pajak 2014 dan 2015 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT KEPUH KENCANA ARUM, NPWP : 01.440.166.5-641.000
- Bahwa PT KEPUH KENCANA ARUM, NPWP : 01.440.166.5-641.000 telah menerbitkan Faktur Pajak atas pembelian barang kena pajak oleh PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 dengan perincian sebagai berikut :

a. Faktur Pajak Masa Januari s.d. Desember 2014 :

No.	Nomor	Tanggal	DPP	PPN
1	0100031477242912	22-12-2014	7.849.818	784.982
2	0100031477242747	20-12-2014	4.323.636	432.364
JUMLAH			12.173.454	1.217.346

b. Faktur Pajak Masa Januari s.d. Desember 2015 :

No.	Nomor	Tanggal	DPP	PPN
1	0100001554854868	29-01-2015	4.363.636	436.364
2	0100001554853976	26-01-2015	6.545.455	654.545
3	0100001554853975	26-01-2015	1.820.455	182.045
4	0100001554854563	28-01-2015	4.363.636	436.364
5	0100001554854857	29-01-2015	606.818	60.682
6	0100001554855566	02-02-2015	3.640.909	364.091
7	0100001554856533	05-02-2015	1.309.091	130.909
8	0100001554860856	23-02-2015	864.727	86.473
9	0100001554860823	23-02-2015	436.364	43.636
10	0100001554863593	06-03-2015	8.154.545	815.455
11	0100001554865020	12-03-2015	8.727.273	872.727
12	0100011548566424	17-04-2015	1.134.545	113.455
13	0100011548566163	16-04-2015	1.701.818	170.182
14	0100011548565173	11-04-2015	7.363.636	736.364
15	0100011548564937	10-04-2015	10.036.364	1.003.636
16	0100011548565209	13-04-2015	11.389.091	1.138.909
17	0100011548575431	01-06-2015	9.314.545	931.455
18	0100011548578082	12-06-2015	9.681.818	968.182
19	0100031530788408	21-08-2015	19.363.636	1.936.364
20	0100031530787208	15-08-2015	19.309.091	1.930.909
21	0100031530786587	13-08-2015	640.909	64.091
22	0100031530789104	25-08-2015	854.545	85.455
23	0100031530790390	29-08-2015	15.409.091	1.540.909
24	0100031530788825	24-08-2015	4.272.727	427.273
25	0100031530788058	20-08-2015	16.090.909	1.609.091
26	0100031530792241	07-09-2015	5.809.091	580.909
27	0100031530791214	02-09-2015	3.227.273	322.727
JUMLAH			176.431.998	17.643.202

Halaman 45 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

- Bahwa Faktur Pajak atas pembelian yang diterbitkan kepada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 pada tahun pajak 2014 dan 2015 telah dilaporkan seluruhnya dalam SPT masa PPN a.n. PT KEPUH KENCANA ARUM, NPWP : 01.440.166.5-641.000 sehingga PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 dapat menggunakan haknya untuk melakukan memperhitungkan PPN yang telah dibayar sebagai Pajak Masukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5.HILDA KUSUMO, S.H.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AGUS BUDIANTO;
- Bahwa Tugas Saksi pada bagian hukum BCA Kanwil malang adalah memberikan Opini Hukum terkait Operasional dan Kredit, pemdampingan Saksi karyawan BCA atas panggilan polisi, pajak dan instansi lainnya;
- Bahwa Berdasarkan Mutasi Rekening Tahapan, AGUS BUDIANTO memiliki rekening di PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk, Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung nomor 02830694555;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rekening Tahapan No.02830694555 dibuka;
- Bahwa Secara umum Rekening Tabungan nomor 02830694555 atas nama Terdakwa AGUS BUDIANTO pada tahun 2014 dan 2015 masih aktif baik mutasi kredit (uang masuk) maupun mutasi debit (uang keluar);
- Bahwa Berdasarkan kolom keterangan pada mutasi rekening, dapat diketahui berasal darimana uang masuk dan uang keluar pada rekening tersebut;
- Bahwa Ketika Saksi diperlihatkan data mutasi Kredit Rekening Tahapan nomor: 02830694555 atas nama AGUS BUDIANTO untuk tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Cabang transaksi	Kredit
17/06/14	KR Otomatis PT BANK CIMB NIAG BNIAIDJA /030045 RANCANG KOMUNIKA M 2D/BAK PP/PT RKM/AM	0998	1.392.005.760
08/08/14	KR Otomatis PT BANK CIMB NIAG BNIAIDJA /029218 RANCANG KOMUNIKA M 2D/BAK PP/PT RKM/AM	0998	1.392.005.760
03/10/14	KR Otomatis PT BANK CIMB NIAG BNIAIDJA /020513 RANCANG KOMUNIKA M 2D/BAK PP/PT RKM/AMK	0998	1.442.119.047
28/10/14	KR Otomatis PT BANK CIMB NIAG BNIAIDJA /027112 RANCANG KOMUNIKA M 2D/BAK PP/PT RKM/AMK	0998	1.366.949.116
08/12/14	KR Otomatis PT BANK CIMB NIAG	0998	1.434.157.123

Halaman 46 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BNIAIDJA /035076 RANCANG KOMUNIKA M 2D/BAK PP/PT RKM/AMK		
	JUMLAH		7.027.236.806

Saksi menyatakan bahwa berdasarkan Print Out mutasi rekening Tahapan BCA Januari sampai dengan Desember 2014 adalah benar transaksi mutasi kredit tersebut ada dan benar tercatat pada rekening nomor 02830694555 atas nama Terdakwa AGUS BUDIANTO tahun 2014, dengan identitas pengirim RANCANG KOMUNIKA M.

- Bahwa Ketika Saksi diperlihatkan data mutasi Kredit Rekening Tahapan nomor: 02830694555 atas nama AGUS BUDIANTO untuk tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Cabang transaksi	Kredit
26/01/15	KR Otomatis NOBU CYBER PARK KA LFIBIDJ1/021530 RANCANG KOMUNIKA M RTGS 108/PUG/XII/2	0998	1.792.733.904
04/03/15	KR Otomatis PT BANK CIMB NIAG BNIAIDJA /017574 RANCANG KOMUNIKA KWT 2D	0998	1.812.015.269
18/03/15	KR Otomatis PT BANK CIMB NIAG BNIAIDJA /012686 RANCANG KOMUNIKA M sp0011	0998	1.734.789.808
06/05/15	KR Otomatis PT BANK CIMB NIAG BNIAIDJA /012388 RANCANG KOMUNIKA M 2D/BAK PP/PTR/AMK-M	0998	1.246.614.576
13/05/15	KR Otomatis PT BANK CIMB NIAG BNIAIDJA /018314 RANCANG KOMUNIKA M 2D/BAK PP/PTR/AMK-M	0998	2.056.801.009
28/05/15	KR Otomatis PT BANK CIMB NIAG BNIAIDJA /019230 RANCANG KOMUNIKA M 2D/BAK PP/PTR/AMK-M	0998	874.277.535
13/07/15	KR Otomatis PT BANK CIMB NIAG BNIAIDJA /023027 RANCANG KOMUNIKA M 2D/KHS/BAKPP/PT RKM	0998	613.205.197
	JUMLAH		10.130.437.298

saksi menyatakan bahwa berdasarkan Print Out mutasi rekening Tahapan BCA Januari sampai dengan Desember 2015 adalah benar transaksi mutasi kredit tersebut ada dan benar tercatat pada rekening nomor 02830694555 atas nama Terdakwa AGUS BUDIANTO tahun 2014, dengan identitas pengirim RANCANG KOMUNIKA M.

- Bahwa dari Laporan Informasi Mutasi DINA MARANETTA periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2015 yang bersangkutan memiliki rekening pada PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk, dengan nomor rekening 02830393211;
- Bahwa sesuai laporan informasi mutasi rekening DINA MARANETTA, pada tanggal 04 Desember 2015 terdapat pemindah bukuan CR sebesar Rp. 227.139.599,64, namun tidak tampak penyetornya dan beritanya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



**6. AGUS PURWO SANTOSO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AGUS BUDIANTO;
- Bahwa Dasar Saksi hadir mewakili PT BANK CIMB NIAGA Kantor Cabang Buah Batu Bandung, karena Saksi diberi penugasan berdasarkan Surat Tugas No.002/EXT-CIMB-BAT/VII/2019 tanggal 05 Juli 2017 untuk memberikan keterangan terkait pemanggilan sebagai saksi terkait atas dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT AYARO MULYA KONSTRUKSI;
- Bahwa Tugas Pokok Saksi adalah meyakinkan tugas Operation dan Service dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, Wewenang Saksi hanya dibidang Operasional dan Service ke dalam dan keluar;
- Bahwa Berdasarkan data aplikasi pembukaan rekening dan data mutasi rekening terdapat rekening atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI di PT. BANK CIMB NIAGA Kantor Cabang Bandung Buah Batu mulai tahun 2015;
- Bahwa Berdasarkan aplikasi pembukaan rekening, yang mengajukan pembukaan rekening atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI pada PT. BANK CIMB NIAGA Kantor Cabang Bandung Buah Batu adalah DINA MARANETTA sebagai Direktur dan AGUS BUDIANTO sebagai Komisaris PT AYARO MULYA KONSTRUKSI;
- Bahwa Berdasarkan aplikasi pembukaan rekening, AGUS BUDIANTO mencantumkan namanya sebagai Komisaris PT AYARO MULYA KONSTRUKSI;
- Bahwa Berdasarkan aplikasi pembukaan rekening yang mempunyai kewenangan mencairkan adalah Ibu DINA MARANETTA;
- Bahwa Secara umum Rekening Tabungan nomor 0280100015199 atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI pada tahun 2015 masih aktif baik mutasi kredit (uang masuk) maupun mutasi debit (uang keluar), saat ini rekening tersebut sudah tidak aktif sejak 20 Juli 2016 saldo per 11 Juli 2019 sebesar Rp.3.464.191,60;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mutasi kredit itu darimana karena datanya ada di Cabang penyeter dan mutasi debet kemana Saksi juga tidak tahu karena harus melihat slip transaksi;
- Bahwa Ketika Saksi diperlihatkan data mutasi Kredit Rekening nomor: 0280100015199 atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI untuk tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Cabang Penerima	Kredit
-----	------------	-----------------	--------





04/08/15	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VI/2015	Bandung Buah Batu	623.319.788
18/08/15	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/VI/2015	Bandung Buah Batu	112.665.794
18/09/15	Incoming RTGS	Bandung Buah Batu	630.017.843
09/10/15	Incoming RTGS	Bandung Buah Batu	362.966.894
22/01/16	2D/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IX/201	Bandung Buah Batu	39.663
JUMLAH			1.729.009.982

saksi menyatakan bahwa Berdasarkan Print Out mutasi rekening tabungan Juni 2015 sampai dengan Januari 2016 adalah benar transaksi mutasi kredit tersebut ada dan tercatat pada rekening nomor 0280100015199 atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI tahun 2015 dan Januari 2016, identitas pengirim untuk setoran tanggal 04/08/2015 dan tanggal 18/08/2015 Saksi tidak tahu karena transaksi dilakukan sendiri oleh pengirim melalui fasilitas E-Banking, setoran tanggal 18/09/2015 dan 09/10/2015 sesuai confirmation advice dilakukan oleh PT RANCANG KOMUNIKA MAN, dan setoran tanggal 22/01/2016 sesuai dengan print out data yang terdapat sistem cabang juga dilakukan oleh PT RANCANG KOMUNIKA MAN;

- Bahwa Semua transaksi yang tercantum dalam Rekening PT. Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 0280100015199 atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI untuk periode 1 Januari 2015 s.d. 22 Januari 2016 telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**7.H. CHUSEN BISRI, S.H.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AGUS BUDIANTO, YOSSE ARMANDO SUBANDHI dan ANDRIANAN OKNOVA;
- Bahwa Sesuai dengan Buku Register Minuta Akte, benar bahwa AGUS BUDIANTO, YOSSE ARMANDO, dan ANDRIANA OKNOVA pernah datang ke kantor Saksi untuk membuat 2 (dua) akte yaitu Nomor 27 perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan Nomor 28 perihal Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT AYARO MULYA KONSTRUKSI. Ketiga orang tersebut menandatangani akte-akte tersebut dihadapan Saksi.;
- Bahwa Akte Nomor 27 Tanggal 24-03-2009 adalah perihal kesepakatan AGUS BUDIANTO, YOSSE ARMANDO, dan ANDRIANA OKNOVA untuk membuat perubahan Kepemilikan Saham PT AYARO MULYA KONSTRUKSI menjadi :



- YOSSE ARMANDO SUBANDHI sebesar 33%
- AGUS BUDIANTO sebesar 33%, dan
- ANDRIANA OKNOVA sebesar 34%.

Akte Nomor 28 Tanggal 24-03-2009 memuat perubahan Pengurus PT AYARO MULYA KONSTRUKSI menjadi :

- YOSSE ARMANDO SUBANDHI jabatan Direktur,
  - ANDRIANA OKNOVA jabatan Komisaris I, dan
  - AGUS BUDIANTO jabatan Komisaris II.
- Bahwa benar Akte 27 tanggal 24 April 2009 dan Akte 28 Tanggal 24 Maret 2009 adalah Akta Notaris yang Saksi buat, dan akte tersebut telah lengkap dan sah
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**8. GALUH EVA PURNAMA, S.H., M.Kn** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal AGUS BUDIANTO karena yang datang ke kantor Saksi pada saat pembuatan akte adalah YOSSE ARMANDO SUBANDI jabatan Direktur yang mendapatkan kuasa dari RUPS PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI. AGUS BUDIANTO tidak datang pada saat pembuatan akte tersebut.;
- Bahwa Yang Saksi buat adalah Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI Nomor 34 Tanggal 27 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Pengalihan Saham dari ANDRIANA OKNOVA kepada YOSSE ARMANDO SUBANDI dan AGUS BUDIANTO. Perubahan Susunan Pengurus PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI yaitu menjadi Direktur YOSSE ARMANDO dan Komisaris AGUS BUDIANTO.;
- Bahwa Yang datang pada saat pembuatan akte adalah YOSSE ARMANDO SUBANDI sedangkan AGUS BUDIANTO dan ANDRIANA OKNOVA tidak hadir dalam pembuatan akte karena sudah diputuskan dalam RUPS;
- Bahwa Nomor 34 Tanggal 27 Oktober 2009 adalah Akta Notaris yang Saksi buat, dan akte tersebut telah lengkap dan sah yang telah ditandatangani penghadap YOSSE ARMANDO SUBANDI dan saksi-saksi notaris dan Saksi sebagai pejabat notaris.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



9. **SRI HENDROWATI, S.H., M.Kn.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal AGUS BUDIANTO, YOSSE ARMANDO SUBANDHI dan YENNI KURNIAWATI hanya mengenal sebatas Klien saat jual saham dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa Sesuai dengan Buku Register Minuta Akte, benar bahwa AGUS BUDIANTO, YOSSE ARMANDO, dan YENNI KURNIAWATI pernah datang ke kantor Saksi untuk membuat akte Nomor 04 tanggal 15 Juli 2010 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akte Nomor 05 tanggal 15 Juli 2010 perihal jual beli saham PT AYARO MULYA KONSTRUKSI yang bkedudukan di Kota Malang dan Ketiga orang tersebut menanda menandatangani akte-akte tersebut dihadapan Saksi;
- Bahwa Akte Nomor 04 Tanggal 15 Juli 2010 adalah perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai penjualan Saham milik IR AGUS BUDIANTO, membahas mengenai susunan pengurus dalam keputusan rapat tersebut menyetujui AGUS BUDIANTO menjual sahamnya sebesar 5000 lembar kepada Ibu YENNI KURNIAWATI sehingga susunan pengurus susunan pengurus dan pemegang saham PT AYARO MULYA KONSTRUKSI menjadi sebagai berikut:

1. Susunan Pengurus :

- Direktur : YOSSE ARMANDO SUBANDI, ST
- Komisaris : YENNI KURNIAWATI

2. Susunan Pemegang Saham :

- YOSSE ARMANDO SUBANDHI sebesar 50%
- YENNI KURNIAWATI sebesar 50 %.

- Bahwa benar 04 tanggal 15 Juli 2010 dan Akte Nomor 05 tanggal 15 Juli 2010 adalah Akta Notaris yang Saksi buat, dan akte tersebut telah lengkap dan sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **I GEDE ARIANTA, S.H., S.E., MAK, BKP, CA, ACPA, Ak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AGUS BUDIANTO;
- Bahwa Ahli pernah sebagai Ahli dalam perkara pidana pajak di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2019;
- Bahwa Undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yaitu :
  - KUH Perdata
  - Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah :
  - a. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, sering disebut **UU KUP**;
  - b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, sering disebut **UU PPh**;
  - c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, sering disebut **UU PPN**;
  - d. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, sering disebut **UU PBB**;
  - e. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sering disebut **UU Bea Meterai**;
  - f. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, sering disebut **UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**.
- Bahwa Organ Perseroan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu terdiri dari RUPS, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris;

Halaman 52 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalah Direksi;
- Bahwa Sesuai Pasal 93 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dapat menjadi anggota Direksi adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
- Bahwa Sesuai Pasal 92 Direksi dapat dijabat oleh satu orang atau beberapa orang dalam bentuk Dewan Direksi;
- Bahwa Yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah Direksi karena Direksi adalah pihak yang menjalankan pengelolaan korporasi, tetapi jika perbuatan pidana tersebut mengarah kepada tindak pidana korporasi maka selain Direksi, Komisaris, dan korporasinya secara bersama-sama dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;
- Bahwa Dalam hukum pajak pengertian "Pengurus" diatur secara khusus dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UUKUP) yang menyatakan :
  - 1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
    - a. badan oleh pengurus;
    - b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
    - c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pembersihan;
    - d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
    - e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
    - f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
  - 2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-

Halaman 53 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

- 3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 4) **Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.**

Penjelasan pengertian “Pengurus” tersebut tertuang dalam SE Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 Tanggal 31 Januari 2014. Dalam SE tersebut dijelaskan :

Para pihak yang dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak tanpa perlu adanya surat kuasa khusus karena bertindak sebagai wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Pengurus untuk Wajib Pajak Badan:

Pengurus merupakan orang yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan badan untuk kepentingan badan dan sesuai maksud dan tujuan badan, serta dapat mewakili badan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dibuktikan dengan dokumen berupa akta pendirian dan/atau dokumen lain yang dipersamakan. Termasuk dalam pengertian pengurus untuk Wajib Pajak Badan adalah orang yang terbukti nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan serta orang yang diberi wewenang untuk menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, di mana kedua hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan yang berwenang yang menjelaskan keadaan demikian. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus dalam rangka melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak Badan tersebut.

**Orang yang termasuk dalam pengertian pengurus tersebut dapat menjabat sebagai komisaris, pemegang saham mayoritas atau pengendali, pemegang saham, karyawan Wajib Pajak Badan, atau pihak lain, sepanjang terbukti bahwa orang tersebut nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan.**

- Bahwa ketentuan tentang "Pengurus" sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KUP tersebut merupakan pengaturan khusus di bidang hukum pajak terhadap undang-undang yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas sehingga berlaku asas *lex specialis* derogate *lex generalis*.
- Ketika disampaikan fakta-fakta hukum berdasarkan penyidikan terhadap PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP 21.014.497.8-623.000 Masa pajak Agustus s.d. Desember 2014 dan Masa pajak Januari s.d. September 2015 sebagai berikut :

a. Berdasarkan basis data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);

PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 10 Oktober 2007

- Nama Wajib Pajak PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP 21.014.497.8-623.000
  - KLU 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran
  - Direktur YOSSE ARMANDO SUBANDHI
  - Komisaris AGUS BUDIANTO
  - Alamat Jl. Singgalang No.1 Rt.003 Rw.009, Pisang Candi Sukun Kota Malang Jawa Timur.
  - Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 07 Januari 2008.
- Bahwa Berdasarkan SPT 1771 Tahun Pajak 2014, lampiran V
    - Komisaris PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI : AGUS BUDIANTO ; NPWP: 25.857.672.7-429.000 ; Alamat : Cinambo Indah No.05, Cisaranten Wetan, Bandung.

Halaman 55 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI : DINA MARANETA ;  
NPWP: 27.253.412.4-429.000 ; Alamat : Cinambo Indah No.05,  
Cisaranten Wetan, Bandung.
- Bahwa Ditunjukkan kepada Ahli dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh AGUS BUDIANTO berikut :
  - a) SP3 nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 senilai Rp 30.127.680.000,- termasuk PPN dengan perincian (DPP Rp.27.388.800.000,- + PPN Rp.2.738.880.000,-) dari nilai tersebut hanya **terrealisasi** sebesar Rp.20.249.566.920,- termasuk PPN dengan perincian (DPP Rp.18.408.697.200,- + PPN Rp.1,840,869.720,-).
  - b) SP3 nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 senilai Rp 2.829.215.565,- termasuk PPN dengan perincian (DPP Rp.2.572.014.150,- + PPN Rp.257.201.415,-) dari nilai tersebut hanya terrealisasi sebesar Rp.727.843.997,- termasuk PPN dengan perincian (DPP Rp.661.676.361,- + PPN Rp.66.167.636,-).
  - c) Faktur Pajak Keluaran Tahun 2014 dan 2015 yang ditandatangani oleh AGUS BUDIANTO sebagaimana daftar berikut :

Tahun 2014 :

No.	Faktur Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN	Masa Pajak
	Nomor	Tanggal			
1	0100021405050595	23-05-2014	1.300.968.000	130.096.800	Juni 2014
2	0100021405050596	24-06-2014	1.300.968.000	130.096.800	Juni 2014
3	0100021405050597	25-08-2014	1.347.802.848	134.780.285	Agustus 2014
4	0100021405050598	25-09-2014	1.277.550.576	127.755.058	September 2014
5	0100021405050599	25-10-2014	1.353.006.720	135.300.672	Oktober 2014
6	0100021405050600	25-11-2014	1.691.258.400	169.125.840	Nopember 2014
7	0100021405050601	15-12-2014	1.709.471.952	170.947.195	Desember 2014
			9.981.026.496	998.102.650	

Tahun 2015 :

No.	Faktur Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN	Masa Pajak
	Nomor	Tanggal			
1	0100011510641740	25-01-2015	1.636.617.744	163.661.774	Januari 2015
2	0100011510641741	25-02-2015	1.176.075.072	117.607.507	Pebruari 2015
3	0100011510641742	27-03-2015	1.790.131.968	179.013.197	Maret 2015
4	0100011510641743	02-04-2015	824.813.712	82.481.371	April 2015
5	0100011510641744	25-04-2015	150.269.927	15.026.993	April 2015
6	0100011510641745	27-05-2015	387.688.464	38.768.846	Mei 2015
7	0100011510641746	27-05-2015	190.830.590	19.083.059	Mei 2015
8	0100011510641747	29-06-2015	588.037.536	58.803.754	Juni 2015
9	0100011510641748	30-06-2015	106.288.485	10.628.849	Juni 2015
10	0100011510641749	31-07-2015	699.920.784	69.992.078	Juli 2015
11	0100011510641750	31-08-2015	840.425.328	84.042.533	Agustus 2015
12	0110011510641751	30-09-2015	214.287.359	21.428.736	September 2015
13	0110011510641752	30-09-2015	483.960.096	48.396.010	September 2015
			9.089.347.065	908.934.707	

Halaman 56 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) SPT 1771 Tahun Pajak 2014 beserta lampiran dengan nomor Bukti Penerimaan Surat nomor : S-02032978/PPWBIDR/WPJ.31/KP.0403/2014 a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 terdapat tanda tangan a.n. AGUS BUDIANTO selaku Komisaris.
- e) Realisasi pembayaran atas penyerahan jasa konstruksi di transfer ke rekening nomor 2830694555, pada BANK CENTRAL ASIA KCP Bandung Ujung Berung a.n. AGUS BUDIANTO.
- Bahwa Kemudian Penyidik juga memperlihatkan dokumen kepada AHLI :
- a. Akte-akte Notaris PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI
  - b. Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2014 dan 2015;
  - c. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI;
  - d. BAP ERLIK ONO, Kasi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan;
  - e. BAP EKO YULIANTO, AR KPP Pratama Malang Selatan
  - f. BAP MITA ANDILA, karyawan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI;
  - g. BAP RANDOLPH LATUMAHINA, Direktur PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI;
  - h. BAP AGUS BUDIANTO, Komisaris PT AYARO MULYA KONSTRUKSI;
  - i. BAP Para supplier;
  - j. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/ 2014;
  - k. Rekening Koran Bank BCA dan Rekening Koran Bank CIMB NIAGA.
  - l. SPT Masa PPN Januari 2014 dan Maret s/d Desember 2014
  - m. SPT Masa PPN Januari s/d Juli 2015;
  - n. Faktur Pajak Keluaran, Invoice, Kwitansi dan dokumen kelengkapannya.
  - o. Faktur Pajak Masukan, Surat Jalan dan dokumen kelengkapannya.
  - p. Print Out NTPN Setoran PPN ahun 2014 dan 2015.
- Ahli menerangkan bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan oleh Penyidik dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan

Halaman 57 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ahli, maka AGUS BUDIANTO termasuk dalam pengertian “Pengurus” sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (4) UU KUP.

- Bahwa Walaupun AGUS BUDIANTO bukan sebagai pengurus dalam akte notaris yang berlaku pada saat terjadinya tindak pidana namun sesuai fakta-fakta hukum dan ketentuan Pasal 32 Ayat 4 UU KUP, AGUS BUDIANTO dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas terjadinya tindak pidana perpajakan dalam PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI.
- Bahwa Sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

Dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi:

“Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

- Bahwa untuk menandatangani SPT bisa dikuasakan kepada karyawan atau seseorang sepanjang karyawan atau seseorang tersebut memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada PMK 22/PMK.03/2008 j.o. 229/PMK.03/2014.
- Bahwa Syarat-syarat seorang kuasa sebagai yang dimaksud pada PMK 22/PMK.03/2008 sebagai berikut :
  1. memiliki NPWP;
  2. telah menyampaikan SPT tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir;
  3. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
  4. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak.
- Bahwa Syarat-syarat seorang kuasa sebagai yang dimaksud pada PMK 229/PMK.03/2014 sebagai berikut :
  1. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  2. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
  3. memiliki NPWP ; dan

Halaman 58 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. telah menyampaikan SPT tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir;

Persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif;

- Bahwa Apabila seseorang yang diberi kuasa oleh Wajib Pajak tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada PMK 22/PMK.03/2008 j.o. 229/PMK.03/2014 maka kuasa yang diberikan tidak syah;
- Bahwa Karena MITA ANDILA tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2008 jo Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 maka yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Bahwa Kepada Ahli ditunjukan :
  1. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa AGUS BUDIANTO kepada Penerima Kuasa MITA ANDILA;
  2. Pelaporan SPT Masa PPN yang ditandatangani oleh MITA ANDILA sebagai daftar berikut :  
Pelaporan SPT Masa PPN yang di laporkan oleh PT AYARO MULYA KONSTRUKSI masa Agustus s/d Desember tahun dan Masa Januari s/d Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Masa Agustus s/d Desember tahun 2014 :

No.	Masa	Pembetulan	Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Penandata-ngan
1	Agustus	Normal	S- <a href="#">01004271/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015	AGUS BUDIANTO
2	September	Normal	S- <a href="#">01004273/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015	AGUS BUDIANTO
3	Oktober	Normal	S- <a href="#">01004274/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015	AGUS BUDIANTO
4	Nopember	Normal	S- <a href="#">01004275/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015	AGUS BUDIANTO
5	Desember	Normal	S- <a href="#">01004276/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015	AGUS BUDIANTO

b. Masa Januari s/d September tahun 2015 :

No.	Masa	Pembetulan	Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Penandata-ngan
1	Januari	Normal	<a href="#">S-01030840/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015	MITA ANDILA
2	Pebruari	Normal	S- <a href="#">01030842/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015	MITA ANDILA
3	Maret	Normal	S- <a href="#">01030843/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015	MITA ANDILA
4	April	Normal	S- <a href="#">01030844/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015	MITA ANDILA
5	Mei	Normal	S- <a href="#">01030845/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	38,768,846	13/08/2015	MITA ANDILA
6	Juni	Normal	S- <a href="#">01030846/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	58,803,753	13/08/2015	MITA ANDILA
7	Juli	Normal	S- <a href="#">01043153/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	69,992,078	12/11/2015	MITA ANDILA



8	Agustus		Tidak Lapor			
9	September		Tidak Lapor			

Pendapat Ahli mengenai SPT Masa PPN Januari 2015 s/d Juli 2015 yang ditandatangani oleh MITA ANDILA yang telah disampaikan ke KPP Pratama Malang Selatan adalah **tidak benar secara formal** karena MITA ANDILA tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2008 jo Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014. Bukti yang diberikan oleh kantor pajak adalah berupa Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang berlaku untuk setiap penyerahan dokumen apapun bentuknya oleh wajib pajak ke kantor pajak dan bukan menjadi keabsahan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk menguji keabsahan SPT yang dilaporkan harus dinilai dari aspek formal dan materialnya. SPT Masa PPN Januari 2015 s/d Juli 2015 yang ditandatangani MITA ANDILA tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2008 jo Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014

- Bahwa Menurut pendapat Ahli MITA ANDILA tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur tindak pidana dalam pelaporan SPT tersebut karena yang bersangkutan hanya berstatus sebagai penerima kuasa sehingga tanggungjawab tetap berada di pihak pemberi kuasa.

2. **ARIEF SULTONY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mempunyai pengalaman sebagai ahli dalam beberapa perkara tindak pidana di bidang perpajakan sebagai berikut:
  - a. Ahli Hukum Pajak dalam Perkara Praperadilan Nomor 117/PID.PRAP/2018/ PN.JKT.SEL.
  - b. Ahli Hukum Pajak dalam Perkara Praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN.DPS.
  - c. Ahli Hukum Pajak dalam Perkara Praperadilan Nomor 170/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.
  - d. Ahli Hukum Pajak dalam Perkara Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PNSMN;

Halaman 60 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, ada
  - a. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, sering disebut **UU KUP**;
  - b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, sering disebut **UU PPh**;
  - c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, sering disebut **UU PPN**;
  - d. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, sering disebut **UU PBB**;
  - e. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sering disebut **UU Bea Materai**;
  - f. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, sering disebut **UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**
- Bahwa Untuk kejadian atau fakta yang terjadi dalam Masa pajak Agustus s.d. Desember 2014 dan Masa pajak Januari s.d. September 2015 maka UU KUP yang berlaku adalah UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2009.
- Bahwa Untuk kejadian atau fakta yang terjadi dalam Masa pajak Agustus s.d. Desember 2014 dan Masa pajak Januari s.d. September 2015 maka UU PPN yang berlaku adalah UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No 42 Tahun 2009.
- Bahwa Kewajiban Perusahaan (WP Badan) berkaitan dengan PPh:
  - 1. Wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 61 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP);
2. Menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 ayat (1) UU KUP);
  3. Menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia;
  4. membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 12 ayat (1) UU KUP);
  5. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, (Selanjutnya disebut UU PPh);
  6. Mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 3 ayat (1) dan 4 ayat (1) UU KUP);
- Bahwa Kewajiban Perusahaan (Badan) berkaitan dengan PPN:
1. wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 3A ayat (1) UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN);
  2. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN);
  3. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
    - a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
    - b. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
    - c. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

Halaman 62 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; ekspor Jasa Kena Pajak;
- e. penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

(Pasal 13 ayat (1) UU PPN)

Mengenai kewajiban pembukuan, pembayaran, pengisian dan penyampaian SPT sama dengan kewajiban dalam pelaksanaan PPh.

- Bahwa Sesuai pasal 1 angka 6 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai **sarana dalam administrasi** perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sistem *Self Assessment* merupakan sistem perpajakan yang berdasarkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KUP, kewajiban mendaftarkan untuk memperoleh NPWP jatuh pada saat Subjek Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kapan terpenuhinya kewajiban subjektif dan objektif yang paling tahu adalah Subjek Pajak itu sendiri. Ketika terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka berdasarkan **sistem Self Assesment** Subyek Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Self registration).

- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem *Self Assessment* merupakan sistem perpajakan yang berdasarkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.





Mengenai kaitannya SPT dengan sistem self assessment adalah bahwa Wajib Pajak secara suka rela (*voluntary compliance*) tanpa campur tangan pihak fiskus, mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 12 ayat (2) UU KUP)

Sebagai wujud **pertanggungjawaban** bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kepatuhan sukarela dalam melaporkan kebenaran isi SPT (formal dan materil) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, maka setiap SPT dilengkapi dengan Pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak yaitu; *"Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Ahli menyatakan bahwa apa yang telah Ahli beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas"*.

- Bahwa Sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP **Fungsi SPT** Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak adalah sebagai **sarana** untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan /atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- harta dan kewajiban; dan/atau
- pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau badan. Ketentuan materiel PPN di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009. Selain PPN dalam UU tersebut diatur juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM). PPn BM merupakan pungutan tambahan disamping PPN untuk barang kena pajak yang tergolong mewah. Mekanisme pengenaan PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi (*Multi stage tax*) namun tidak akumulatif. Sedangkan PPn BM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat BKP yang tergolong mewah tersebut diimpor atau pada saat diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Pada tingkat distribusi selanjutnya PPnBM tidak lagi dikenakan. Obyek PPN adalah **PENYERAHAN** Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) **di dalam Daerah Pabean**, Impor BKP oleh siapa saja, Ekspor BKP oleh PKP, serta pemanfaatan BKP tak berwujud dan atau Jasa yang berasal dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Menurut Undang-undang seluruh barang diperlakukan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan seluruh jasa diperlakukan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas penyerahannya dikenakan PPN kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (pada pasal 4A UU PPN). Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (**DPP**) yaitu Harga Jual BKP atau Penggantian JKP tersebut, kecuali untuk ekspor dimana tarif PPN untuk penyerahan ekspor BKP adalah 0 % (nol persen). Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan pemungutan PPN dengan membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak yang menerima. Penerima wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP.
- Bahwa Sesuai Pasal 4 UU PPN, yang menjadi objek PPN adalah:

Halaman 65 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa Selain objek PPN yang diatur dalam Pasa 4, terdapat objek PPN lainnya yaitu:
  - a. atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain; (Pasal 16C UU PPN);
  - b. penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 16D UU PPN) .
- Bahwa Tidak semua penyerahan barang atau jasa wajib dibuat Faktur Pajak. Ada 3 hal yang tidak wajib dibuat faktur pajak:
  - 1. Penyerahan barang dan/atau jasa yang bukan barang atau jasa kena pajak sebagaimana disebut dalam Pasal 4A UU PPN. Walaupun yang menyerahkan adalah Pengusaha Kena Pajak, tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak.
  - 2. Penyerahan oleh Pengusaha Kecil, sekalipun Barang dan/atau jasa yang diserahkan adalah Barang atau Jasa Kena Pajak. Batasan Pengusaha Kecil ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (Pasal 3A ayat (1);  
Yang dimaksud Pengusaha kecil menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 adalah pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau

Halaman 66 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto mencapai Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), pengusaha tersebut wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai **Pengusaha Kena Pajak (PKP)**.

3. Penyerahan BKP dalam rangka pemakaian sendiri untuk tujuan produktif.

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, Faktur Pajak adalah sah, jika memenuhi persyaratan **formal dan material**. Faktur Pajak memenuhi persyaratan **formal** apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana di maksud pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Faktur Pajak benar secara **materiil** apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PPN-nya, **apabila** keterangan yang tercantum di dalam Faktur Pajak atau dokumennya tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak **tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya** mengenai penyerahan BPK dan/atau penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, Ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material. (Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN).
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER - 24/PJ/2012 stdd PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :

a. Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

b. Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.

Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih 2 (dua) rangkap, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

Namun sejak diberlakukannya penggunaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) yang dimulai sejak tanggal 1 Juli 2015 untuk PKP yang dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP di Pulau Jawa dan Bali. e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy).

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 23 UU PPN, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Sehingga bagi Penjual, Faktur Pajak merupakan dokumen/bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN yang terutang dari pembeli dan oleh karenanya dapat melaporkannya pada SPT Masa PPN.

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, Bagi Pembeli, Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak yang diterima dari penjual merupakan dokumen/bukti bahwa ia telah membayar PPN yang merupakan beban bagi dirinya sebagai konsumen.

- Bahwa Berdasarkan PER - 24/PJ/2012 stdd PER-17/PJ/2014, yang berhak menandatangani Faktur Pajak adalah PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk PKP dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan contoh tandatangannya, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai penandatanganan Faktur Pajak yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang pejabat/pegawai untuk menandatangani Faktur Pajak.

Apabila terjadi perubahan pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak, maka PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara

Halaman 68 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak

- Bahwa Menurut Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan No.534/KMK.04/2000, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan);

Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan:

1. Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas.
  2. Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak.
  3. Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayar selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP.
  4. Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi.-
- Bahwa Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak.
  - Bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas:
    - a. Perolehan Barang kena Pajak;
    - b. Penerimaan Jasa Kena Pajak;
    - c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean;
    - d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean;
    - e. Impor Barang Kena Pajak.
  - Bahwa Sesuai dengan Pasal 8A UU PPN dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 69 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Sesuai dengan Pasal 9 UU PPN dijelaskan beberapa hal:

- Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
  - Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.
- Bahwa Contoh konkret perhitungan secara sederhana PPN adalah sebagai berikut:  
PT AA adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan usaha distributor Semen dari PT BB, pada tanggal 10 Januari tahun 2012 membeli semen dari PT BB dengan nilai ( dasar pengenaan pajak / DPP ) Rp. 100.000.000,00 dan dipungut PPN sebesar 10% / Rp. 10.000.000,00. Dengan demikian PT AA membayar kepada PT BB sebesar Rp. 110.000.000,00. PT BB menerbitkan faktur pajak kepada PT AA Pada tanggal 20 Januari 2012 PT AA menjual seluruh semen dari PT BB kepada PT CC dengan nilai Rp. 120.000.000,00 dan memungut PPN 10%, sehingga PT CC membayar kepada PT AA sebesar Rp. 132.000.000,00.

PT AA melaporkan perhitungan PPN dalam SPT masa PPN bulan Januari 2012 adalah :

- Pajak keluaran Rp. 12.000.000,00.-
- Pajak masukan Rp. 10.000.000,00.-
- Kurang dibayar Rp. 2.000.000,00.-

PT AA selanjutnya melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,00 ke kantor pos atau Bank Persepsi dan melaporkan ke KPP tempat terdaftar.

- Bahwa Sesuai Pasal 4 ayat (2) KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, **Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.**

Kemudian Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan

Halaman 70 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan perpajakan untuk Wajib badan diwakili oleh pengurus. Dalam Pasal 32 ayat (2) Wakil disini bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.-

**Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.**

- Bahwa Dalam hal Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan siapa yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan SPT Masa PPN yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak adalah pengurus;
- Bahwa Sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".  
Dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi:  
"Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang



turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

- Bahwa Pendapat Ahli mengenai pidana pajak yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang UU KUP sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (1)

*Setiap orang yang dengan sengaja:*

- Huruf c yang berbunyi : *tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;*
- huruf d yang berbunyi : *menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;*
- huruf i yang berbunyi : *tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.*

*sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;*

Berdasarkan konstruksi pasal tersebut di atas, unsur-unsur yang melekat adalah sebagai berikut:

- Pertama, unsur setiap orang :** Setiap orang adalah siapapun orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya.
- Kedua, unsur dengan sengaja :** Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. KUP tidak menerangkan mengenai pengertian tentang kesengajaan. Pengertian sengaja dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan



diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya.

c. **Ketiga, perbuatan** tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Perbuatan yang dimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT masa atau tahunan yang ternyata tidak dilakukan oleh Wajib Pajak .

d. **Keempat, perbuatan** menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Perbuatan yang dimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT masa atau tahunan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak akan tetapi isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya .

e. **Kelima, perbuatan** tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat sistem *withholding tax*, yaitu: Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk memotong atau memungut pajak pihak lain dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya serta menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui Bank yang ditunjuk.

Dalam UU PPh pemotongan dan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26.

Sebagai contoh: Wajib Pajak membayar gaji atas pegawainya, apabila gaji pegawai tersebut melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka Wajib Pajak pemberi kerja harus memotong PPh atas gaji karyawan tersebut. PPh yang dipotong tersebut harus disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam mekanisme pemungutan PPN, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak kepada penerima barang kena pajak atau jasa





kena pajak (Pembeli). Sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak adalah **Faktur Pajak**. Dalam Faktur pajak yang diterbitkan oleh penjual tertera nilai harga penjualan dan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual. PPN sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut bukanlah hak dari penjual melainkan pajak yang dibayar oleh pembeli atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak melalui mekanisme pemungutan oleh penjual.

Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 9 ayat (3) UU PPN, PPN yang dipungut oleh penjual harus disetor ke kas negara setelah diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang telah dibayar oleh penjual pada masa pajak yang sama.

Perbuatan tidak menyetor PPh atau PPN yang dipotong dan/atau dipungut dari pihak lain merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.

- f. **Keenam, Unsur akibat** sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa kata “dapat” sebelum frasa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara menunjukkan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana diperpajakan cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan bukan dengan timbulnya akibat. Kata “dapat” dalam frasa “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”, mengandung makna bahwa tidak perlu ada kerugian secara nyata (*actual loss*) tetapi cukup adanya potensi kerugian (*potential loss*) sudah dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Namun demikian ahli berpendapat dalam pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP, unsur akibat berupa kerugian pada pendapatan negara harus telah nyata terjadi (*actual loss*).

Alasan kerugian pada pendapatan harus dimaknai sebagai konsepsi *actual loss* adalah sebagai berikut:

1. Utang pajak timbul karena bunyi undang-undang tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (pejabat pajak) asalkan terpenuhinya syarat terdapat suatu *Tatbestand* yang dapat terdiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keadaan, peristiwa ataupun perbuatan tertentu yang disyaratkan dalam undang-undang maka timbulah utang pajak (*actual*). Dengan demikian utang pajak tidak mungkin timbul karena peristiwa-peristiwa yang belum terjadi (*potential*). Ketika timbul utang pajak barulah timbul kewajiban untuk membayar pajak (lihat Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP).

2. Ancaman pidana dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP menganut stelsel kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana denda yang diterapkan dalam ketentuan ini dihitung dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sebagaimana dijelaskan dalam point 1. bahwa pajak terutang sesuai fakta yang ditentukan oleh undang-undang bukan suatu potensi akan terjadi, maka bagaimana mungkin menetapkan pidana denda yang dihitung dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar apabila utang pajak dan kewajiban perpajakannya belum timbul.
- Bahwa Ketika kepada ahli disampaikan fakta-fakta hukum berdasarkan penyidikan terhadap PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP 21.014.497.8-623.000 Masa pajak Agustus s.d. Desember 2014 dan Masa pajak Januari s.d. September 2015 sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan basis data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)  
PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 10 Oktober 2007
    - Nama Wajib Pajak PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI;
    - NPWP 21.014.497.8-623.000;
    - KLU 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran;
    - Direktur YOSSE ARMANDO SUBANDHI;
    - Komisaris AGUS BUDIANTO;
    - Alamat Jl. Singgalang No.1 Rt.003 Rw.009, Pisang Candi Sukun Kota Malang Jawa Timur.
    - Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 07 Januari 2008.
  - b. Berdasarkan SPT 1771 Tahun Pajak 2014, lampiran V

Halaman 75 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI : AGUS BUDIANTO ; NPWP: 25.857.672.7-429.000 ; Alamat : Cinambo Indah No.05, Cisaranten Wetan, Bandung;
- Direktur PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI : DINA MARANETA ; NPWP: 27.253.412.4-429.000 ; Alamat : Cinambo Indah No.05, Cisaranten Wetan, Bandung.

c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan :

- 1) PT AYARO MULYA KONSTRUKSI adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dan leveransir. Pada tahun pajak 2014 dan 2015 PT AYARO MULYA KONSTRUKSI mendapatkan kontrak pembangunan rumah tinggal dari PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI (Grup Lippo) dengan nilai kontrak sekitar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) berupa pembangunan rumah mewah di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun dari nilai kontrak proyek konstruksi tersebut hanya dapat direalisasikan sebagian karena terjadi pemutusan kontrak.
- 2) PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 selaku pemberi proyek berdasarkan data pada aplikasi aportal DJP melaporkan faktur pajak masukan atas pembayaran jasa konstruksi dari PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 namun faktur tersebut belum seluruhnya dilaporkan oleh PT AYARO MULYA KONSTRUKSI dalam SPT PPN Masa Januari 2014 s.d. Desember 2015 serta tidak melaporkan seluruh nilai proyek dalam SPT PPh Badan tahun pajak 2014 dan 2015.
- 3) PT AYARO MUYA KONSTRUKSI hanya dapat merealisasikan sebagian dari nilai kontrak yang telah ditandatangani tersebut dengan perincian sebagai berikut :
  - a) SP3 nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 hanya dapat direalisasikan senilai Rp 18.408.697.200,- terbagi dalam 16 faktur pajak dengan perincian sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak					
	Nomor	Tanggal	DPP	PPN	Masa Pajak	Keterangan
1	0100021405980595	1-Jun-14	1.300.968.000	130.096.800	Jun-14	Dilaporkan
2	0100021405050596	24-Jun-14	1.300.968.000	130.096.800	Jun-14	Dilaporkan
3	0100021405050597	25-Aug-14	1.347.802.848	134.780.285	Agust-14	tdk dilaporkan

Halaman 76 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	0100021405050598	25-Sep-14	1.277.550.576	127.755.058	Sep-14	tdk dilaporkan
5	0100021405050599	25-Oct-14	1.353.006.720	135.300.672	Okt-14	tdk dilaporkan
6	0100021405050600	25-Nov-14	1.691.258.400	169.125.840	Nop-14	tdk dilaporkan
7	0100021405050601	15-Dec-14	1.709.471.952	170.947.195	Des-14	tdk dilaporkan
8	0100011510641740	25-Jan-15	1.636.617.744	163.661.774	Jan-15	tdk dilaporkan
9	0100011510641741	25-Feb-15	1.176.075.072	117.607.507	Feb-15	tdk dilaporkan
10	0100011510641742	27-Mar-15	1.790.131.968	179.013.197	Mar-15	tdk dilaporkan
11	0100011510641744	25-Apr-15	824.813.712	82.481.371	Apr-15	tdk dilaporkan
12	0100011510641745	27-May-15	387.688.464	38.768.846	Mei-15	Dilaporkan
13	0100011510641747	29-Jun-15	588.037.536	58.803.754	Jun-15	Dilaporkan
14	0100011510641749	31-Jul-15	699.920.784	69.992.078	Jul-15	Dilaporkan
15	0100011510641750	31-Aug-15	840.425.328	84.042.533	Agust-15	tdk dilaporkan
16	0110011510641752	30-Sep-15	483.960.096	48.396.010	Sep-15	tdk dilaporkan
Jumlah			18.408.697.200	1.840.869.720		

b) SP3 nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 hanya dapat direalisasikan senilai Rp 661.676.361,- terbagi dalam 4 faktur pajak dengan perincian sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak					
	Nomor	Tanggal	DPP	PPN	Masa Pajak	Keterangan
1	100011510641743	2-Apr-15	150.269.927	15.026.993	Apr-15	tdk dilaporkan
2	100011510641746	27-May-15	190.830.590	19.083.059	Mei-15	tdk dilaporkan
3	100011510641748	30-Jun-15	106.288.485	10.628.849	Jun-15	tdk dilaporkan
4	110011510641751	30-Sep-15	214.287.359	21.428.736	Sep-15	tdk dilaporkan
Jumlah			661.676.361	66.336.261		

4) Terdakwa seharusnya melakukan kewajiban pelaporan dan penyetoran PPN untuk masa masa Januari s.d. Desember 2014 dan 2015 sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun Terdakwa hanya melaporkan sebagian kecil penyerahan jasa konstruksi dengan perincian sebagai berikut:

a) Pelaporan SPT PPN Masa Januari s.d. Desember 2014 :

No.	Masa Pajak	DPP Penyerahan BKP/JKP	Pajak Keluaran	Kredit Pajak	PPN KB	Tgl Lapor	Tgl Bayar
1.	Januari	-	-	-	-	21/05/2014	-
2.	Februari					Tdk Lapor	
3.	Maret	-	-	-	-	21/05/2014	-
4.	April	-	-	-	-	21/05/2014	-
5.	Mei	1.300.968.000	130.096.800	-	130.096.800	27/06/2014	27/06/2014
6.	Juni	1.300.968.000	130.096.800	-	130.096.800	21/08/2014	21/08/2014
7.	Juli	-	-	-	-	21/08/2014	-
8.	Agustus	-	-	-	-	04/02/2015	-
9.	September	-	-	-	-	04/02/2015	-
10.	Oktober	-	-	-	-	04/02/2015	-
11.	November	-	-	-	-	04/02/2015	-
12.	Desember	-	-	-	-	04/02/2015	-
Jumlah		2.601.936.000	260.193.600	-	260.193.600		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b) Pelaporan SPT PPN Masa Januari s.d. Desember 2015

No.	Masa Pajak	DPP Penyerahan BKP/JKP	Pajak Keluaran	Kredit Pajak	PPN KB	Tgl Laport	Tgl Bayar
1.	Januari	-	-	-	-	13/08/2015	-
2.	Februari	-	-	-	-	13/08/2015	-
3.	Maret	-	-	-	-	13/08/2015	-
4.	April	-	-	-	-	13/08/2015	-
5.	Mei	387.688.464	38.768.846	-	38.768.846	13/08/2015	12/08/2015
6.	Juni	588.037.536	58.803.753	-	58.803.753	13/08/2015	12/08/2015
7.	Juli	699.920.784	69.992.078	-	69.992.078	12/11/2015	19/10/2015
8.	Agustus					Tdk Laport	
9.	September					Tdk Laport	
10.	Oktober					Tdk Laport	
11.	November					Tdk Laport	
12.	Desember					Tdk Laport	
Jumlah		1.675.646.784	167.564.677	-	167.564.677		

## 5) Berdasarkan Faktur Pajak Keluaran Tahun 2014 dan 2015

### a) Faktur Pajak Keluaran Tahun 2014

No.	Nomor Faktur Pajak	Tgl Faktur Pajak	DPP	PPN	Masa Pajak
1	0100021405980595	01/06/2014	1.300.968.000	130.096.800	Jun-14
2	0100021405050596	24/06/2014	1.300.968.000	130.096.800	Jun-14
3	0100021405050597	25/08/2014	1.347.802.848	134.780.285	Agust-14
4	0100021405050598	25/09/2014	1.277.550.576	127.755.058	Sep-14
5	0100021405050599	25/10/2014	1.353.006.720	135.300.672	Okt-14
6	0100021405050600	25/11/2014	1.691.258.400	169.125.840	Nop-14
7	0100021405050601	15/12/2014	1.709.471.952	170.947.195	Des-14
Jumlah			9.981.026.496	998.102.650	

### b) Faktur Pajak Keluaran Tahun 2015

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl Faktur Pajak	DPP	PPN	Masa Pajak
1	100011510641740	25/01/2015	1.636.617.744	163.661.774	Jan-15
2	100011510641741	25/02/2015	1.176.075.072	117.607.507	Feb-15
3	100011510641742	27/03/2015	1.790.131.968	179.013.197	Mar-15
4	100011510641743	02/04/2015	150.269.927	15.026.993	Apr-15
5	100011510641744	25/04/2015	824.813.712	82.481.371	Apr-15
6	100011510641745	27/05/2015	387.688.464	38.768.846	Mei-15
7	100011510641746	27/05/2015	190.830.590	19.083.059	Mei-15
8	100011510641747	29/06/2015	588.037.536	58.803.754	Jun-15
9	100011510641748	30/06/2015	106.288.485	10.628.848	Jun-15
10	100011510641749	31/07/2015	699.920.784	69.992.078	Jul-15
11	100011510641750	31/08/2015	840.425.328	84.042.533	Agust-15
12	110011510641751	30/09/2015	214.287.359	21.428.735	Sep-15
13	110011510641752	30/09/2015	483.960.096	48.396.009	Sep-15
Jumlah			9.089.347.065	908.934.704	

## 6) Berdasarkan Faktur Pajak Masukan Tahun 2014 dan 2015

### a) Faktur Pajak Masukan Tahun 2014

No.	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100011489058744	07-05-2014	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	14.384.380
2	0100011489058750	09-05-2014	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	13.973.002
3	0100001417995112	07-05-2014	01.440.236.6-641.000	VARIA USAHA BETON	227.272
4	0100001417995110	07-05-2014	01.440.236.6-641.000	VARIA USAHA BETON	4.704.000
5	0100011489058884	30-06-2014	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	2.494.410
6	0100021409996552	03-07-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	1.654.545
7	0100021409996586	17-07-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	3.054.545
8	0100021409996596	23-07-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	2.990.909
9	0100021409996620	19-08-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	1.272.727
10	0100021475046052	26-08-2014	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	11.708.303
11	0100021475046005	11-08-2014	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	13.984.651
12	0100021487053628	13-09-2014	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.454.545





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	0100021409996716	29-09-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	5.472.727
14	0100021409996717	29-09-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	6.809.091
15	0100021409996701	19-09-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	1.781.818
16	0100021409996724	29-09-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	4.900.000
17	0100031425788219	30-09-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	1.336.364
18	0100021409996656	02-09-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	2.227.273
19	0100021409996674	09-09-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	3.563.636
20	0100021409996678	10-09-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	2.100.000
21	0100021475046083	06-09-2014	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	12.422.651
22	0100031433163634	30-10-2014	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	545.455
23	0100021487054198	17-10-2014	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.454.545
24	0100021475046207	09-10-2014	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	10.485.000
25	0100031425788275	27-10-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	6.618.182
26	0100031425788244	16-10-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	1.400.000
27	0100031425788245	16-10-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	6.363.636
28	0100031434447247	27-11-2014	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	16.078.059
29	0100031434447162	01-11-2014	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	8.682.300
30	0100031434447208	15-11-2014	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	12.711.050
31	0100031433163866	29-11-2014	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.090.909
32	0100031433163758	15-11-2014	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.090.909
33	0100031433163650	01-11-2014	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	909.091
34	0100031433163859	28-11-2014	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	363.636
35	0100031433163744	13-11-2014	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	363.636
36	0100031425788318	20-11-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	4.327.273
37	0100031425788344	28-11-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	4.009.091
38	0100031425788356	28-11-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	3.309.091
39	0100031425788332	25-11-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	3.818.182
40	0100031479659173	25-11-2014	01.000.120.4-052.000	MONIER	5.708.727
41	0100031479659415	29-11-2014	01.000.120.4-052.000	MONIER	3.777.272
42	0100031479659418	29-11-2014	01.000.120.4-052.000	MONIER	11.499.363
43	0100031479659416	29-11-2014	01.000.120.4-052.000	MONIER	3.777.272
44	0100031477242912	22-12-2014	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	784.982
45	0100031477242747	20-12-2014	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	432.364
46	0100031479660522	31-12-2014	01.000.120.4-052.000	MONIER	3.536.180
47	0100031479660519	31-12-2014	01.000.120.4-052.000	MONIER	3.602.182
48	0100031479660640	31-12-2014	01.000.120.4-052.000	MONIER	3.777.274
49	0100031479660641	31-12-2014	01.000.120.4-052.000	MONIER	4.173.543
50	0100031433163948	10-12-2014	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.454.545
51	0100031433164032	20-12-2014	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	909.091
52	0100031433164003	17-12-2014	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	727.273
53	0100031468188130	11-12-2014	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	15.230.164
54	0100031468188129	11-12-2014	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	3.691.391
55	0100031468188438	23-12-2014	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	11.316.000
56	0100031468188437	23-12-2014	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	3.737.964
57	0100031468188585	31-12-2014	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	2.247.964
58	0100031455136145	26-12-2014	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	68.208

Halaman 79 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	0100031455136142	26-12-2014	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	565.15 2
60	0100031455136143	26-12-2014	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	14.819.46 4
61	0100031455136144	26-12-2014	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	2.479.26 8
62	0100031455136146	26-12-2014	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	227.36 0
63	0100031496644861	29-12-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	5.918.18 2
64	0100031496644860	29-12-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	890.90 9
65	0100031496644885	30-12-2014	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	1.272.72 7
Jumlah PM yang seharusnya dilaporkan tahun pajak 2014					302.761.71 5

## b) Faktur Pajak Masukan Tahun 2015

No.	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100001568998087	17-01-2015	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	4.133. 080
2	0100001568998093	17-01-2015	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	516. 142
3	0100001568998092	17-01-2015	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	504. 252
4	0100001568998091	17-01-2015	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	7.424. 000
5	0100001568998090	17-01-2015	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	2.806. 736
6	0100001568998089	17-01-2015	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	363. 776
7	0100001568998088	17-01-2015	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	1.015. 928
8	0100001554854868	29-01-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	436. 364
9	0100001554853976	26-01-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	654. 545
10	0100001554853975	26-01-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	182. 045
11	0100001554854563	28-01-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	436. 364
12	0100001554854857	29-01-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	60. 682
13	0100001551855400	12-01-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	2.227. 273
14	0100011502265402	23-01-2015	03.079.553.8-805.000	BERKAT JAYATRINDO	668. 181
15	0100011502265411	23-01-2015	03.079.553.8-805.000	BERKAT JAYATRINDO	668. 181
16	0100001582226070	30-01-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	2.545. 455
17	0100001582225937	12-01-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	2.909. 091
18	0100001582225955	13-01-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	727. 273
19	0100001597740055	24-01-2015	01.000.120.4-052.000	MONIER	477. 272
20	0100001597740260	24-01-2015	01.000.120.4-052.000	MONIER	4.840. 909
21	0100011504564707	31-01-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	13.910. 618
22	0100011504564708	31-01-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14.382. 545
23	0100011504564253	21-01-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	141. 818
24	0100011504564582	26-01-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14.382. 545
25	0100011504564279	21-01-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	13.768. 991
26	0100011504564583	26-01-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14.382. 545
27	0100001554855566	02-02-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	364. 091
28	0100001592628504	12-02-2015	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	11.407. 800
29	0100011504564724	02-02-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14.382. 545
30	0100011504564787	05-02-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	7.117. 127
31	0100011504564791	05-02-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	9.145. 800
32	0100011504564790	05-02-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	8.781. 818



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	0100001569019118	16-02-2015	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	14.863.254
34	0100001569019119	16-02-2015	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	5.160.492
35	0100001551855462	05-02-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	3.945.455
36	0100001551855515	26-02-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	3.118.182
37	0100001582226503	07-02-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.454.545
38	0100001582226531	14-02-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.454.545
39	0100001579084953	13-02-2015	03.205.648.3-805.000	MANDIRI PERKASA UTAMA	5.440.909
40	0100001554856533	05-02-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	130.909
41	0100001554860856	23-02-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	86.473
42	0100001554860823	23-02-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	43.636
43	0100001569028491	03-03-2015	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	9.870.672
44	0100001554863593	06-03-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	815.455
45	0100001554865020	12-03-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	872.727
46	0100001592628595	23-03-2015	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	13.512.200
47	0100011504565505	18-03-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	8.333.182
48	0100011504565716	30-03-2015	02.469.992.8-804.000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	1.714.608
49	0100001551855577	27-03-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	3.881.818
50	0100001551855552	18-03-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	5.090.909
51	0100001582226627	07-03-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.090.909
52	0100001582226753	30-03-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	2.363.636
53	0100001582226706	20-03-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	727.273
54	0100001582226712	23-03-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	727.273
55	0100001592628626	07-04-2015	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	13.512.200
56	0100001592628658	20-04-2015	01.126.282.1-812.000	BARAWAJA	13.512.200
57	0100001582226820	10-04-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	545.455
58	0100001582226832	13-04-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	909.091
59	0100001582226890	25-04-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	727.273
60	0100001551855643	28-04-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	9.609.091
61	0100001551855655	30-04-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	1.781.818
62	0100001551855608	07-04-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	3.181.818
63	0100001551855613	09-04-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	3.118.182
64	0100011548566424	17-04-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	113.455
65	0100011548566163	16-04-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	170.182
66	0100011548565173	11-04-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	736.364
67	0100011548564937	10-04-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	1.003.636
68	0100011548565209	13-04-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	1.138.909
69	0100001582548975	08-04-2015	01.318.664.8-801.001	ABETAMA SEMPURNA	2.262.000
70	0100021527831598	29-05-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	4.009.091
71	0100021527831555	22-05-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	3.818.182
72	0100021527831538	19-05-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	4.390.909
73	0100011559709702	15-05-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.490.909
74	0100011559709764	30-05-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.090.909
75	0100011559709717	19-05-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	909.091
76	0100011559709739	23-05-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	727.273
77	0100011568401755	23-05-2015	01.318.664.8-801.001	ABETAMA SEMPURNA	260.000
78	0100011559709825	15-06-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.272.727

Halaman 81 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	0100011559709889	30-06-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	545.455
80	0100011559709804	10-06-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.272.727
81	0100011559709779	04-06-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	545.455
82	0100011559709880	27-06-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.818.182
83	0100021527831666	29-06-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	5.679.545
84	0100011548575431	01-06-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	931.455
85	0100011548578082	12-06-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	968.182
86	0100011559710063	23-07-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.090.909
87	0100011559710006	04-07-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	545.455
88	0100021527831699	27-07-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	2.405.455
89	0100011554497458	07-08-2015	01.305.911.8-038.000	SURYA PERTIWI	7.070.490
90	0100031530788408	21-08-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	1.936.364
91	0100031530787208	15-08-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	1.930.909
92	0100031530786587	13-08-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	64.091
93	0100031530789104	25-08-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	85.455
94	0100031530790390	29-08-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	1.540.909
95	0100031530788825	24-08-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	427.273
96	0100031530788058	20-08-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	1.609.091
97	0100031563258510	31-08-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	1.670.455
98	0100021527831769	18-08-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	2.940.000
99	0100011594353653	11-08-2015	01.696.478.5-047.000	DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO	3.773.952
100	0100031525583369	12-08-2015	01.411.456.5-812.000	BOSOWA MINING	117.818
101	0100011559710280	27-08-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.454.545
102	0100011559710236	13-08-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.272.727
103	0100011559710212	06-08-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	2.545.455
104	0100031558220135	22-09-2015	03.205.648.3-805.000	MANDIRI PERKASA UTAMA	964.727
105	0100031563258534	09-09-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	1.470.000
106	0100031563258597	28-09-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	467.727
107	0100031530792241	07-09-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	580.909
108	0100031530791214	02-09-2015	01.440.166.5-641.000	KEPUH KENCANA ARUM	322.727
109	0100031579144306	29-09-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.288.636
110	0100031579144225	20-09-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	552.272
111	0100031579144200	15-09-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	3.681.818
112	0100031579144388	05-10-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	368.181
113	0100031579144566	28-10-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.104.545
114	0100031563258695	30-10-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	1.403.182
115	0100031563258742	13-11-2015	01.735.629.6-812.000	BUMI SARANA BETON	2.138.182
116	0100031579144650	03-11-2015	01.204.598.5-812.000	CATUR KENCANA SAKTI	1.656.818
Jumlah PM yang seharusnya dilaporkan tahun pajak 2015					370.997.697

## 7) Berdasarkan Setoran PPN Tahun 2014 dan 2015

### a) Setoran PPN Tahun 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NTPN	Nilai	Jenis Pajak	Tgl Bayar
1	1412140101120910	130.096.800	PPN	27-Jun-14
2	1302030605130314	130.096.800	PPN	21-Aug-14
Jumlah		260.193.600		

## b) Setoran PPN Tahun 2015

No	NTPN	Nilai	Jenis Pajak	Tgl Bayar
1	1508061012060309	38.768.846	PPN	12-Aug-15
2	1113051513090309	58.803.754	PPN	12-Aug-15
3	1502081408121003	69.992.078	PPN	19-Oct-15
Jumlah		167.564.678		

- Bahwa Berdasarkan permintaan keterangan para calon saksi diketahui hal-hal sebagai berikut :

a) AGUS BUDIANTO selaku komisaris memiliki peran aktif dalam mengendalikan seluruh kegiatan usaha dan menandatangani dokumen-dokumen formal sebagai wakil dari PT AYARO MUYA KONSTRUKSI. AGUS BUDIANTO selaku komisaris dari PT AYARO MUYA KONSTRUKSI menandatangani dua Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dengan pihak PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI yaitu :

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 29 (dua puluh sembilan) unit Pembangunan Perumahan Double Decker Phase 1, Waterfront City Pavillion Residen, Makassar dengan nilai proyek sebesar Rp.27.388.800.000 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp 2.738.880.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 2 (dua) unit Pembangunan Perumahan Double Decker Spesial Type Fase 1, Proyek Waterfront City Pavillion Residen, Makassar dengan nilai proyek sebesar Rp 2.572.014.150 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu seratus lima puluh rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp 257.201.415,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu empat ratus lima belas rupiah).

b) SPT (Normal) 1771 Tahun Pajak 2014 beserta lampiran dengan nomor Bukti Penerimaan Surat nomor : S-

Halaman 83 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02032978/PPWBIDR/WPJ.31/KP.0403/2014 a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 terdapat tanda tangan a.n. AGUS BUDIANTO selaku Komisaris.

- c) SPT 1771 (PPh Badan) a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 Tahun Pajak 2014 dan lampirannya ditandatangani dan diberikan cap oleh AGUS BUDIANTO. MITA ANDILA, karyawan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI hanya membantu mengisi kolom Identitas halaman induk dan lampiran SPT 1771 sedangkan kolom yang lainnya diisi sendiri oleh AGUS BUDIANTO".
- d) Realisasi pembayaran atas penyerahan jasa konstruksi di transfer ke rekening nomor 2830694555, pada BANK CENTRAL ASIA KCP Bandung Ujung Berung a.n. AGUS BUDIANTO.
- e) Pembuatan Laporan Keuangan, pembukuan, pengisian dan pembuatan Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan (SPT) dilakukan oleh AGUS BUDIANTO sendiri".
- Bahwa Kemudian Penyidik memperlihatkan dokumen kepada AHLI :
  - a. Akte-akte Notaris PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI
  - b. Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2014 dan 2015; -
  - c. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI ;
  - d. BAP ERLIK ONO, Kasi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan;
  - e. BAP EKO YULIANTO, AR KPP Pratama Malang Selatan;
  - f. BAP MITA ANDILA, karyawan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI;
  - g. BAP YOSSE ARMANDO SUBANDI, Direktur PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI
  - h. BAP RANDOLPH LATUMAHINA, Direktur PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI;
  - i. BAP AGUS BUDIANTO, Komisaris PT AYARO MULYA KONSTRUKSI;
  - j. BAP Supplier-supplier;
  - k. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014;
  - l. Rekening Koran Bank BCA dan Rekening Koran Bank CIMB NIAGA
  - m. SPT Masa PPN Januari 2014 dan Maret s/d Desember 2014;

Halaman 84 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. SPT Masa PPN Januari s/d Juli 2015;
- o. Faktur Pajak Keluaran, Invoice, Kwitansi dan dokumen kelengkapannya
- p. Faktur Pajak Masukan, Surat Jalan dan dokumen kelengkapannya
- q. Print Out NTPN Setoran PPN tahun 2014 dan 2015
- Bahwa Dari data-data yang diperlihatkan penyidik, ahli berpendapat sebagai berikut :
  - Masa pajak Agustus s.d. Desember 2014  
PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI menyampaikan SPT Masa PPN dengan nilai Nihil padahal terdapat faktur pajak yang diterbitkan dan dipakai sebagai sarana untuk memungut PPN oleh PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI yang seharusnya dilaporkan pada masa Agustus s.d. Desember 2014.
  - Masa pajak Januari s.d. Juli 2015.  
PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI menyampaikan SPT Masa PPN dengan jumlah nilai Pajak Keluaran sebesar Rp 167.564.677,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Namun masih terdapat Faktur Pajak yang diterbitkan dan dipakai sebagai sarana untuk memungut PPN oleh PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI pada masa Januari s.d. Juli 2015 yang tidak dilapor. Seharusnya Faktur Pajak tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Juli 2015;
  - Masa pajak Agustus s.d. September 2015  
PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI tidak menyampaikan SPT Masa PPN, padahal terdapat faktur pajak yang diterbitkan dan dipakai sebagai sarana untuk memungut PPN oleh PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI yang seharusnya dilaporkan pada masa Agustus s.d. September 2015.
- Bahwa Ketentuan pidana perpajakan yang telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat disangkakan adalah sebagai berikut:
  - Masa pajak Agustus s.d. Desember 2014:  
Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.
  - Masa pajak Januari s.d. September 2015.  
Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.
  - Masa pajak Agustus s.d. September 2015.  
Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.

Halaman 85 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan BAP dan bukti-bukti surat sebatas yang diperlihatkan penyidik kepada ahli, ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. Unsur Subjek, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia sebagai subjek hukum pidana, berkedudukan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan penjelasannya, mewakili dan bertanggungjawab menjalankan hak dan kewajiban perpajakan PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI. Terlsangka yang menandatangani semua SPT PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI dan sebagai pejabat yang ditunjuk menandatangani Faktur Pajak oleh PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI. Terdakwa selaku komisaris memiliki peran aktif dalam mengendalikan seluruh kegiatan usaha dan menandatangani dokumen-dokumen formal sebagai wakil dari PT AYARO MUYA KONSTRUKSI.
  - b. Unsur Perbuatan, perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan pada jawaban atas pertanyaan 1 dan 2, telah memenuhi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c yaitu: tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, huruf d yaitu: menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan huruf l yaitu: tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, UU KUP.
  - c. Unsur Kesalahan, Terdakwa mempunyai pengetahuan tentang perpajakan khususnya PPN, hal ini dapat diketahui bahwa Terdakwa menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN atas penyerahan jasa konstruksi kepada pelanggannya. Terdakwa juga beberapa kali menyampaikan SPT Masa PPN (dari data yang diperlihatkan penyidik diketahui Terdakwa menyampaikan SPT PPN masa Januari, Maret s/d Desember 2015 dan Juni 2014, dan Januari s/d Juli 2015) serta melakukan setoran. Namun demikian Terdakwa tidak melaporkan seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan dalam SPT Masa PPN dan menyetor PPN yang telah dipungut serta tidak seluruh SPT Masa PPN disampaikan ke KPP. Perbuatan tidak melaporkan Faktur Pajak yang diterbitkan dan menyetorkan PPN yang dipungut serta tidak menyampaikan SPT Masa PPN dilakukan berulang-ulang. Keadaan

Halaman 86 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peristiwa tersebut mengindikasikan Terdakwa sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas.

- d. Unsur Akibat, atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada pendapatan negara karena seharusnya PPN yang dipungut PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI disetor ke kas negara.

Pendapat ahli di atas hanya sebatas bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik.

- Bahwa Tidak terdapat pengurus lain ataupun pihak lainnya yang diduga kuat turut serta atau menyuruh melakukan atau menganjurkan atau yang membantu perbuatan pidana tersebut karena kegiatan usaha PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI berdasarkan data dan fakta yang ditunjukkan penyidik secara keseluruhan dilakukan sendiri oleh AGUS BUDIANTO;
- Bahwa Berdasarkan data dan fakta yang ditunjukkan Penyidik, Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa AGUS BUDIANTO melalui Wajib Pajak PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI mengakibatkan terjadinya Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 855,673,639 (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang perhitungannya tertuang dalam Laporan Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yang Ahli buat, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Atas perbuatan "tidak menyampaikan SPT" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP dan/atau "tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP untuk masa Pajak Agustus s/d September 2015 sebesar **Rp 116.098.929** (seratus enam belas juta sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah).
  - b. Atas perbuatan "menyampaikan SPT yang isinya tidak benar" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP dan/atau "tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP untuk Masa Pajak Agustus s/d Desember 2014 sebesar **Rp 478.630.398** (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan Masa Pajak Januari s/d Juli 2015 sebesar **Rp 260.944.312** (dua ratus enam puluh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah)

Halaman 87 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total **Rp 739.574.710** (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)

Kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp 855,673,639** (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut diatas (huruf b dan c) adalah merupakan PPN yang telah dipungut tetapi tidak disetorkan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.

- Bahwa Mengenai kuasa menandatangani SPT diatatur berdasarkan PMK 22/PMK.03/2008 j.o. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa. Berdasarkan ketentuan tersebut penandatanganan SPT bisa dikuasakan kepada karyawan atau pihak lain sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut.;

1. Syarat-syarat seorang kuasa sebagai yang dimaksud pada PMK 22/PMK.03/2008 sebagai berikut :

1. memiliki NPWP
2. telah menyampaikan SPT tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir;
3. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
4. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak.

2. Syarat-syarat seorang kuasa sebagai yang dimaksud pada PMK 229/PMK.03/2014 sebagai berikut :

1. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
3. memiliki NPWP ; dan
4. telah menyampaikan SPT tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir.;

Persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif;

- Bahwa MITA ANDILA tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2008 jo Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 sehingga MITA ANDILA tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Halaman 88 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Juli 2015 yang telah disampaikan oleh PT AYARO MULYA KONSTRUKSI adalah **tidak benar secara formal** karena ditandatangani oleh Seorang Kuasa yang tidak memenuhi syarat-syarat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2008 jo Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli MITA ANDILA tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena MITA ANDILA hanya berstatus sebagai penerima kuasa sehingga tanggung jawab tetap berada di pihak pemberi kuasa, dalam hal ini AGUS BUDIANTO;
- Bahwa Dari fakta tersebut diatas, Ahli berpendapat pasal pidana perpajakan yang dapat disangkakan kepada AGUS BUDIANTO sbb :
  - AGUS BUDIANTO dapat disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i UU KUP atas SPT PPN Masa Pajak **Agustus s.d. Desember 2014 dan Januari s.d Juli 2015** karena untuk Masa Pajak tersebut SPT PPN PT AYARO MULYA KONSTRUKSI disampaikan namun isinya tidak benar karena tidak melaporkan faktur pajak-faktur pajak yang telah dipungut dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut.
  - AGUS BUDIANTO dapat disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i UU KUP terhadap Masa Pajak **Agustus dan September 2015** karena untuk Masa tersebut SPT Masa PPN PT AYARO MULYA KONSTRUKSI tidak disampaikan padahal terdapat pemungutan PPN sebesar Rp 116.098.929,- yang seharusnya dilaporkan dan disetorkan ke Kas Negara.
- Bahwa Berdasarkan data dan fakta yang ditunjukkan Penyidik, Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa AGUS BUDIANTO melalui Wajib Pajak PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI mengakibatkan terjadinya Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 855,673,639 (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang perhitungannya tertuang dalam Laporan Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yang Ahli buat, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Atas perbuatan "menyampaikan SPT yang isinya tidak benar" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP dan/atau "tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP sbb :

Halaman 89 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Masa Pajak Agustus s/d Desember 2014 sebesar **Rp 478.630.398,-** (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- Untuk Masa Pajak Januari s.d Juli 2015 sebesar **Rp 260.944.312,-** (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- b. Atas perbuatan "tidak menyampaikan SPT" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP dan/atau "tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP untuk Masa Pajak Januari s/d September 2015 sebesar **Rp 116.098.929,-** (seratus enam belas juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- c. Sehingga jumlah keseluruhan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp 855.673.639,-** (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut kasus pidana sebelumnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HAMONANGAN PANGGABEAN, SH. dari Kantor Hukum MONANG PANGGABEAN, SH & REKAN.;
- Bahwa susunan pengurus dan komisaris tahun pajak 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut:
  1. YOSSE ARMANDO SUBANDI, Sebagai Direktur;
  2. AGUS BUDIANTO sebagai Komisaris.Susunan pengurus dan komisaris tersebut berdasarkan Akte Nomor : 22, tanggal 27 September 2007, oleh notaris ANIEK YULAICHAH, SH di Malang;
- Bahwa Susunan pemegang saham pada tahun pajak 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut:
  1. YOSSE ARMANDO SUBANDI, setoran modal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau 50% dari jumlah modal yang telah disetor.;
  2. AGUS BUDIANTO setoran modal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau 50% dari jumlah modal yang telah disetor;

Halaman 90 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte Pendirian adalah Akte Nomor : 22, tanggal 27 September 2007, oleh notaris ANIEK YULAICHAH, S.H., di Malang. Akta Perubahan pertama No. 27 tanggal 24 April 2009 Notaris H. CHUSEN BISRI SH. Di Malang dengan perincian sebagai berikut :

- AGUS BUDIANTO sebagai Komisaris dengan Setoran Saham Rp 330 juta;
- YOSSE ARMANDO sebagai Direktur dengan Setoran Saham Rp 330 juta.
- ANDRIANA OKTOVA sebagai Komisaris Utama dengan Setoran Saham Rp 340 juta

Akta Perubahan kedua No. 34 tanggal 27 Oktober 2009 Notaris GALUH EVA PURNAMA SH. dengan perincian sebagai berikut :

- AGUS BUDIANTO sebagai Komisaris dengan Setoran Saham Rp 500 juta;
- YOSSE ARMANDO sebagai Direktur dengan Setoran Saham Rp 500 juta.

Akta Perubahan ketiga/terakhir No. 04 tanggal 15 Juli 2010 Notaris SRI HENDROWATI SH. dengan perincian sebagai berikut :

- YENI KURNIAWATI sebagai Komisaris dengan Lembar saham 5.000.
- YOSSE ARMANDO sebagai Direktur dengan Lembar saham 5.000.

- Bahwa Tidak ada akte perubahan setelah akte nomor 04 tanggal 15 Juli 2010;
- Bahwa Terdapat hubungan keluarga diantara pemegang saham/pemilik modal pada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 tahun pajak 2014 dan tahun pajak 2015 yaitu YOSSE ARMANDO SUBANDI adalah sepupu Terdakwa dari garis ibu Terdakwa. Sedangkan YENI KURNIAWATI merupakan istri dari YOSSE.
- Bahwa Dalam tahun 2014 dan 2015 **Terdakwa** yang aktif menjalankan kegiatan usaha PT AYARO MULYA KONSTRUKSI yaitu sebagai manager proyek untuk proyek dari PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI di Makassar;
- Bahwa Ketika diperlihatkan SPT 1771 tahun pajak 2014 dengan tanda terima nomor : S-02029855/PPWBIDR/WPJ.12/KP.1403/2015, tanggal 31 Agustus 2015. Lampiran V. pada Bagian A dituliskan AGUS BUDIANTO dan DINA MARANETA masing-masing merupakan pemegang saham sebesar Rp.500.000.000,- dan pada bagian B ditulis AGUS BUDIANTO sebagai Komisaris dan DINA MARANETA sebagai Direktur yang bersangkutan menjelaskan bahwa Dalam Lampiran V Bagian A dan Bagian B SPT 1771 tahun pajak 2014 tertulis DINA MARANETTA sebagai Pemegang Saham

Halaman 91 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Direktur hal tersebut dituliskan oleh MITA ANDILA staff Terdakwa atas perintah Terdakwa hanya untuk keperluan melengkapi isian Lampiran V pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2014 yang akan dilaporkan di KPP Pratama Malang Selatan;

1. Kegiatan usaha PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 pada tahun pajak 2014 dan tahun pajak 2015 melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi bangunan;
2. Alamat Usaha PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 berada di :

1. Jalan Singgalang No.01, RT.003/RW.009, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Di alamat tersebut terdapat sebuah bangunan rumah yang digunakan sebagai kantor PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000, Namun sejak akhir tahun 2014 sudah berpindah alamat karena ikut rumah mertua di Cinambo Bandung.

2. Sejak mendapatkan proyek dari PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 tahun 2014 Terdakwa menggunakan alamat di Cinambo Indah No. 05, RT.001/RW.005, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

Alamat tersebut merupakan alamat untuk keperluan korespondensi yang berkaitan dengan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000.

- Bahwa Proses bisnis kegiatan usaha PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 tahun pajak 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

- a. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 mendapatkan proyek dari pengguna jasa konstruksi yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja yang berisi nilai proyek dan kesepakatan yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- b. Pengguna Jasa Kontruksi kemudian menerbitkan rincian pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan proyek yang dituangkan dalam dokumen Surat Perintah Kerja sebagai pedoman PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 untuk melaksanakan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan pekerjaan proyek dilakukan di lokasi proyek oleh pekerja bangunan yang terdiri dari kuli, tukang, mandor, pengawas mandor dan dipimpin seorang pimpinan proyek; -
- d. Pengguna jasa konstruksi menunjuk sebuah tim yang bertugas menilai persentase penyelesaian pekerjaan pembangunan proyek konstruksi sebagai dasar untuk menentukan termin pembayaran kepada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000;
- e. Hasil penilaian perkembangan penyelesaian proyek dijadikan dasar oleh PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 untuk membuat surat tagihan kepada pengguna jasa konstruksi dengan menyampaikan kwitansi dan faktur PPN;
- f. Tagihan yang disampaikan oleh PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 dibayarkan dengan cara transfer melalui ke rekening bank;
- g. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 melakukan pembukuan di Makassar di lokasi proyek dilakukan oleh staff administrasi keuangan;

**Seluruh dokumen dan berkas yang berkaitan dengan transaksi kegiatan usaha dan perpajakan disimpan di kantor dilokasi proyek.**

*Namun saat ini kantor di lokasi proyek sudah dirusak oleh pekerja karena insiden demo menuntut pembayaran upah yang terlambat dibayarkan sehingga seluruh dokumen dan pembukuan terkait pelaksanaan proyek telah hilang.*

- Bahwa Benar PT AYARO MULYA KONSTRUKSI telah terdaftar di KPP Malang dengan dan telah diberikan Nomor NPWP: 21.014.47.8-623.000 sesuai Surat Kerangan Terdaftar Nomor: PEM-0004118ER/WPJ.12/KP.0103/2007 tanggal 10 Oktober 2007 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 07 Januari 2008 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) nomor: PEM-003/WPJ.12/KP.1403/2008 tanggal 07 Januari 2008;
- Bahwa Kewajiban Pajak dilaksakan sendiri dibantu oleh petugas (*Account Representative*) AR di Kantor Pajak KPP Pratama Malang Selatan;
- Bahwa Kewajiban perpajakan perusahaan adalah PPh Badan dan PPN
- Bahwa PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 pada tahun 2014 dan 2015 hanya mendapatkan proyek konstruksi bangunan rumah tinggal dari PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 dengan lokasi proyek di *Waterfront City Pavillion*

Halaman 93 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residen, Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar (samping Trans Studio Makassar).

- Bahwa Pelaksanaan proyek dari PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian

Kerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 29 (duapuluh sembilan) unit Pembangunan Perumahan *Double Decker Phase 1*, Waterfront City Pavillion Residen, Makassar.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 100% dari tanggal 24 Maret s.d. 31 Desember 2014 dengan nilai proyek sebesar Rp 27.388.800.000 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp 2.738.880.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 2 (dua) unit Pembangunan Perumahan *Double Decker Spesial Type Fase 1*, Proyek Waterfront City Pavillion Residen, Makassar.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 100% dari tanggal 1 Oktober 2014 s.d. 1 Juli 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp 2.572.014.150 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu seratus lima puluh rupiah) dengan nilai PPN sebesar Rp 257.201.415,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu empat ratus lima belas rupiah).

Namun tidak seluruh nilai proyek dapat dicairkan karena kedua proyek sebagaimana tersebut diatas tidak dapat diselesaikan karena adanya pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001.

- Bahwa Nilai pencairan proyek tahun 2014 yang diperoleh dari PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 adalah sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN	Tagihan/Pencairan
	Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6 = 4+5
1	0100021405050595	23-05-2014	1.300.968.000	130.096.800	1.431.064.800
2	0100021405050596	24-06-2014	1.300.968.000	130.096.800	1.431.064.800
3	0100021405050597	25-08-2014	1.347.802.848	134.780.285	1.482.583.133

Halaman 94 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



4	0100021405050598	25-09-2014	1.277.550.576	127.755.058	1.405.305.634
5	0100021405050599	25-10-2014	1.353.006.720	135.300.672	1.488.307.392
6	0100021405050600	25-11-2014	1.691.258.400	169.125.840	1.860.384.240
7	0100021405050601	15-12-2014	1.709.471.952	170.947.195	1.880.419.147
			9.981.026.496	998.102.650	10.979.129.146

Nilai penyelesaian proyek tahun 2015 yang diperoleh oleh PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 adalah sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN	Tagihan/Pencairan
	Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6 = 4+5
1	0100011510641740	25-01-2015	1.636.617.744	163.661.774	1.800.279.518
2	0100011510641741	25-02-2015	1.176.075.072	117.607.507	1.293.682.579
3	0100011510641742	27-03-2015	1.790.131.968	179.013.197	1.969.145.165
4	0100011510641743	02-04-2015	824.813.712	82.481.371	907.295.083
5	0100011510641744	25-04-2015	150.269.927	15.026.993	165.296.920
6	0100011510641745	27-05-2015	387.688.464	38.768.846	426.457.310
7	0100011510641746	27-05-2015	190.830.590	19.083.059	209.913.649
8	0100011510641747	29-06-2015	588.037.536	58.803.754	646.841.290
9	0100011510641748	30-06-2015	106.288.485	10.628.849	116.917.334
10	0100011510641749	31-07-2015	699.920.784	69.992.078	769.912.862
11	0100011510641750	31-08-2015	840.425.328	84.042.533	924.467.861
12	0110011510641751	30-09-2015	214.287.359	21.428.736	235.716.095
13	0110011510641752	30-09-2015	483.960.096	48.396.010	532.356.106
			9.089.347.065	908.934.707	9.998.281.772

Pencairan termin terakhir senilai Rp 512.997.701 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) tidak dibayarkan kepada Terdakwa melainkan ditransfer ke para suplier bahan bangunan sehingga Terdakwa hanya menerima sisanya sebesar Rp 39 ribu padahal tagihan Terdakwa tersebut juga ada PPN didalamnya. Nilai tersebut dicairkan sepihak oleh PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, NPWP : 02.983.155.9-804.001 dan dipotong sepihak untuk dibayarkan kepada para supplier.

- Bahwa Dokumen yang Terdakwa persiapkan untuk melakukan penagihan per termyn proyek adalah sebagai berikut :

1. Kwitansi



## 2. Faktur Pajak

Dokumen tersebut diterbitkan setelah adanya dokumen Progres Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran dikeluarkan oleh PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menandatangani. Karena pada saat itu yang tercantum sebagai Direktur PT AYARO adalah YOSSE ARMANDO pada saat itu ybs secara lisan mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan nama PT AYARO untuk proyek yang Terdakwa kerjakan dan menandatangani seluruh dokumen terkait supaya proses pembayaran bisa. Pada saat itu YOSSE saat itu posisi ada di Malang sehingga tidak bisa tanda tangan;
- Bahwa Dalam dokumen Kwitansi dan Faktur Pajak tersebut Terdakwa bertindak sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa Pembayaran hasil pekerjaan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623 dilakukan melalui transfer ke rekening bank sebagai berikut:
  1. Nomor rekening : 283 069 4555, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Bandung Ujung Berung, a.n. AGUS BUDIANTO;
  2. Nomor rekening : 028 010 001 5199, Bank CIMB NIAGA Kantor Cabang Bandung Buah Batu, a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI;
  3. Nomor rekening : 283 039 3211, Bank BCA Kantor Cabang AH Nasution, a.n. DINA MARANETTA; dan
  4. Langsung dibayarkan oleh PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI, kepada para supplier PT AYARO MULYA KONSTRUKSI dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2014 :

No.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN	Tagihan	Potongan PPh Final	Biaya-Biaya	Realisasi Pembayaran	Dibayar /tanggal melalui
1	2	3	4 = 2+3	6	7	8 = 4-6-7	9
1	1.300.968.000	130.096.800	1.431.064.800	39.029.040	30.000	1.392.005.760	BCA-Agus Budianto 17/06/2014
2	1.300.968.000	130.096.800	1.431.064.800	39.029.040	30.000	1.392.005.760	BCA-Agus Budianto 08/08/2014
3	1.347.802.848	134.780.285	1.482.583.133	40.434.085	30.000	1.442.119.048	BCA-Agus Budianto 03/10/2014
4	1.277.550.576	127.755.058	1.405.305.634	38.326.518	30.000	1.366.949.116	BCA-Agus Budianto 28/10/2014
5	1.353.006.720	135.300.672	1.488.307.392	54.120.268	30.000	1.434.157.124	BCA-Agus Budianto 08/12/2014
6	1.691.258.400	169.125.840	1.860.384.240	67.650.336	0	1.792.733.904	BCA-Agus Budianto 26/01/2015
7	1.709.471.952	170.947.195	1.880.419.147	68.378.879	25.000	1.812.015.268	BCA-Agus Budianto 04/03/2015
	9.981.026.496	998.102.650	10.979.129.146	346.968.166	175.000	10.631.985.980	

Tahun 2015 :

No	Dasar	PPN	Tagihan	Potongan	Biaya-	Realisasi	Dibayar melalui
----	-------	-----	---------	----------	--------	-----------	-----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengenaan Pajak (DPP)			PPh Final	Biaya	Pembayaran	/tanggal
1	2	3	4 = 2+3	6	7	8 = 4-6-7	9
1	1.636.617.744	163.661.774	1.800.279.518	65.464.710	25.000	1.734.789.808	BCA-Agus Budianto 18/03/2015
2	1.176.075.072	117.607.507	1.293.682.579	47.043.003	25.000	1.246.614.576	BCA-Agus Budianto 06/05/2015
3	1.790.131.968	179.013.197	1.969.145.165	71.605.279		1.897.514.886	
4	150.269.927	15.026.993	165.296.920	6.010.797		159.286.123	
			2.134.442.085	77.616.076	25.000	2.056.801.009	BCA-Agus Budianto 13/05/2015
5	824.813.712	82.481.371	907.295.083	32.992.548	25.000	874.277.535	BCA-Agus Budianto 28/05/2015
6	387.688.464	38.768.846	426.457.310	15.507.538		410.924.772	
7	190.830.590	19.083.059	209.913.649	7.633.224		202.280.425	
			636.370.959	23.140.762	25.000	613.205.197	BCA-Agus Budianto 13/07/2015
8	588.037.536	58.803.754	646.841.290	23.521.502		623.319.788	CIMB Niaga - AYARO, 04/08/2015
9	106.288.485	10.628.849	116.917.334	4.251.540		112.665.794	CIMB Niaga - AYARO, 18/08/2015
10	699.920.784	69.992.078	769.912.862	27.996.831	50.000	741.916.031	
						111.873.188	Bayar ke PT Citra Indah Mitra
						630.042.843	CIMB Niaga - AYARO, 18/09/2015
11	840.425.328	84.042.533	924.467.861	33.617.013	25.000	890.850.848	
						184.403.054	Bayar ke PT Surya Pertiwi
						58.500.000	Bayar ke PT Monier
						65.755.900	Bayar ke Roselina Randa
						179.200.000	Bayar Ke PT Bumi SB
						40.000.000	Bayar ke PT Kepuh KA
						362.991.894	CIMB Niaga - AYARO, 09/10/2015
12	214.287.359	21.428.736	235.716.095	8.571.495	5.000	227.144.600	BCA - DINA MARANETTA 04/12/2015
13	483.960.096	48.396.010	532.356.106	19.358.405	5.000	512.997.701	
						41.513.472	Bayar ke PT Duta Kreasi Bersama Real
						149.039.566	Bayar ke PT Barawaja
						115.425.000	Bayar ke Roselina Randa
						130.060.000	Bayar Ke PT Bumi SB
						76.915.000	Bayar ke PT Kepuh KA
						39.663	CIMB Niaga - AYARO, 22/01/2016
	9.089.347.065	908.934.707	9.998.281.772	363.573.885	210.000	9.634.582.887	

- Bahwa pencairan pada nomor urut 10, 11 dan 13 terlebih dahulu dipotong oleh PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI untuk ditransfer ke Supplier Karena PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI terlambat membayar tagihan ke PT AYARO berakibat PT AYARO tidak bisa membayar para supplier sehingga mereka (para supplier tersebut) menagih langsung ke PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI dan PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI memotong lebih dahulu tagihan yang dibayar ke PT AYARO;
- Bahwa Pemotongan dan pentransferan ke para Supplier Saudara yang dilakukan oleh PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI Untuk no.10 dan 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tahu sedangkan no. 13 Terdakwa tidak tahu karena PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI memotong secara sepihak;

- Bahwa DINA MARANETTA pada tahun pajak 2014 dan 2015 sama sekali tidak ikut dalam kegiatan usaha. Nomor rekening 283 039 3211, Bank BCA Kantor Cabang AH Nasution, a.n. DINA MARANETTA terpaksa Terdakwa pergunakan karena semua rekening Terdakwa saat itu sedang dilakukan pemblokiran oleh pihak KPP Pratama Malang Selatan.
- Bahwa Pembayaran hasil pekerjaan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623 selama tahun pajak 2014 dan 2015 yang ditagihkan kepada PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI didalamnya sudah termasuk PPN.
- Bahwa Pembayaran hasil pekerjaan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623 selama tahun pajak 2014 dan 2015 yang ditagihkan kepada PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI didalamnya sudah termasuk PPN.
- Bahwa Pajak Keluaran yg **seharusnya** dilaporkan tahun pajak 2014 :

No.	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100021405050595	01-06-2014	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	130,096,800
2	0100021405050596	24-06-2014	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	130,096,800
3	0100021405050597	25-08-2014	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	134,780,285
4	0100021405050598	25-09-2014	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	127,755,058
5	0100021405050599	25-10-2014	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	135,300,672
6	0100021405050600	25-11-2014	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	169,125,840
7	0100021405050601	15-12-2014	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	170,947,195
Jumlah PK yang seharusnya dilaporkan tahun pajak 2014					998.102.650

Pajak Keluaran yg **seharusnya** dilaporkan tahun pajak 2015 :

No.	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100011510641740	25-01-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	163,661,774
2	0100011510641741	25-02-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	117,607,507
3	0100011510641742	27-03-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	179,013,197
4	0100011510641743	02-04-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	15,026,993
5	0100011510641744	25-04-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	82,481,371
6	0100011510641745	27-05-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	38,768,846
7	0100011510641746	27-05-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	19,083,059
8	0100011510641747	29-06-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	58,803,754
9	0100011510641748	30-06-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	10,628,848
10	0100011510641749	31-07-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	69,992,078
11	0100011510641750	31-08-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	84,042,533
12	0110011510641751	30-09-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	21,428,735
13	0110011510641752	30-09-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	48,396,009
Jumlah Pajak Keluaran yang seharusnya dilaporkan tahun pajak 2015					908.934.707





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai pajak keluaran yang telah dilaporkan oleh PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 pada tahun pajak 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :  
Pajak Keluaran yg **telah** dilaporkan tahun pajak 2014 :

No.	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100021405980595	23-05-2014	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	130,096,800
2	0100021405050596	24-06-2014	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	130,096,800
Jumlah PK yang telah dilaporkan tahun pajak 2014					260.193.600

Pajak Keluaran yg **telah** dilaporkan tahun pajak 2015 :

No.	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100011510641745	27-05-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	38,768,846
2	0100011510641747	29-06-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	58,803,753
3	0100011510641749	31-07-2015	029831559804001	PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI	69,992,078
Jumlah PK yang telah dilaporkan tahun pajak 2015					167.564.678

- Bahwa Nilai PPN yang telah Saudara pungut yang seharusnya Saudara setorkan ke Kas Negara dan laporkan ke KPP Pratama Malang Selatan tahun 2014 adalah sebesar Rp.998.102.650,- dan tahun 2015 adalah sebesar Rp.908.934.707,- alasan Terdakwa hanya menyetorkan dan melaporkan tahun 2014 sebesar Rp.260.193.600,- dan tahun 2015 sebesar Rp.167.564.678,- karena Cash flow PT AYARO tidak cukup untuk membayar Pajak PPN karena penerimaan tagihan dari PT RANCANG KOMUNIKA sebagian besar habis untuk membayar supplier karena bahan material dari supplier sudah diterima di muka dalam jumlah yang besar;
- Bahwa Nilai pajak masukan yang seharusnya dilaporkan oleh PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 pada tahun pajak 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Pajak Masukan yg **seharusnya** dilaporkan tahun pajak 2014 :

No.	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100011489058744	07-05-2014	011262821812000	BARAWAJA	14,384,380
2	0100011489058750	09-05-2014	011262821812000	BARAWAJA	13,973,002
3	0100001417995112	07-05-2014	014402366641000	VARIA USAHA BETON	227,272
4	0100001417995110	07-05-2014	014402366641000	VARIA USAHA BETON	4,704,000
5	0100011489058884	30-06-2014	011262821812000	BARAWAJA	2,494,410
6	0100021409996552	03-07-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,654,545
7	0100021409996586	17-07-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,054,545
8	0100021409996596	23-07-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,990,909
9	0100021409996620	19-08-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,272,727
10	0100021475046052	26-08-2014	011262821812000	BARAWAJA	11,708,303
11	0100021475046005	11-08-2014	011262821812000	BARAWAJA	13,984,651



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	0100021487053628	13-09-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
13	0100021409996716	29-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	5,472,727
14	0100021409996717	29-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	6,809,091
15	0100021409996701	19-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,781,818
16	0100021409996724	29-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	4,900,000
17	0100031425788219	30-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,336,364
18	0100021409996656	02-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,227,273
19	0100021409996674	09-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,563,636
20	0100021409996678	10-09-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,100,000
21	0100021475046083	06-09-2014	011262821812000	BARAWAJA	12,422,651
22	0100031433163634	30-10-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
23	0100021487054198	17-10-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
24	0100021475046207	09-10-2014	011262821812000	BARAWAJA	10,485,000
25	0100031425788275	27-10-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	6,618,182
26	0100031425788244	16-10-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,400,000
27	0100031425788245	16-10-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	6,363,636
28	0100031434447247	27-11-2014	011262821812000	BARAWAJA	16,078,059
29	0100031434447162	01-11-2014	011262821812000	BARAWAJA	8,682,300
30	0100031434447208	15-11-2014	011262821812000	BARAWAJA	12,711,050
31	0100031433163866	29-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
32	0100031433163758	15-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
33	0100031433163650	01-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	909,091
34	0100031433163859	28-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	363,636
35	0100031433163744	13-11-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	363,636
36	0100031425788318	20-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	4,327,273
37	0100031425788344	28-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	4,009,091
38	0100031425788356	28-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,309,091
39	0100031425788332	25-11-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,818,182
40	0100031479659173	25-11-2014	010001204052000	MONIER	5,708,727
41	0100031479659415	29-11-2014	010001204052000	MONIER	3,777,272
42	0100031479659418	29-11-2014	010001204052000	MONIER	11,499,363
43	0100031479659416	29-11-2014	010001204052000	MONIER	3,777,272
44	0100031477242912	22-12-2014	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	784,982
45	0100031477242747	20-12-2014	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	432,364
46	0100031479660522	31-12-2014	010001204052000	MONIER	3,536,180
47	0100031479660519	31-12-2014	010001204052000	MONIER	3,602,182
48	0100031479660640	31-12-2014	010001204052000	MONIER	3,777,274
49	0100031479660641	31-12-2014	010001204052000	MONIER	4,173,543
50	0100031433163948	10-12-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
51	0100031433164032	20-12-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	909,091
52	0100031433164003	17-12-2014	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
53	0100031468188130	11-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	15,230,164
54	0100031468188129	11-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	3,691,391
55	0100031468188438	23-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	11,316,000
56	0100031468188437	23-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	3,737,964
57	0100031468188585	31-12-2014	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	2,247,964
58	0100031455136145	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	68,208
59	0100031455136142	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	565,152
60	0100031455136143	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	14,819,464
61	0100031455136144	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	2,479,268
62	0100031455136146	26-12-2014	013059118038000	SURYA PERTIWI	227,360

Halaman 100 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	0100031496644861	29-12-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	5,918,182
64	0100031496644860	29-12-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	890,909
65	0100031496644885	30-12-2014	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,272,727
Jumlah Pajak Msaukan yang seharusnya dilaporkan tahun pajak 2014					302,761,715

Pajak Masukan yg **seharusnya** dilaporkan tahun pajak 2015 :

No.	FAKTUR PAJAK		NPWP	NAMA WP	PPN
	NOMOR	TGL			
1	0100001568998087	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	4,133,080
2	0100001568998093	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	516,142
3	0100001568998092	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	504,252
4	0100001568998091	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	7,424,000
5	0100001568998090	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	2,806,736
6	0100001568998089	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	363,776
7	0100001568998088	17-01-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	1,015,928
8	0100001554854868	29-01-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	436,364
9	0100001554853976	26-01-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	654,545
10	0100001554853975	26-01-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	182,045
11	0100001554854563	28-01-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	436,364
12	0100001554854857	29-01-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	60,682
13	0100001551855400	12-01-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,227,273
14	0100011502265402	23-01-2015	030795538805000	BERKAT JAYATRINDO	668,181
15	0100011502265411	23-01-2015	030795538805000	BERKAT JAYATRINDO	668,181
16	0100001582226070	30-01-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	2,545,455
17	0100001582225937	12-01-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	2,909,091
18	0100001582225955	13-01-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
19	0100001597740055	24-01-2015	010001204052000	MONIER	477,272
20	0100001597740260	24-01-2015	010001204052000	MONIER	4,840,909
21	0100011504564707	31-01-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	13,910,618
22	0100011504564708	31-01-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14,382,545
23	0100011504564253	21-01-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	141,818
24	0100011504564582	26-01-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14,382,545
25	0100011504564279	21-01-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	13,768,991
26	0100011504564583	26-01-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14,382,545
27	0100001554855566	02-02-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	364,091
28	0100001592628504	12-02-2015	011262821812000	BARAWAJA	11,407,800
29	0100011504564724	02-02-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	14,382,545
30	0100011504564787	05-02-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	7,117,127
31	0100011504564791	05-02-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	9,145,800
32	0100011504564790	05-02-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	8,781,818
33	0100001569019118	16-02-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	14,863,254
34	0100001569019119	16-02-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	5,160,492
35	0100001551855462	05-02-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,945,455
36	0100001551855515	26-02-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,118,182
37	0100001582226503	07-02-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
38	0100001582226531	14-02-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
39	0100001579084953	13-02-2015	032056483805000	MANDIRI PERKASA UTAMA	5,440,909
40	0100001554856533	05-02-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	130,909
41	0100001554860856	23-02-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	86,473
42	0100001554860823	23-02-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	43,636

Halaman 101 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	0100001569028491	03-03-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	9,870,672
44	0100001554863593	06-03-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	815,455
45	0100001554865020	12-03-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	872,727
46	0100001592628595	23-03-2015	011262821812000	BARAWAJA	13,512,200
47	0100011504565505	18-03-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	8,333,182
48	0100011504565716	30-03-2015	024699928804000	CITRA INDAH MITRA PRATAMA	1,714,608
49	0100001551855577	27-03-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,881,818
50	0100001551855552	18-03-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	5,090,909
51	0100001582226627	07-03-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
52	0100001582226753	30-03-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	2,363,636
53	0100001582226706	20-03-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
54	0100001582226712	23-03-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
55	0100001592628626	07-04-2015	011262821812000	BARAWAJA	13,512,200
56	0100001592628658	20-04-2015	011262821812000	BARAWAJA	13,512,200
57	0100001582226820	10-04-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
58	0100001582226832	13-04-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	909,091
59	0100001582226890	25-04-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
60	0100001551855643	28-04-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	9,609,091
61	0100001551855655	30-04-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,781,818
62	0100001551855608	07-04-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,181,818
63	0100001551855613	09-04-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,118,182
64	0100011548566424	17-04-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	113,455
65	0100011548566163	16-04-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	170,182
66	0100011548565173	11-04-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	736,364
67	0100011548564937	10-04-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	1,003,636
68	0100011548565209	13-04-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	1,138,909
69	0100001582548975	08-04-2015	013186648801001	ABETAMA SEMPURNA	2,262,000
70	0100021527831598	29-05-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	4,009,091
71	0100021527831555	22-05-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	3,818,182
72	0100021527831538	19-05-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	4,390,909
73	0100011559709702	15-05-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,490,909
74	0100011559709764	30-05-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
75	0100011559709717	19-05-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	909,091
76	0100011559709739	23-05-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	727,273
77	0100011568401755	23-05-2015	013186648801001	ABETAMA SEMPURNA	260,000
78	0100011559709825	15-06-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,272,727
79	0100011559709889	30-06-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
80	0100011559709804	10-06-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,272,727
81	0100011559709779	04-06-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
82	0100011559709880	27-06-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,818,182
83	0100021527831666	29-06-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	5,679,545
84	0100011548575431	01-06-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	931,455
85	0100011548578082	12-06-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	968,182
86	0100011559710063	23-07-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,090,909
87	0100011559710006	04-07-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	545,455
88	0100021527831699	27-07-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,405,455
89	0100011554497458	07-08-2015	013059118038000	SURYA PERTIWI	7,070,490
90	0100031530788408	21-08-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	1,936,364
91	0100031530787208	15-08-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	1,930,909
92	0100031530786587	13-08-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	64,091

Halaman 102 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	0100031530789104	25-08-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	85,455
94	0100031530790390	29-08-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	1,540,909
95	0100031530788825	24-08-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	427,273
96	0100031530788058	20-08-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	1,609,091
97	0100031563258510	31-08-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,670,455
98	0100021527831769	18-08-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,940,000
99	0100011594353653	11-08-2015	016964785047000	DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO	3,773,952
100	0100031525583369	12-08-2015	014114565812000	BOSOWA MINING	117,818
101	0100011559710280	27-08-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,454,545
102	0100011559710236	13-08-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,272,727
103	0100011559710212	06-08-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	2,545,455
104	0100031558220135	22-09-2015	032056483805000	MANDIRI PERKASA UTAMA	964,727
105	0100031563258534	09-09-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,470,000
106	0100031563258597	28-09-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	467,727
107	0100031530792241	07-09-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	580,909
108	0100031530791214	02-09-2015	014401665641000	KEPUH KENCANA ARUM	322,727
109	0100031579144306	29-09-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,288,636
110	0100031579144225	20-09-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	552,272
111	0100031579144200	15-09-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	3,681,818
112	0100031579144388	05-10-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	368,181
113	0100031579144566	28-10-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,104,545
114	0100031563258695	30-10-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	1,403,182
115	0100031563258742	13-11-2015	017356296812000	BUMI SARANA BETON	2,138,182
116	0100031579144650	03-11-2015	012045985812000	CATUR KENCANA SAKTI	1,656,818
Jumlah Pajak Masukan yang seharusnya dilaporkan tahun pajak 2015					370,997,697

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Faktur Pajak masukan pada SPT PPN Masa Januari s.d. Desember 2014 d dan Terdakwa juga tidak melaporkan Faktur Pajak masukan pada SPT PPN Masa Januari s.d. Desember 2015 dengan alasan Tahun 2014 tidak lapor PM karena akan ada perbaikan tahun 2015 sedangkan Tahun 2015 tidak lapor PM karena sudah diputus kontrak bulan Desember 2015 oleh PT RANCANG KOMUNIKA;
- Bahwa Pembuatan Laporan Keuangan, pembukuan, pengisian dan pembuatan Surat Pemberitahaun Masa/Tahunan (SPT) dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pembayaran PPN yang sudah Terdakwa bayarkan adalah sebagai berikut :

## Tahun 2014

No.	Masa	Tanggal Setor	Nilai Setoran (Rp)	NTPN
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	130.096.800	1412140101120910
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	130.096.800	1302030605130314

Halaman 103 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	Nopember	-	-	-
12	Desember	-	-	-
Jumlah PPN Th Pajak 2014			260.193.600	

## Tahun 2015

No.	Masa	Tanggal Setor	Nilai Setoran (Rp)	NTPN
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	12-Agst-15	38.768.846	1508061012060309
6	Juni	12-Agst-15	58.803.753	1113051513090309
7	Juli	19-Okt-15	69.992.078	1502081408121003
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	Nopember	-	-	-
12	Desember	-	-	-
Jumlah PPN Th Pajak 2015			167.564.677	

- Bahwa Pelaporan SPT Masa PPN yang Terdakwa laporkan tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut:

## Tahun 2014

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	Januari	Normal	<a href="#">S-01021361/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
2	Pebruari		Tidak Laporkan		
3	Maret	Normal	<a href="#">S-01021360/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
4	April	Normal	<a href="#">S-01021359/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
5	Mei	Normal	<a href="#">S-01026010/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	130,096,800	27/06/2014
6	Juni	Normal	<a href="#">S-01033332/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	130,096,800	21/08/2014
7	Juli	Normal	<a href="#">S-01033331/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/08/2014
8	Agustus	Normal	<a href="#">S-01004271/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
9	September	Normal	<a href="#">S-01004273/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
10	Oktober	Normal	<a href="#">S-01004274/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
11	Nopember	Normal	<a href="#">S-01004275/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
12	Desember	Normal	<a href="#">S-01004276/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015

## Tahun 2015

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	Januari	Normal	<a href="#">S-01030840/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
2	Pebruari	Normal	<a href="#">S-01030842/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
3	Maret	Normal	<a href="#">S-01030843/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
4	April	Normal	<a href="#">S-01030844/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
5	Mei	Normal	<a href="#">S-01030845/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	38,768,846	13/08/2015
6	Juni	Normal	<a href="#">S-01030846/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	58,803,753	13/08/2015
7	Juli	Normal	<a href="#">S-01043153/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	69,992,078	12/11/2015
8	Agustus		Tidak Laporkan		
9	September		Tidak Laporkan		

Halaman 104 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



10	Oktober		Tidak Lapori		
11	November		Tidak Lapori		
12	Desember		Tidak Lapori		

- Bahwa Yang membuat/menyusun SPT PPN atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 Masa Januari 2014 sd. Desember 2014, Januari 2015 sd. Juli 2015 adalah TERDAKWA sendiri dibantu MITA ANDILA;
- Bahwa Yang menandatangani SPT PPN atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 Masa Januari 2014 sd. April 2014 adalah YOSSE;
- Bahwa Yang menandatangani SPT PPN atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 Masa Mei 2014 sd. Juli 2014 adalah MITA ANDILA atas perintah Terdakwa.;
- Bahwa Yang menandatangani SPT PPN atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 Masa Agustus 2014 sd. Desember 2014 dan Januari 2015 sd. April 2015 adalah Terdakwa;
- Bahwa Yang menandatangani SPT PPN atas nama PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 Masa Mei 2015 sd. Juli 2015 adalah MITA ANDILA atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Benar Terdakwa selaku pengurus PT AYARO MULYA KONSTRUKSI, NPWP : 21.014.497.8-623.000 tidak menyampaikan SPT PPN Masa Agustus dan September 2015 karena belum ada pencairan sampai bulan Desember 2015.
- Bahwa alasan sebagai pengurus yang secara nyata-nyata menjalankan kegiatan usaha PT AYARO MULYA KONSTRUKSI kenapa melaporkan SPT PPN periode Agustus s/d Desember 2014 yang isinya tidak benar, karena pada saat itu SPT PPN Terdakwa laporkan nihil dulu karena Terdakwa akan melaporkan yang sebenarnya atau melakukan pembetulan pada saat sudah ada uang untuk menyetorkan PPN. Faktanya pada saat itu PT RKM baru membayarkan PPN kepada Terdakwa baru atas tiga faktur pajak yaitu nomor 1, 2, dan 3 diatas selebihnya baru dibayarkan oleh PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI (PT RKM) Maret 2015. Namun demikian Maret 2015 ketika Terdakwa sudah menerima pembayaran PPN dari PT RKM tersebut Terdakwa belum melakukan pembetulan dengan dana terpakai untuk membayar suplier yang ditunjuk oleh PT RKM. Kalau tidak segera Terdakwa bayar maka oleh PT RKM akan dipotong langsung;
- Bahwa alasan kepada Terdakwa AGUS BUDIANTO sebagai pengurus yang secara nyata-nyata menjalankan kegiatan usaha PT AYARO MULYA

Halaman 105 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTRUKSI telah melaporkan SPT PPN yang isinya tidak benar dan tidak melaporkan SPT PPN, bahwa untuk tahun 2015 pembayaran termin oleh PT RKM mulai molor/tertunggak. Untuk tagihan-tagihan awal tahun 2015 PT RKM baru membayar mulai Mei sehingga Terdakwa pada bulan itu Terdakwa sudah punya etiked baik untuk mencicil menyetor PPN yang nilainya kecil-kecil. Sedangkan untuk tagihan-tagihan Terdakwa kepada PT RKM bulan Juli baru cair September. Sedangkan tagihan Agustus s/d Desember 2015 tidak ada pembayaran sama sekali dari RKM dan pada 4 Desember Terdakwa diputus kontrak oleh PT RKM dan tagihan Terdakwa kepada PT RKM tersebut dibayarkan oleh PT RKM kepada para suplier. sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali untuk menyetorkan PPN sesuai faktur yang telah Terdakwa terbitkan.

- Bahwa Berdasarkan SPT yang telah dilaporkan ke Kantor Pajak untuk kurun waktu 2015 diketahui bahwa yang menandatangani SPT yang telah dilaporkan tersebut adalah MITA ANDILA berdasarkan Surat Kuasa yang Saudara tandatangani sebagai Pemberi Kuasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2008 jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014, MITA ANDILA tidak memenuhi syarat sebagai kuasa menandatangani SPT sehingga SPT yang telah dilaporkan dan ditandatangani MITA ANDILA dianggap tidak sah. Alasan Terdakwa memberi kuasa kepada MITA ANDILA untuk menandatangani SPT karena ybs berdomisili di Malang sehingga memudahkan untuk sekaligus melaporkan ke Kantor Pajak Malang sedangkan Terdakwa sendiri pada saat itu berada di Makassar untuk mengerjakan proyek. Terkait dengan ketentuan mengenai syarat sahnya Kuasa untuk menandatangani SPT Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya.
- Bahwa alasan Terdakwa AGUS BUDIANTO tidak menyetorkan PPN yang telah Saudara pungut tersebut ke Kas Negara Sebagaimana telah Terdakwa jelaskan sebelumnya Terdakwa belum seluruhnya menyetorkan PPN yang telah Terdakwa pungut dari PT RKM karena pembayaran pembayaran dari PT RKM telat sehingga PPN yang telah Terdakwa terima dari PT RKM terpakai untuk menutup biaya operasional. Alasan karena untuk tagihan-tagihan Juli s/d Desember 2015 tagihan Terdakwa kepada PT RKM termasuk di dalamnya PPN digunakan oleh PT RKM untuk membayar suplier sehingga Terdakwa tidak punya kesempatan memegang uang tersebut. Yang mengakibatkan Terdakwa tidak sanggup menyetorkan PPN yang telah Terdakwa pungut.

Halaman 106 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menghadap sendiri kepada Notaris HILDA tersebut untuk bermaksud membuat akte yang isinya sebagaimana tertulis dalam fotocopy Salinan Akte tersebut, sedangkan YOSSE ARMANDO SUBANDHI, YENNY KURNIAWATI, dan DINA MARANETTA pada saat itu tidak ikut menghadap baru direncanakan untuk menghadap di kemudian hari. Pada saat itu Terdakwa baru diberikan copy salinan akte karena masih menunggu pihak2 lain tersebut. Namun dengan berjalannya waktu ternyata YOSSE dan YENNY KURNIAWATI pergi ke Amerika sehingga proses pembuatan akte tersebut tidak bisa dilanjutkan. Tetapi Terdakwa sempat menggunakan fotocopian akte tersebut pada saat membuka rekening di Bank Niaga.
- Bahwa YOSSE ARMANDO SUBANDHI dan YENNY KURNIAWATI saat ini berada di Amerika karena orang tua dan keluarga lainnya memang tinggal di Amerika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama Barang Bukti					Disita dari		
m.	No.	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan	<b>EKO YULIANTO</b> selaku selaku Account Representati ve KPP Pratama Malang Selatan			
	1.	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor : S-6032/WPJ.12/KP.14/2015, tanggal 12 Nopember 2015;	Satu set	Asli				
	2.	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor : S-6033/WPJ.12/KP.14/2015, tanggal 12 Nopember 2015;	Satu set	Asli				
	3.	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (VISIT), Nomor : LAP-436/WPJ.12/KP.1409/2016, tanggal 24 Mei 2016;	Satu set	Asli				
	4.	Profil Wajib Pajak a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000.	Satu set	Asli				
n.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	<b>ERLIK ONO</b> selaku Kasi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan			
	1	SPT Tahunan 1771 Tahun 2014	1 set					
	2	SPT Masa PPN Januari 2015	1 set					
	3	SPT Masa PPN Pebruari 2015	1 set					
	4	SPT Masa PPN Maret 2015	1 set					
	5	SPT Masa PPN April 2015	1 set					
	6	SPT Masa PPN Mei 2015	1 set					
	7	SPT Masa PPN Juni 2015	1 set					
	8	SPT Masa PPN Juli 2015	1 set					
	9	SPT Masa PPN Agustus 2014	1 set					
	10	SPT Masa PPN September 2014	1 set					
	11	SPT Masa PPN Oktober 2014	1 set					
	12	SPT Masa PPN Nopember 2014	1 set					
	13	SPT Masa PPN Desember 2014	1 set					
O.	I.	FAKTUR PAJAK		DPP	PPN	Jumla h satu lembar	Ket.	<b>RANDOLPH LATUMAHINA</b> Direktur PT RANCANG
		Nomor FP	Tanggal					
	1	010.002-14.05980595	1-Jun-14	1.300.96 8.000	130.096 .800		Asli	

Halaman 107 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	010.002-14.05050596	24-Jun-14	1.300.96 8.000	130.096 .800	satu lembar	Asli	KOMUNIKA MANDIRI
	3	010.002-14.05050597	25-Aug-14	1.347.80 2.848	134.780 .285	satu lembar	Asli	
	4	010.002-14.05050598	25-Sep-14	1.277.55 0.576	127.755 .058	satu lembar	Asli	
	5	010.002-14.05050599	25-Oct-14	1.353.00 6.720	135.300 .672	satu lembar	Asli	
	6	010.002-14.05050600	25-Nov-14	1.691.25 8.400	169.125 .840	satu lembar	Asli	
	7	010.002-14.05050601	15-Dec-14	1.709.47 1.952	170.947 .195	satu lembar	Asli	
	Faktur Pajak Januari s.d. Desember 2014			9.981.026 .496	998.102 .650			
	8	010.001- 15.10641740	25-Jan-15	1.636.61 7.744	163.661 .774	satu lembar	Asli	
	9	010.001- 15.10641741	25-Feb-15	1.176.07 5.072	117.607 .507	satu lembar	Asli	
	10	010.001- 15.10641742	27-Mar-15	1.790.13 1.968	179.013 .197	satu lembar	Asli	
	11	010.001- 15.10641743	27-Apr-15	824.81 3.712	82.481 .371	satu lembar	Asli	
	12	010.001- 15.10641743	2-Apr-15	150.26 9.927	15.026 .993	satu lembar	Asli	
	13	010.001- 15.10641745	27-May-15	387.68 8.464	38.768 .846	satu lembar	Asli	
	14	010.001- 15.10641746	27-May-15	190.83 0.590	19.083 .059	satu lembar	Asli	
	15	010.001- 15.10641747	29-Jun-15	588.03 7.536	58.803 .754	satu lembar	Asli	
	16	010.001- 15.10641748	30-Jun-15	106.28 8.485	10.628 .849	satu lembar	Asli	
	17	010.001- 15.10641749	31-Jul-15	699.92 0.784	69.992 .078	satu lembar	Asli	
	18	010.001- 15.10641750	31-Aug-15	840.42 5.328	84.042 .533	satu lembar	Asli	
	19	011.001- 15.10641751	30-Sep-15	214.28 7.359	21.428 .736	satu lembar	Asli	
	20	011.001- 15.10641752	30-Sep-15	483.96 0.096	48.396 .010	satu lembar	Asli	
	Faktur Pajak Januari s.d. Desember 2015			9.089.34 7.065	908.934 .707			
II. INVOICE & DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN								
Invoice								
	Nomor		Tanggal	Nilai	Jumlah	Ket.		
	21	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/IV/2014	25-Apr- 14	1.431.064.800	satu set	Asli		
	22	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/VI/2014	24-Jun- 14	1.431.064.800	satu set	Asli		
	23	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/VIII/2014	25-Aug- 14	1.482.583.133	satu set	Asli		
	24	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/IX/2014	25-Sep- 14	1.405.305.634	satu set	Asli		
	25	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/X/2014	25-Oct- 14	1.488.307.392	satu set	Asli		
	26	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/XI/2014	25-Nov- 14	1.860.384.240	satu set	Asli		
	27	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/XII/2014	15-Dec- 14	1.880.419.147	satu set	Asli		
	28	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/II/2015	25-Jan- 15	1.800.279.518	satu set	Asli		
	29	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/III/2015	25-Feb- 15	1.293.682.579	satu set	Asli		
	30	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/III/2015	27-Mar- 15	1.969.145.165	satu set	Asli		
	31	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/IV/2015	27-Apr- 15	907.295.083	satu set	Asli		
	32	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/III/ 2015	02-Apr- 15	165.296.919	satu set	Asli		
	33	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/IV/2015	27-May- 15	426.457.310	satu set	Asli		
	34	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/VI/ 2015	27-May- 15	209.913.649	satu set	Asli		
	35	2d/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/VI/2015	29-Jun- 15	646.841.290	satu set	Asli		
	36	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/VI/ 2015	30-Jun- 15	116.917.333	satu set	Asli		
	37	2D/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/VII/2015	31-Jul-15	769.912.862	satu set	Asli		
	38	2D/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/VIII/2015	31-Aug- 15	924.467.861	satu set	Asli		
	39	2D/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/I/ X/2015	30-Sep- 15	235.716.094	satu set	Asli		
	40	2D/BAKPP/PTRKM/AMK- MLG/IX/2015	30-Sep- 15	532.356.105	satu set	Asli		
III SURAT PERJANJIAN KERJA								

Halaman 108 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor	Tanggal	Nilai	Jumlah	Ket.																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	41	011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014	25-Apr-14	30.127.680.000	satu set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	42	028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014	23-Oct-14	2.829.215.565	satu set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																					
p.	<table><tr><td>I.</td><td colspan="5">Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2014</td></tr><tr><td></td><td>Nomor FP</td><td>Tanggal</td><td>Jumlah</td><td colspan="2">Ket</td></tr><tr><td>1</td><td>0100021409996552</td><td>03-07-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>2</td><td>0100021409996586</td><td>17-07-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>3</td><td>0100021409996596</td><td>23-07-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>4</td><td>0100021409996620</td><td>19-08-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>5</td><td>0100021409996716</td><td>29-09-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>6</td><td>0100021409996717</td><td>29-09-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>7</td><td>0100021409996701</td><td>19-09-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>8</td><td>0100021409996724</td><td>29-09-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>9</td><td>0100031425788219</td><td>30-09-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>10</td><td>0100021409996656</td><td>02-09-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>11</td><td>0100021409996674</td><td>09-09-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>12</td><td>0100021409996678</td><td>10-09-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>13</td><td>0100031425788275</td><td>27-10-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>14</td><td>0100031425788244</td><td>16-10-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>15</td><td>0100031425788245</td><td>16-10-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>16</td><td>0100031425788318</td><td>20-11-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>17</td><td>0100031425788344</td><td>28-11-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>18</td><td>0100031425788356</td><td>28-11-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>19</td><td>0100031425788332</td><td>25-11-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>20</td><td>0100031496644861</td><td>29-12-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>21</td><td>0100031496644860</td><td>29-12-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>22</td><td>0100031496644885</td><td>30-12-2014</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">II. Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2015</td></tr><tr><td></td><td>Nomor FP</td><td>Tanggal</td><td>Jumlah</td><td colspan="2">Ket.</td></tr><tr><td>23</td><td>0100001551855400</td><td>12-01-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>24</td><td>0100001551855462</td><td>05-02-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>25</td><td>0100001551855515</td><td>26-02-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>26</td><td>0100001551855577</td><td>27-03-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>27</td><td>0100001551855552</td><td>18-03-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>28</td><td>0100001551855643</td><td>28-04-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>29</td><td>0100001551855655</td><td>30-04-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>30</td><td>0100001551855608</td><td>07-04-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>31</td><td>0100001551855613</td><td>09-04-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>32</td><td>0100021527831598</td><td>29-05-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>33</td><td>0100021527831555</td><td>22-05-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>34</td><td>0100021527831538</td><td>19-05-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>35</td><td>0100021527831666</td><td>29-06-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>36</td><td>0100021527831699</td><td>27-07-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>37</td><td>0100031563258510</td><td>31-08-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>38</td><td>0100021527831769</td><td>18-08-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>39</td><td>0100031563258534</td><td>09-09-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>40</td><td>0100031563258597</td><td>28-09-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>41</td><td>0100031563258695</td><td>30-10-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr><tr><td>42</td><td>0100031563258742</td><td>13-11-2015</td><td>1 set</td><td colspan="2">Asli</td></tr></table>						I.	Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2014						Nomor FP	Tanggal	Jumlah	Ket		1	0100021409996552	03-07-2014	1 set	Asli		2	0100021409996586	17-07-2014	1 set	Asli		3	0100021409996596	23-07-2014	1 set	Asli		4	0100021409996620	19-08-2014	1 set	Asli		5	0100021409996716	29-09-2014	1 set	Asli		6	0100021409996717	29-09-2014	1 set	Asli		7	0100021409996701	19-09-2014	1 set	Asli		8	0100021409996724	29-09-2014	1 set	Asli		9	0100031425788219	30-09-2014	1 set	Asli		10	0100021409996656	02-09-2014	1 set	Asli		11	0100021409996674	09-09-2014	1 set	Asli		12	0100021409996678	10-09-2014	1 set	Asli		13	0100031425788275	27-10-2014	1 set	Asli		14	0100031425788244	16-10-2014	1 set	Asli		15	0100031425788245	16-10-2014	1 set	Asli		16	0100031425788318	20-11-2014	1 set	Asli		17	0100031425788344	28-11-2014	1 set	Asli		18	0100031425788356	28-11-2014	1 set	Asli		19	0100031425788332	25-11-2014	1 set	Asli		20	0100031496644861	29-12-2014	1 set	Asli		21	0100031496644860	29-12-2014	1 set	Asli		22	0100031496644885	30-12-2014	1 set	Asli			II. Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2015						Nomor FP	Tanggal	Jumlah	Ket.		23	0100001551855400	12-01-2015	1 set	Asli		24	0100001551855462	05-02-2015	1 set	Asli		25	0100001551855515	26-02-2015	1 set	Asli		26	0100001551855577	27-03-2015	1 set	Asli		27	0100001551855552	18-03-2015	1 set	Asli		28	0100001551855643	28-04-2015	1 set	Asli		29	0100001551855655	30-04-2015	1 set	Asli		30	0100001551855608	07-04-2015	1 set	Asli		31	0100001551855613	09-04-2015	1 set	Asli		32	0100021527831598	29-05-2015	1 set	Asli		33	0100021527831555	22-05-2015	1 set	Asli		34	0100021527831538	19-05-2015	1 set	Asli		35	0100021527831666	29-06-2015	1 set	Asli		36	0100021527831699	27-07-2015	1 set	Asli		37	0100031563258510	31-08-2015	1 set	Asli		38	0100021527831769	18-08-2015	1 set	Asli		39	0100031563258534	09-09-2015	1 set	Asli		40	0100031563258597	28-09-2015	1 set	Asli		41	0100031563258695	30-10-2015	1 set	Asli		42	0100031563258742	13-11-2015	1 set	Asli		SALMIN H Karyawan PT BUMI SARANA BETON
I.	Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2014																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Nomor FP	Tanggal	Jumlah	Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	0100021409996552	03-07-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	0100021409996586	17-07-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3	0100021409996596	23-07-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4	0100021409996620	19-08-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5	0100021409996716	29-09-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6	0100021409996717	29-09-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
7	0100021409996701	19-09-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8	0100021409996724	29-09-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
9	0100031425788219	30-09-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10	0100021409996656	02-09-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11	0100021409996674	09-09-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12	0100021409996678	10-09-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13	0100031425788275	27-10-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14	0100031425788244	16-10-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
15	0100031425788245	16-10-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16	0100031425788318	20-11-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17	0100031425788344	28-11-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18	0100031425788356	28-11-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19	0100031425788332	25-11-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20	0100031496644861	29-12-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
21	0100031496644860	29-12-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	0100031496644885	30-12-2014	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	II. Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Nomor FP	Tanggal	Jumlah	Ket.																																																																																																																																																																																																																																																																																							
23	0100001551855400	12-01-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
24	0100001551855462	05-02-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
25	0100001551855515	26-02-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
26	0100001551855577	27-03-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
27	0100001551855552	18-03-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
28	0100001551855643	28-04-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
29	0100001551855655	30-04-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
30	0100001551855608	07-04-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
31	0100001551855613	09-04-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
32	0100021527831598	29-05-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
33	0100021527831555	22-05-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
34	0100021527831538	19-05-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
35	0100021527831666	29-06-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
36	0100021527831699	27-07-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
37	0100031563258510	31-08-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
38	0100021527831769	18-08-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
39	0100031563258534	09-09-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
40	0100031563258597	28-09-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
41	0100031563258695	30-10-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
42	0100031563258742	13-11-2015	1 set	Asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
q.	Faktur Pajak dan Lampirannya : <table><tr><td>I.</td><td colspan="4">Masa Januari s.d. Desember 2014</td></tr><tr><td></td><td>Nomor Faktur Pajak</td><td>Tanggal</td><td>Jumlah</td><td>Ket.</td></tr><tr><td>1</td><td>0100021487053628</td><td>13-09-2014</td><td>1 set</td><td>asli</td></tr><tr><td>2</td><td>0100031433163634</td><td>30-10-2014</td><td>1 set</td><td>asli</td></tr><tr><td>3</td><td>0100021487054198</td><td>17-10-2014</td><td>1 set</td><td>asli</td></tr><tr><td>4</td><td>0100031433163866</td><td>29-11-2014</td><td>1 set</td><td>asli</td></tr></table>					I.	Masa Januari s.d. Desember 2014					Nomor Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Ket.	1	0100021487053628	13-09-2014	1 set	asli	2	0100031433163634	30-10-2014	1 set	asli	3	0100021487054198	17-10-2014	1 set	asli	4	0100031433163866	29-11-2014	1 set	asli	ALAN JEFRI Karyawan PT CATUR KENCANA SAKTI																																																																																																																																																																																																																																																							
I.	Masa Januari s.d. Desember 2014																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Nomor Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Ket.																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	0100021487053628	13-09-2014	1 set	asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	0100031433163634	30-10-2014	1 set	asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3	0100021487054198	17-10-2014	1 set	asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4	0100031433163866	29-11-2014	1 set	asli																																																																																																																																																																																																																																																																																							



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	0100031433163758	15-11-2014	1 set	asli
	6	0100031433163650	01-11-2014	1 set	asli
	7	0100031433163859	28-11-2014	1 set	asli
	8	0100031433163744	13-11-2014	1 set	asli
	9	0100031433163948	10-12-2014	1 set	asli
	10	0100031433164032	20-12-2014	1 set	asli
	11	0100031433164003	17-12-2014	1 set	asli
	II. Masa Januari s.d. Desember 2015				
		Nomor Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Ket.
	12	0100001582226070	31-01-2015	1 set	asli
	13	0100001582225937	12-01-2015	1 set	asli
	14	0100001582225955	15-01-2015	1 set	asli
	15	0100001582226503	07-02-2015	1 set	asli
	16	0100001582226531	14-02-2015	1 set	asli
	17	0100001582226627	07-03-2015	1 set	asli
	18	0100001582226753	30-03-2015	1 set	asli
	19	0100001582226706	20-03-2015	1 set	asli
	20	0100001582226712	23-03-2015	1 set	asli
	21	0100001582226820	10-04-2015	1 set	asli
	22	0100001582226832	13-04-2015	1 set	asli
	23	0100001582226890	25-04-2015	1 set	asli
	24	0100011559709702	15-05-2015	1 set	asli
	25	0100011559709764	30-05-2015	1 set	asli
	26	0100011559709717	19-05-2015	1 set	asli
	27	0100011559709739	23-05-2015	1 set	asli
	28	0100011559709825	15-06-2015	1 set	asli
	29	0100011559709889	30-06-2015	1 set	asli
	30	0100011559709804	10-06-2015	1 set	asli
	31	0100011559709779	04-06-2015	1 set	asli
	32	0100011559709880	27-06-2015	1 set	asli
	33	0100011559710063	23-07-2015	1 set	asli
	34	0100011559710006	04-07-2015	1 set	asli
	35	0100011559710280	27-08-2015	1 set	asli
	36	0100011559710236	13-08-2015	1 set	asli
	37	0100011559710212	06-08-2015	1 set	asli
	38	0100031579144306	29-09-2015	1 set	asli
	39	0100031579144225	20-09-2015	1 set	asli
	40	0100031579144200	15-09-2015	1 set	asli
	41	0100031579144388	05-10-2015	1 set	asli
	42	0100031579144566	28-10-2015	1 set	asli
	43	0100031579144650	03-11-2015	1 set	asli
r.	No.	Jenis Dokumen Yang Disita			Banyaknya
	1.	A/R Customer Tansactions (ARCTRN01) tanggal 11/06/2019 pukul 10:38:42			1 set
	2.	Invoice, Faktur Pajak, Delivery Docket, Purchace Order			9 set
	3.	Rekap setoran dari PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI senilai Rp. 496.460.000 dan lampiran rekening koran no 0182719003			1 set
	4.	Faktur Pajak No. 010.000-15.97740055 dengan DPP PPN senilai Rp. 4.772.727			1 set
S.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	
	1	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854868	1 set		
	2	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854563	1 set		
	3	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54853976	1 set		
	4	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54853975	1 set		
	5	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854857	1 set		
	6	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54855566	1 set		
	7	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54856533	1 set		
	ANDRI IRAWAN, SE Finance Manager PT MONIER				
	RUDYANTO Direktur PT KEPUH KENCANA ARUM				

Halaman 110 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



	8	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54860823	1 set		
	9	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54860856	1 set		
	10	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54863593	1 set		
	11	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54865020	1 set		
	12	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48566424	1 set		
	13	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48566163	1 set		
	14	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48565209	1 set		
	15	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48565173	1 set		
	16	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48564937	1 set		
	17	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48575431	1 set		
	18	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48578082	1 set		
	19	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788408	1 set		
	20	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30787208	1 set		
	21	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30786587	1 set		
	22	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788058	1 set		
	23	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30789104	1 set		
	24	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788825	1 set		
	25	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30790390	1 set		
	26	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30792241	1 set		
	27	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30791214	1 set		
	28	Daftar Faktur Pajak dari PT KEPUH KENCANA ARUM	3 Lembar		
t.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	<b>MARKUS YAN RAHARJO,</b> Accounting Manager PT SURYA PERTIWI
	1	Rekap Invoice dan Surat Jalan kepada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 set	Asli	
	2	Invoice dan Surat Jalan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 set	Asli	
	3	Faktur Pajak Kepada PT AYARO MULYA KOSNTRUKSI	16 lembar	Asli	
u.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	<b>AGUS PURWO SANTOSO</b> Branch Operation Service Manager Bank CIMB NIAGA KC Malang Basuki Rakhmad
	1	Aplikasi Pembukaan Rekening & Electronic Banking CIMB NIAGA	6 lembar	Fotokopi dan sudah dilegalisasi	
	2	Print Out Mutasi Bank periode mutasi 15 Juni s/d Desember 2015 bank CIMB NIAGA	3 lembar	Asli	
	3	Salinan Akta No: 01 tanggal 06-01-2015 Notaris HILDA,S.H., M.M., M.Kn. mengenai : Penjualan Saham Perubahan Susunan Direksi	9 lembar	Fotokopi	
	4	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI Nomor 22 tanggal 27 September 2007 Notaris ANIEK YULAICHAH, S.H.	9 lembar	Fotokopi	
	5	Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama Bandung Cicadas No. Pem-2893/WPJ.09/KP.0303/2009 tanggal 02 September 2019 atas nama DINA MARANETTA	1 lembar	Fotokopi	
	6	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 230815201244 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 lembar	Fotokopi	
	7	Surat Keterangan Terdaftar dari No. Pem-	1 lembar	Fotokopi	



		0004118ER/WPJ.12/KP.0103/2007 tanggal 10 Oktober 2007 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI			
	8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 517/19/35.73.311/2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 lembar	Fotokopi	
v.	3.	Fotokopi Akte Nomor : 27 tanggal 24 Maret 2009 tentang Berita Acara Rapat umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8- 623.000;			<b>CHUSEN BISRI, SH, M.Kn</b> Notaris di Malang.
	4.	Fotokopi Akte Nomor : 28 tanggal 24 Maret 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000;			
w.	-	Copy Legalisir Minuta Nomor : 34 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Perubahan Susunan Pengurus dan Pengalihan Saham a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000			<b>GALUH EVA PURNAMA, SH, M.Kn</b> Notaris di Malang.
x.	3.	Salinan Akte Nomor : 04 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rapat umum Luar Biasa para Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI berkedudukan di Kota Malang;			<b>SRI HENDROWA TI, SH, M.Kn</b> Notaris di Malang.
	4.	Salinan Akte Nomor : 05, tanggal 15 Juli 2010 tentang Jual Beli Saham pada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI berkedudukan di Kota Malang;			

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Komisaris PT Ayaro Mulya Konstruksi berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 Tahun 2007, bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi dan leveransir serta terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 10 Oktober 2007 dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 7 Januari 2008 di KPP Pratama Malang Selatan dengan NPWP 21.014.497.8-632.000 pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan September 2015;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 dan 2015 berperan aktif sebagai wajib pajak PT Ayaro Mulya Konstruksi;
- Bahwa untuk membayar pajak, Terdakwa memerintahkan karyawannya bernama Mita Andila untuk menghitung, mengisi dan melaporkan SPT Masa PPn ke KPP Pratama Malang Selatan;
- Bahwa dari keterangan Randolph Latumahina, Direktur PT Rancang Komunika Mandiri, menerangkan bahwa pada tahun 2014-2015 ada transaksi usaha/mengadakan perjanjian dengan PT Ayaro Mulya Konstruksi;
- Bahwa nilai proyek yang diperjanjikan adalah sebesar Rp27.388.800.000 dengan nilai PPn sebesar Rp2.738.880.000,00, bahwa PPn tersebut telah dibayarkan oleh PT Rancang Komunika Mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3) Nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 beserta lampiran ditandatangani dan diberikan paraf oleh Sdr. Eko Budi Sulistiyo dan Sdr. Martha A.L. Marpaung bertindak selaku Kuasa Direksi PT Rancang Komunika Mandiri dan Sdr. Agus Budianto bertindak selaku Direktur PT Ayaro Mulya Konstruksi;
- Bahwa surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3) Nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 beserta lampiran ditandatangani dan diberikan paraf oleh Sdr. Eko Budi Sulistiyo dan Sdr. Djajadi bertindak selaku Kuasa Direksi PT Rancang Komunika Mandiri dan Sdr. Agus Budianto bertindak selaku Direktur PT Ayaro Mulya Konstruksi;
- Bahwa proyek konstruksi sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 29 (dua puluh sembilan) unit Pembangunan Perumahan Double Decker Phase 1, Waterfront City Pavilion Residen, Makasar hanya dapat diselesaikan sebagian sehingga nilai yang dibayarkan kepada PT Ayaro Mulya Konstruksi sebesar Rp18.406.697.200;
- Bahwa proyek konstruksi sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 2 (dua) unit Pembangunan Perumahan Double Decker Spesial Type Fase 1, proyek Waterfont City Pavilion Residen, Makasar juga hanya dapat diselesaikan sebagian sehingga nilai yang dibayarkan kepada PT Ayaro Mulya Konstruksi adalah sebesar Rp661.676.361;
- Bahwa realisasi pembayaran dari PT Rancang Komunika Mandiri kepada PT Ayaro Mulya Konstruksi pada tahun pajak 2014 adalah sebesar Rp10.632.160.980;
- Bahwa realisasi pembayaran dari PT Rancang Komunika Mandiri kepada PT Ayaro Mulya Konstruksi pada tahun pajak 2015 adalah sebesar Rp9.634.707.887;
- Bahwa pembayaran PT Rancang Komunika Mandiri kepada PT Ayaro Mulya Konstruksi pada tahun 2014 dan 2015 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan saat dilakukan realisasi pembayaran terlebih dahulu dipotong dengan PPh final atas jasa konstruksi;
- Bahwa realisasi pembayaran dari PT Rancang Komunika Mandiri kepada PT Ayaro Mulya Konstruksi melalui rekening tahun pajak 2014 dan 2015 dengan perincian:

Halaman 113 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Rekening 2830694555, pada Bank Central Asia KCP Bandung Ujung Berung a.n. Agus Budianto;
  2. Nomor Rekening 0280100015199, pada Bank CIMB Niaga KCP Bandung Buah Batu a.n. PT Ayaro Mulya Konstruksi;
  3. Nomor Rekening 2830393211, pada Bank Central Asia KC AH Nasution Bandung a.n. Dina Maranetta;
- Bahwa PT Rancang Komunika Mandiri menghentikan kontrak dengan PT Ayaro Mulya Konstruksi pada Desember 2015, dengan alasan:
    1. Performancenya kami rasakan kurang dikarenakan progress pekerjaan yang lambat;
    2. Sering lalai melakukan pembayaran kepada supplier;
    3. Lalai menyetor pajak. Hal ini kami ketahui sesudah kami mendapat surat resmi dari Kantor Pelayanan Pajak dikarenakan PT Ayaro Mulya Konstruksi tidak melakukan kewajiban pajaknya;
  - Bahwa Terdakwa mengaku belum menyetorkan PPn yang telah dipungut dari PT Rancang Komunika Mandiri karena pembayaran dari PT Rancang Komunika Mandiri terlambat sehingga PPn yang telah Terdakwa terima dipakai untuk menutup biaya operasional. Alasan karena untuk tagihan-tagihan Juli s.d. Desember 2015 tagihan Terdakwa kepada PT RKM termasuk di dalamnya PPn digunakan untuk membayar supplier, sehingga Terdakwa tidak punya kesempatan memegang uang tersebut yang mengakibatkan Terdakwa tidak sanggup menyetorkan PPn yang telah Terdakwa pungut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Yulianto selaku Account Representative KPP Pratama Malang Selatan, saksi telah mengirimkan surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) agar Wajib Pajak (PT Ayaro) segera melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan:
    - 1.S-6032/WPJ.12/KP.14/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan terkait kewajiban perpajakan pelaporan tahun 2014 yaitu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 ;
    2. S-6033/WPJ.12/KP.14/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait kewajiban perpajakan pelaporan tahun pajak 2015 yaitu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan pelaporan SPT masa PPn;
  - Bahwa surat himbauan tersebut sudah saksi sampaikan melalui jasa ekspedisi, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan wajib pajak tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi baik secara langsung

Halaman 114 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke KPP Pratama Malang Selatan atau tanggapan tertulis atas surat himbauan tersebut sehingga tidak dibuatkan Berita Acara Konseling;
- Bahwa sekitar akhir November 2015, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon menyampaikan bahwa PT Ayaro mengalami kesulitan likuiditas karena pembayaran termin pengerjaan proyek belum dilakukan oleh pemberi kerja yaitu PT RKM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan kombinasi kumulatif alternatif sebagai berikut:

**KESATU:** Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**DAN**

**KEDUA**

Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Halaman 115 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU KETIGA

Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif, walaupun dakwaan berlapis, apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini, berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis memilih dakwaan ketiga yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Halaman 116 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur dari pasal dakwaan ketiga;

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang *a quo* orang perseorangan atau korporasi. Orang dalam hal ini adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban, menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi sebagaimana dimaksud undang-undang *a quo*. Orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan seorang bernama Agus Budianto, dan Majelis telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan BAP Penyidik Kepolisian, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab, Majelis menilai pada:

**Keadaan jiwa Terdakwa:** tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, tidak terganggu karena terkejut/hipnotis/amarah meluap-luap atau dengan kata lain dalam keadaan sadar;

**Keadaan kemampuan jiwanya:** Terdakwa dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana kriteria di atas, sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi oleh diri Terdakwa, mengenai bersalah tidaknya Terdakwa masih harus mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

**Ad. 2. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;**

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan yang biasa dipakai dalam tindak pidana, adalah pengertian kesengajaan yang diambil dari *Memorie van Toelichting*, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Dengan kata lain, pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Sedangkan, pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga, ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian arti dari tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah tidak menyerahkan pada negara pungutan yang telah diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, dengan adanya kata 'dapat' dalam frasa 'dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara', mengandung makna bahwa tidak perlu ada kerugian secara nyata tetapi cukup adanya potensi kerugian sudah dapat dijerat dengan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti:

- Bahwa Terdakwa adalah Komisaris PT Ayaro Mulya Konstruksi berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 Tahun 2007, bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi dan leveransir serta terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 10 Oktober 2007 dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 7 Januari 2008 di KPP Pratama Malang Selatan dengan NPWP 21.014.497.8-632.000;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 dan 2015 berperan aktif sebagai wajib pajak PT Ayaro Mulya Konstruksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan kewajibannya untuk membayar Ppn atas pelaksanaan kontrak kerjanya;
- Bahwa dari keterangan Randolph Latumahina, Direktur PT Rancang Komunika Mandiri, menerangkan pada tahun 2014-2015 ada transaksi usaha atau mengadakan perjanjian dengan PT Ayaro Mulya Konstruksi;

Halaman 118 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai proyek yang diperjanjikan adalah sebesar Rp27.388.800.000 dengan nilai PPn sebesar Rp2.738.880.000,00, bahwa PPn tersebut telah dibayarkan oleh PT Rancang Komunika Mandiri dengan cara transfer bersamaan dengan harga transaksi;
- Bahwa bukti adanya perjanjian antara PT Ayaro dengan PT Rancang Komunika yaitu surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3) Nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 beserta lampiran ditandatangani dan diberikan paraf oleh Sdr. Eko Budi Sulistiyo dan Sdr. Martha A.L. Marpaung bertindak selaku Kuasa Direksi PT Rancang Komunika Mandiri dan Sdr. Agus Budianto bertindak selaku Direktur PT Ayaro Mulya Konstruksi dan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3) Nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 beserta lampiran ditandatangani dan diberikan paraf oleh Sdr. Eko Budi Sulistiyo dan Sdr. Djajadi bertindak selaku Kuasa Direksi PT Rancang Komunika Mandiri dan Sdr. Agus Budianto bertindak selaku Direktur PT Ayaro Mulya Konstruksi;
- Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor 0011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 29 (dua puluh sembilan) unit Pembangunan Perumahan Double Decker Phase 1, Waterfont City Pavilion Residen, Makasar hanya dapat diselesaikan sebagian sehingga nilai yang dibayarkan kepada PT Ayaro Mulya Konstruksi sebesar Rp18.406.697.200;
- Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor 0028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014 beserta lampiran, untuk pekerjaan 2 (dua) unit Pembangunan Perumahan Double Decker Spesial Type Fase 1, proyek Waterfont City Pavilion Residen, Makasar juga hanya dapat diselesaikan sebagian sehingga nilai yang dibayarkan kepada PT Ayaro Mulya Konstruksi adalah sebesar Rp661.676.361;
- Bahwa realisasi pembayaran dari PT Rancang Komunika Mandiri kepada PT Ayaro Mulya Konstruksi pada tahun pajak 2014 adalah sebesar Rp10.632.160.980;
- Bahwa realisasi pembayaran dari PT Rancang Komunika Mandiri kepada PT Ayaro Mulya Konstruksi pada tahun pajak 2015 adalah sebesar Rp9.634.707.887;
- Bahwa pembayaran PT Rancang Komunika Mandiri kepada PT Ayaro Mulya Konstruksi pada tahun 2014 dan 2015 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan saat dilakukan realisasi pembayaran terlebih dahulu dipotong dengan PPh final atas jasa konstruksi;

Halaman 119 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Yulianto sebagai Seksi Pengawasan dan Konsultasi III di KPP Pratama Malang Selatan, berdasarkan master file pada aplikasi portal DJP, wajib pajak a.n. PT Ayaro mempunyai kegiatan usaha konstruksi gedung perkantoran dengan akta pendirian Nomor 4 tanggal 15 Juli 2010 di Notaris Sri Hendrowati, S.H., M.Kn berkedudukan di Kab. Malang, sedangkan berdasarkan hasil visit yang pernah dilakukan oleh Saksi Eko Yulianto kegiatan usaha PT Ayaro tidak dapat dijelaskan karena pada alamat wajib pajak hanya terdapat bangunan rumah tinggal tanpa penghuni dan telah berganti kepemilikan beberapa kali. Namun, pada sekitar Juli s.d. Agustus 2015, pada saat wajib pajak berkonsultasi di KPP Pratama Malang Selatan, saksi mendapatkan informasi bahwa kegiatan usaha wajib pajak adalah kegiatan konstruksi bangunan. Terdakwa waktu itu mengaku sebagai penanggung jawab PT Ayaro;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada tahun 2014 dan 2015 wajib pajak mendapatkan proyek konstruksi pembangunan perumahan elit dari PT Rancang Komunika Mandiri dengan lokasi proyek di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar;
- Bahwa pelaporan SPT PPn periode Januari s.d. Desember 2014 yaitu sebagai berikut:

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	01-Jan	Normal	<a href="#">S-01021361/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
2	03-Mar	Normal	<a href="#">S-01021360/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
3	04-Apr	Normal	<a href="#">S-01021359/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/05/2014
4	05-May	Normal	<a href="#">S-01026010/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	130,096,800	27/06/2014
5	06-Jun	Normal	<a href="#">S-01033332/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	130,096,800	21/08/2014
6	07-Jul	Normal	<a href="#">S-01033331/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2014</a>	Nihil	21/08/2014
7	08-Aug	Normal	<a href="#">S-01004271/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
8	09-Sep	Normal	<a href="#">S-01004273/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
9	10-Oct	Normal	<a href="#">S-01004274/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
10	11-Nov	Normal	<a href="#">S-01004275/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015
11	12-Dec	Normal	<a href="#">S-01004276/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	04/02/2015

- Bahwa pelaporan SPT PPn, periode Januari s.d. Desember 2015 sebagai berikut:

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	Januari	Normal	<a href="#">S-01030840/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
2	Pebruari	Normal	<a href="#">S-01030842/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
3	Maret	Normal	<a href="#">S-01030843/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
4	April	Normal	<a href="#">S-01030844/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	Nihil	13/08/2015
5	Mei	Normal	<a href="#">S-01030845/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	38,768,846	13/08/2015
6	Juni	Normal	<a href="#">S-01030846/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	58,803,753	13/08/2015
7	Juli	Normal	<a href="#">S-01043153/PPN1111/WPJ.12/KP.1403/2015</a>	69,992,078	12/11/2015

Halaman 120 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Agustus		Tidak Lapor		
9	September		Tidak Lapor		
10	Oktober		Tidak Lapor		
11	Nopember		Tidak Lapor		
12	Desember		Tidak Lapor		

- Bahwa berdasarkan data pada aplikasi internal DJP, pembayaran PPn PT Ayaro pad periode Januari s.d. Desember 2014 sebagai berikut:

No.	Masa	Tanggal Setor	Nilai Setoran (Rp)	NTPN
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	130.096.800	1412140101120910
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	130.096.800	1302030605130314
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	Nopember	-	-	-
12	Desember	-	-	-
Jumlah setoran PPn Januari s.d. Desember 2014			260.193.600	

- Bahwa untuk penyetoran PPn masa Januari s.d. Desember 2015, sebagai berikut:

No.	Masa	Tanggal Setor	Nilai Setoran (Rp)	NTPN
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	12-Agst-15	38.768.846	1508061012060309
6	Juni	12-Agst-15	58.803.754	1113051513090309
7	Juli	19-Okt-15	69.992.078	1502081408121003
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	Nopember	-	-	-
12	Desember	-	-	-
Jumlah setoran PPn Januari s.d. Desember 2015			167.564.677	

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyampaikan SPT masa Agustus s.d September 2015, menyampaikan SPT masa PPn yang isinya tidak lengkap pada masa Agustus s.d. Desember 2014 dan masa Januari s.d. Juli 2014, masa Januari s.d. Juli 2015, jumlah pajak yang kurang bayar Rp855.673.649;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mita Andila mengaku ia yang mengisi kolom identitas halaman induk dan lampiran SPT 1771 sedangkan kolom yang lainnya diisi sendiri oleh Terdakwa, saksi juga membayarkan pajak PT Ayaro berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juni 2014;  
Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah pembayaran yang dilakukan oleh saksi Mita Andila pada bank merupakan perbuatan yang sah?  
Menimbang, bahwa atas peristiwa hukum tersebut, terdapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa bank menerima setoran PPn yang dilakukan oleh saksi Mita Andila, dan kemudian saksi Mita Andila melakukan pelaporan pada KPP Pratama dan diterima;
  - Bahwa menurut Ahli I Gede Arianta, orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Menimbang, bahwa pendapat Ahli tersebut Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis, dan Majelis berpendapat oleh karena tidak ada masalah pada KPP Pratama atas penyetoran yang dilakukan oleh Mita Andila yang bukan pengurus PT Ayaro, maka tidak menimbulkan persoalan hukum, yang menjadi persoalan hukum hanyalah kewajiban penyetoran yang belum disetorkan oleh Terdakwa yaitu PPn masa Agustus s.d. Desember 2014 dan Agustus s.d. September 2015;  
Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan PPn masa Agustus s.d. Desember 2014 dan Agustus s.d. September 2015 sebelumnya telah mendapat pemberitahuan dari KPP Pratama Malang Selatan, dan Terdakwa telah diberi waktu untuk melunasi namun tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena PT Rancang Komunika Mandiri menghentikan kontraknya;  
Menimbang, bahwa masalah mismanajemen keuangan PT Ayaro menurut pendapat Majelis bukanlah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, karena Terdakwa sendiri juga tidak segera melaporkannya ke KPP Pratama, dan PT Ayaro secara hukum masih diakui keberadaannya hingga saat ini;  
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya menyatakan Terdakwa telah memerintahkan saksi Mita untuk melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut telah diterima dan tidak ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak;  
Menimbang, bahwa Majelis telah sependapat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 122 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan mengenai kontrak kerja Terdakwa telah diputus sepihak oleh PT RKM dan pembayaran termin diputus, terhadap hal ini Majelis telah mengemukakan pendapat sebagaimana di atas, bahwa masalah mismanajemen keuangan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengelak dari kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan penghitungan kerugian pendapatan Negara oleh Ahli Arief Sultony (Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara), besarnya PPN yang tidak disetorkan ke negara oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sejumlah Rp 855,673,639,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disebut juga perbuatan berlanjut yaitu gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., syarat untuk dapat dikatakan perbuatan berlanjut yaitu:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama".

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak melakukan penyetoran PPN yang telah dipungut dari pengguna jasa PT Ayaro pada masa Agustus s.d. Desember 2014 dan Agustus s.d. September 2015 dengan alasan terjadi mismanajemen keuangan di PT Ayaro, dimana uang yang diterima dari pengguna jasa PT Ayaro digunakan untuk melunasi tagihan supplier, sehingga Terdakwa memang berniat untuk memprioritaskan membayar supplier daripada menyetorkan pajak kepada negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat untuk terpenuhinya perbuatan berlanjut telah terpenuhi yaitu:

1. niat tunggal untuk melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut;
2. deliknya sejenis tidak menyetorkan pajak
3. tenggang waktu pada masa Agustus s.d. Desember 2014 dan Agustus s.d. September 2015, tenggang ini tidak dalam rentang waktu yang jauh;

Halaman 123 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonan secara tertulis di persidangan yang telah Majelis pertimbangan ketika menguraikan unsur-unsur, namun mengenai pembelaan Penasihat Hukum yaitu Terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal ini, namun tanpa argumen hukum yang jelas, maka Majelis menolak pembelaan tersebut. Di sisi lain Terdakwa telah mengakui kesalahannya dalam pembelaannya dan mohon keringanan hukuman, demikian juga Penasihat Hukum memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis tidak akan menganalisa nota pembelaan Penasihat Hukum lebih jauh demikian juga pembelaan Terdakwa, namun Majelis tetap memperhatikan permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam hal penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari pasal dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan, dalam amar tuntutan terdapat kalimat "jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis mempertimbangkan oleh karena dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak disebutkan mengenai penyitaan harta benda Terdakwa untuk dilelang guna membayar denda, maka Majelis tidak akan menjatuhkan pidana penyitaan harta benda Terdakwa, namun akan tetap menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 124 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

No	Nama Barang Bukti				Disita dari			
y.	No.	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan	EKO YULIANTO selaku selaku Account Representati ve KPP Pratama Malang Selatan			
	1.	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor : S-6032/WPJ.12/KP.14/2015, tanggal 12 Nopember 2015;	Satu set	Asli				
	2.	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor : S-6033/WPJ.12/KP.14/2015, tanggal 12 Nopember 2015;	Satu set	Asli				
	3.	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (VISIT), Nomor : LAP-436/WPJ.12/KP1409/2016, tanggal 24 Mei 2016;	Satu set	Asli				
	4.	Profil Wajib Pajak a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000.	Satu set	Asli				
Z.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	ERLIK ONO selaku Kasi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan			
	1	SPT Tahunan 1771 Tahun 2014	1 set					
	2	SPT Masa PPN Januari 2015	1 set					
	3	SPT Masa PPN Pebruari 2015	1 set					
	4	SPT Masa PPN Maret 2015	1 set					
	5	SPT Masa PPN April 2015	1 set					
	6	SPT Masa PPN Mei 2015	1 set					
	7	SPT Masa PPN Juni 2015	1 set					
	8	SPT Masa PPN Juli 2015	1 set					
	9	SPT Masa PPN Agustus 2014	1 set					
	10	SPT Masa PPN September 2014	1 set					
	11	SPT Masa PPN Oktober 2014	1 set					
	12	SPT Masa PPN Nopember 2014	1 set					
	13	SPT Masa PPN Desember 2014	1 set					
aa.	I.	FAKTUR PAJAK		DPP	PPN	Jumla h	Ket.	RANDOLPH LATUMAHINA Direktur PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI
		Nomor FP	Tanggal					
	1	010.002-14.05980595	1-Jun-14	1.300.96 8.000	130.096 .800	satu lembar	Asli	
	2	010.002-14.05050596	24-Jun-14	1.300.96 8.000	130.096 .800	satu lembar	Asli	
	3	010.002-14.05050597	25-Aug-14	1.347.80 2.848	134.780 .285	satu lembar	Asli	
	4	010.002-14.05050598	25-Sep-14	1.277.55 0.576	127.755 .058	satu lembar	Asli	
	5	010.002-14.05050599	25-Oct-14	1.353.00 6.720	135.300 .672	satu lembar	Asli	
	6	010.002-14.05050600	25-Nov-14	1.691.25 8.400	169.125 .840	satu lembar	Asli	
	7	010.002-14.05050601	15-Dec-14	1.709.47 1.952	170.947 .195	satu lembar	Asli	
		Faktur Pajak Januari s.d. Desember 2014		9.981.026 .496	998.102 .650			
	8	010.001-15.10641740	25-Jan-15	1.636.61 7.744	163.661 .774	satu lembar	Asli	
	9	010.001-15.10641741	25-Feb-15	1.176.07 5.072	117.607 .507	satu lembar	Asli	
	10	010.001-15.10641742	27-Mar-15	1.790.13 1.968	179.013 .197	satu lembar	Asli	
	11	010.001-15.10641743	27-Apr-15	824.81 3.712	82.481 .371	satu lembar	Asli	
	12	010.001-15.10641743	2-Apr-15	150.26 9.927	15.026 .993	satu lembar	Asli	
	13	010.001-15.10641745	27-May-15	387.68 8.464	38.768 .846	satu lembar	Asli	
	14	010.001-15.10641746	27-May-15	190.83 0.590	19.083 .059	satu lembar	Asli	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15	010.001-15.10641747	29-Jun-15	588.03 7.536	58.803 .754	satu lembar	Asli
	16	010.001-15.10641748	30-Jun-15	106.28 8.485	10.628 .849	satu lembar	Asli
	17	010.001-15.10641749	31-Jul-15	699.92 0.784	69.992 .078	satu lembar	Asli
	18	010.001-15.10641750	31-Aug-15	840.42 5.328	84.042 .533	satu lembar	Asli
	19	011.001-15.10641751	30-Sep-15	214.28 7.359	21.428 .736	satu lembar	Asli
	20	011.001-15.10641752	30-Sep-15	483.96 0.096	48.396 .010	satu lembar	Asli
	Faktur Pajak Januari s.d. Desember 2015			9.089.34 7.065	908.934 .707		
II. INVOICE & DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN							
Invoice							
		Nomor	Tanggal	Nilai	Jumlah	Ket.	
	21	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IV/2014	25-Apr-14	1.431.064.800	satu set	Asli	
	22	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VI/2014	24-Jun-14	1.431.064.800	satu set	Asli	
	23	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VIII/2014.	25-Aug-14	1.482.583.133	satu set	Asli	
	24	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IX/2014	25-Sep-14	1.405.305.634	satu set	Asli	
	25	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/X/2014	25-Oct-14	1.488.307.392	satu set	Asli	
	26	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/XI/2014	25-Nov-14	1.860.384.240	satu set	Asli	
	27	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/XII/2014	15-Dec-14	1.880.419.147	satu set	Asli	
	28	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/I/2015	25-Jan-15	1.800.279.518	satu set	Asli	
	29	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/II/2015	25-Feb-15	1.293.682.579	satu set	Asli	
	30	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/III/2015	27-Mar-15	1.969.145.165	satu set	Asli	
	31	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IV/2015	27-Apr-15	907.295.083	satu set	Asli	
	32	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/III/2015	02-Apr-15	165.296.919	satu set	Asli	
	33	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/V/2015	27-May-15	426.457.310	satu set	Asli	
	34	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/VI/2015	27-May-15	209.913.649	satu set	Asli	
	35	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VI/2015	29-Jun-15	646.841.290	satu set	Asli	
	36	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/VI/2015	30-Jun-15	116.917.333	satu set	Asli	
	37	2D/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VII/2015	31-Jul-15	769.912.862	satu set	Asli	
	38	2D/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VIII/2015	31-Aug-15	924.467.861	satu set	Asli	
	39	2D/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/IX/2015	30-Sep-15	235.716.094	satu set	Asli	
	40	2D/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IX/2015	30-Sep-15	532.356.105	satu set	Asli	
	III SURAT PERJANJIAN KERJA						
		Nomor	Tanggal	Nilai	Jumlah	Ket.	
	41	011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/VI/2014	25-Apr-14	30.127.680.000	satu set	Asli	
	42	028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014	23-Oct-14	2.829.215.565	satu set	Asli	
bb.	I. Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2014						
		Nomor FP	Tanggal	Jumlah	Ket		
	1	0100021409996552	03-07-2014	1 set	Asli		
	2	0100021409996586	17-07-2014	1 set	Asli		
	3	0100021409996596	23-07-2014	1 set	Asli		
	4	0100021409996620	19-08-2014	1 set	Asli		
	5	0100021409996716	29-09-2014	1 set	Asli		
	6	0100021409996717	29-09-2014	1 set	Asli		
	7	0100021409996701	19-09-2014	1 set	Asli		
	8	0100021409996724	29-09-2014	1 set	Asli		
	9	0100031425788219	30-09-2014	1 set	Asli		
	10	0100021409996656	02-09-2014	1 set	Asli		
	11	0100021409996674	09-09-2014	1 set	Asli		
	12	0100021409996678	10-09-2014	1 set	Asli		
	SALMIN H Karyawan PT BUMI SARANA BETON						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13	0100031425788275	27-10-2014	1 set	Asli
	14	0100031425788244	16-10-2014	1 set	Asli
	15	0100031425788245	16-10-2014	1 set	Asli
	16	0100031425788318	20-11-2014	1 set	Asli
	17	0100031425788344	28-11-2014	1 set	Asli
	18	0100031425788356	28-11-2014	1 set	Asli
	19	0100031425788332	25-11-2014	1 set	Asli
	20	0100031496644861	29-12-2014	1 set	Asli
	21	0100031496644860	29-12-2014	1 set	Asli
	22	0100031496644885	30-12-2014	1 set	Asli
	<b>II. Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2015</b>				
		<b>Nomor FP</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
	23	0100001551855400	12-01-2015	1 set	Asli
	24	0100001551855462	05-02-2015	1 set	Asli
	25	0100001551855515	26-02-2015	1 set	Asli
	26	0100001551855577	27-03-2015	1 set	Asli
	27	0100001551855552	18-03-2015	1 set	Asli
	28	0100001551855643	28-04-2015	1 set	Asli
	29	0100001551855655	30-04-2015	1 set	Asli
	30	0100001551855608	07-04-2015	1 set	Asli
	31	0100001551855613	09-04-2015	1 set	Asli
	32	0100021527831598	29-05-2015	1 set	Asli
	33	0100021527831555	22-05-2015	1 set	Asli
	34	0100021527831538	19-05-2015	1 set	Asli
	35	0100021527831666	29-06-2015	1 set	Asli
	36	0100021527831699	27-07-2015	1 set	Asli
	37	0100031563258510	31-08-2015	1 set	Asli
	38	0100021527831769	18-08-2015	1 set	Asli
	39	0100031563258534	09-09-2015	1 set	Asli
	40	0100031563258597	28-09-2015	1 set	Asli
	41	0100031563258695	30-10-2015	1 set	Asli
	42	0100031563258742	13-11-2015	1 set	Asli
cc.	<b>Faktur Pajak dan Lampirannya :</b>				
	<b>I. Masa Januari s.d. Desember 2014</b>				
		<b>Nomor Faktur Pajak</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
	1	0100021487053628	13-09-2014	1 set	asli
	2	0100031433163634	30-10-2014	1 set	asli
	3	0100021487054198	17-10-2014	1 set	asli
	4	0100031433163866	29-11-2014	1 set	asli
	5	0100031433163758	15-11-2014	1 set	asli
	6	0100031433163650	01-11-2014	1 set	asli
	7	0100031433163859	28-11-2014	1 set	asli
	8	0100031433163744	13-11-2014	1 set	asli
	9	0100031433163948	10-12-2014	1 set	asli
	10	0100031433164032	20-12-2014	1 set	asli
	11	0100031433164003	17-12-2014	1 set	asli
	<b>II. Masa Januari s.d. Desember 2015</b>				
		<b>Nomor Faktur Pajak</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
	12	0100001582226070	31-01-2015	1 set	asli
	13	0100001582225937	12-01-2015	1 set	asli
	14	0100001582225955	15-01-2015	1 set	asli
	15	0100001582226503	07-02-2015	1 set	asli
	16	0100001582226531	14-02-2015	1 set	asli
	17	0100001582226627	07-03-2015	1 set	asli
	18	0100001582226753	30-03-2015	1 set	asli
	19	0100001582226706	20-03-2015	1 set	asli
	20	0100001582226712	23-03-2015	1 set	asli
	21	0100001582226820	10-04-2015	1 set	asli
	22	0100001582226832	13-04-2015	1 set	asli

**ALAN JEFRI**  
Karyawan PT  
CATUR  
KENCANA  
SAKTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23	0100001582226890	25-04-2015	1 set	asli	
	24	0100011559709702	15-05-2015	1 set	asli	
	25	0100011559709764	30-05-2015	1 set	asli	
	26	0100011559709717	19-05-2015	1 set	asli	
	27	0100011559709739	23-05-2015	1 set	asli	
	28	0100011559709825	15-06-2015	1 set	asli	
	29	0100011559709889	30-06-2015	1 set	asli	
	30	0100011559709804	10-06-2015	1 set	asli	
	31	0100011559709779	04-06-2015	1 set	asli	
	32	0100011559709880	27-06-2015	1 set	asli	
	33	0100011559710063	23-07-2015	1 set	asli	
	34	0100011559710006	04-07-2015	1 set	asli	
	35	0100011559710280	27-08-2015	1 set	asli	
	36	0100011559710236	13-08-2015	1 set	asli	
	37	0100011559710212	06-08-2015	1 set	asli	
	38	0100031579144306	29-09-2015	1 set	asli	
	39	0100031579144225	20-09-2015	1 set	asli	
	40	0100031579144200	15-09-2015	1 set	asli	
	41	0100031579144388	05-10-2015	1 set	asli	
	42	0100031579144566	28-10-2015	1 set	asli	
	43	0100031579144650	03-11-2015	1 set	asli	
dd.	No.	Jenis Dokumen Yang Disita			Banyaknya	ANDRI IRAWAN, SE Finance Manager PT MONIER
	1.	A/R Customer Tansactions (ARCTRN01) tanggal 11/06/2019 pukul 10:38:42			1 set	
	2.	Invoice, Faktur Pajak, Delivery Docket, Purchase Order			9 set	
	3.	Rekap setoran dari PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI senilai Rp. 496.460.000 dan lampiran rekening koran no 0182719003			1 set	
	4.	Faktur Pajak No. 010.000-15.97740055 dengan DPP PPN senilai Rp. 4.772.727			1 set	
ee.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan		RUDYANTO Direktur PT KEPUH KENCANA ARUM
	1	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854868	1 set			
	2	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854563	1 set			
	3	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54853976	1 set			
	4	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54853975	1 set			
	5	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854857	1 set			
	6	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54855566	1 set			
	7	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54856533	1 set			
	8	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54860823	1 set			
	9	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54860856	1 set			
	10	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54863593	1 set			
	11	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54865020	1 set			
	12	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48566424	1 set			
	13	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48566163	1 set			
	14	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48565209	1 set			
	15	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48565173	1 set			
	16	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48564937	1 set			
	17	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48575431	1 set			
	18	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48578082	1 set			
	19	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788408	1 set			
	20	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30787208	1 set			
	21	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30786587	1 set			
	22	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788058	1 set			
	23	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30789104	1 set			
	24	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788825	1 set			
	25	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30790390	1 set			

Halaman 128 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30792241	1 set		
	27	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30791214	1 set		
	28	Daftar Faktur Pajak dari PT KEPUH KENCANAARUM	3 Lembar		
ff.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	<b>MARKUS YAN RAHARJO,</b> Accounting Manager PT SURYA PERTIWI
	1	Rekap Invoice dan Surat Jalan kepada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 set	Asli	
	2	Invoice dan Surat Jalan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 set	Asli	
	3	Faktur Pajak Kepada PT AYARO MULYA KOSNTRUKSI	16 lembar	Asli	
gg.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	<b>AGUS PURWO SANTOSO</b> Branch Operation Service Manager Bank CIMB NIAGA KC Malang Basuki Rakhmad
	1	Aplikasi Pembukaan Rekening & Electronic Banking CIMB NIAGA	6 lembar	Fotokopi dan sudah dilegalisasi	
	2	Print Out Mutasi Bank periode mutasi 15 Juni s/d Desember 2015 bank CIMB NIAGA	3 lembar	Asli	
	3	Salinan Akta No: 01 tanggal 06-01-2015 Notaris HILDA,S.H., M.M., M.Kn. mengenai : Penjualan Saham Perubahan Susunan Direksi	9 lembar	Fotokopi	
	4	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI Nomor 22 tanggal 27 September 2007 Notaris ANIEK YULAICHAH, S.H.	9 lembar	Fotokopi	
	5	Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama Bandung Cicadas No. Pem-2893/WPJ.09/KP.0303/2009 tanggal 02 September 2019 atas nama DINA MARANETTA	1 lembar	Fotokopi	
	6	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 230815201244 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 lembar	Fotokopi	
	7	Surat Keterangan Terdaftar dari No. Pem-0004118ER/WPJ.12/KP.0103/2007 tanggal 10 Oktober 2007 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 lembar	Fotokopi	
	8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 517/19/35.73.311/2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 lembar	Fotokopi	
hh.	5.	Fotokopi Akte Nomor : 27 tanggal 24 Maret 2009 tentang Berita Acara Rapat umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000;			<b>CHUSEN BISRI, SH, M.Kn</b> Notaris di Malang.
	6.	Fotokopi Akte Nomor : 28 tanggal 24 Maret 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000;			
ii.	-	Copy Legalisir Minuta Nomor : 34 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Perubahan Susunan Pengurus dan Pengalihan Saham a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000			<b>GALUH EVA PURNAMA, SH, M.Kn</b> Notaris di Malang.

Halaman 129 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



jj.	5. Salinan Akte Nomor : 04 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rapat umum Luar Biasa para Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI berkedudukan di Kota Malang; 6. Salinan Akte Nomor : 05, tanggal 15 Juli 2010 tentang Jual Beli Saham pada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI berkedudukan di Kota Malang;	<b>SRI HENDROWA TI, SH, M.Kn</b> <i>Notaris di Malang.</i>
-----	---	---

Dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita melalui Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atastelah diubah dengan Undang Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Budianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.711.347.278 (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan

*Halaman 130 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:

No	Nama Barang Bukti				Disita dari
kk.	No.	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan	<b>EKO YULIANTO</b> selaku selaku Account Representative KPP Pratama Malang Selatan
	1.	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor : S-6032/WPJ.12/KP.14/2015, tanggal 12 Nopember 2015;	Satu set	Asli	
	2.	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor : S-6033/WPJ.12/KP.14/2015, tanggal 12 Nopember 2015;	Satu set	Asli	
	3.	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (VISIT), Nomor : LAP-436/WPJ.12/KP1409/2016, tanggal 24 Mei 2016;	Satu set	Asli	
	4.	Profil Wajib Pajak a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000.	Satu set	Asli	
II.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	<b>ERLIK ONO</b> selaku Kasi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan
	1	SPT Tahunan 1771 Tahun 2014	1 set		
	2	SPT Masa PPN Januari 2015	1 set		
	3	SPT Masa PPN Pebruari 2015	1 set		
	4	SPT Masa PPN Maret 2015	1 set		
	5	SPT Masa PPN April 2015	1 set		
	6	SPT Masa PPN Mei 2015	1 set		
	7	SPT Masa PPN Juni 2015	1 set		
	8	SPT Masa PPN Juli 2015	1 set		
	9	SPT Masa PPN Agustus 2014	1 set		
	10	SPT Masa PPN September 2014	1 set		
	11	SPT Masa PPN Oktober 2014	1 set		
	12	SPT Masa PPN Nopember 2014	1 set		
	13	SPT Masa PPN Desember 2014	1 set		
mm.	<b>FAKTUR PAJAK</b>				<b>RANDOLPH LATUMAHINA</b> Direktur PT RANCANG KOMUNIKA MANDIRI
	Nomor FP		Tanggal	DPP	
	1	010.002-14.05980595	1-Jun-14	1.300.968.000	
	2	010.002-14.05050596	24-Jun-14	1.300.968.000	
	3	010.002-14.05050597	25-Aug-14	1.347.802.848	
	4	010.002-14.05050598	25-Sep-14	1.277.550.576	
	5	010.002-14.05050599	25-Oct-14	1.353.006.720	
	6	010.002-14.05050600	25-Nov-14	1.691.258.400	
	7	010.002-14.05050601	15-Dec-14	1.709.471.952	
	Faktur Pajak Januari s.d. Desember 2014			9.981.026.496	
	8	010.001-15.10641740	25-Jan-15	1.636.617.744	
	9	010.001-15.10641741	25-Feb-15	1.176.075.072	
	10	010.001-15.10641742	27-Mar-15	1.790.131.968	
	11	010.001-15.10641743	27-Apr-15	824.813.712	
	12	010.001-15.10641743	2-Apr-15	150.269.927	
				130.096.800	
				130.096.800	
				134.780.285	
				127.755.058	
				135.300.672	
				169.125.840	
				170.947.195	
				163.661.774	
				117.607.507	
				179.013.197	
				82.481.371	
				15.026.993	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13	010.001-15.10641745	27-May-15	387.688.464	38.768.846	satu lembar	Asli
	14	010.001-15.10641746	27-May-15	190.830.590	19.083.059	satu lembar	Asli
	15	010.001-15.10641747	29-Jun-15	588.037.536	58.803.754	satu lembar	Asli
	16	010.001-15.10641748	30-Jun-15	106.288.485	10.628.849	satu lembar	Asli
	17	010.001-15.10641749	31-Jul-15	699.920.784	69.992.078	satu lembar	Asli
	18	010.001-15.10641750	31-Aug-15	840.425.328	84.042.533	satu lembar	Asli
	19	011.001-15.10641751	30-Sep-15	214.287.359	21.428.736	satu lembar	Asli
	20	011.001-15.10641752	30-Sep-15	483.960.096	48.396.010	satu lembar	Asli
		Faktur Pajak Januari s.d. Desember 2015		9.089.347.065	908.934.707		
	<b>II. INVOICE &amp; DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN</b>						
	<b>Invoice</b>						
		<b>Nomor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>	
	21	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IV/2014	25-Apr-14	1.431.064.800	satu set	Asli	
	22	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VI/2014	24-Jun-14	1.431.064.800	satu set	Asli	
	23	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VIII/2014	25-Aug-14	1.482.583.133	satu set	Asli	
	24	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IX/2014	25-Sep-14	1.405.305.634	satu set	Asli	
	25	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/X/2014	25-Oct-14	1.488.307.392	satu set	Asli	
	26	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/XI/2014	25-Nov-14	1.860.384.240	satu set	Asli	
	27	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/XII/2014	15-Des-14	1.880.419.147	satu set	Asli	
	28	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/I/2015	25-Jan-15	1.800.279.518	satu set	Asli	
	29	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/II/2015	25-Feb-15	1.293.682.579	satu set	Asli	
	30	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/III/2015	27-Mar-15	1.969.145.165	satu set	Asli	
	31	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IV/2015	27-Apr-15	907.295.083	satu set	Asli	
	32	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/III/2015	02-Apr-15	165.296.919	satu set	Asli	
	33	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/V/2015	27-May-15	426.457.310	satu set	Asli	
	34	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/IV/2015	27-May-15	209.913.649	satu set	Asli	
	35	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VI/2015	29-Jun-15	646.841.290	satu set	Asli	
	36	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/VI/2015	30-Jun-15	116.917.333	satu set	Asli	
	37	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VII/2015	31-Jul-15	769.912.862	satu set	Asli	
	38	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/VIII/2015	31-Aug-15	924.467.861	satu set	Asli	
	39	2d/KHS/BAKPP/PTRKM/AMK/IX/2015	30-Sep-15	235.716.094	satu set	Asli	
	40	2d/BAKPP/PTRKM/AMK-MLG/IX/2015	30-Sep-15	532.356.105	satu set	Asli	
	<b>III SURAT PERJANJIAN KERJA</b>						
		<b>Nomor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>	
	41	011.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/IV/2014	25-Apr-14	30.127.680.000	satu set	Asli	
	42	028.RI/SP3/PRY-RKM-MKS.13.189.02.HO/X/2014	23-Oct-14	2.829.215.565	satu set	Asli	
nn.	<b>I. Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2014</b>						
		<b>Nomor FP</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>		
	1	0100021409996552	03-07-2014	1 set	Asli		
	2	0100021409996586	17-07-2014	1 set	Asli		
	3	0100021409996596	23-07-2014	1 set	Asli		
	4	0100021409996620	19-08-2014	1 set	Asli		
	5	0100021409996716	29-09-2014	1 set	Asli		
	6	0100021409996717	29-09-2014	1 set	Asli		
	7	0100021409996701	19-09-2014	1 set	Asli		
	8	0100021409996724	29-09-2014	1 set	Asli		
	9	0100031425788219	30-09-2014	1 set	Asli		
	<b>SALMIN H Karyawan PT BUMI SARANA BETON</b>						

Halaman 132 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



	10	0100021409996656	02-09-2014	1 set	Asli
	11	0100021409996674	09-09-2014	1 set	Asli
	12	0100021409996678	10-09-2014	1 set	Asli
	13	0100031425788275	27-10-2014	1 set	Asli
	14	0100031425788244	16-10-2014	1 set	Asli
	15	0100031425788245	16-10-2014	1 set	Asli
	16	0100031425788318	20-11-2014	1 set	Asli
	17	0100031425788344	28-11-2014	1 set	Asli
	18	0100031425788356	28-11-2014	1 set	Asli
	19	0100031425788332	25-11-2014	1 set	Asli
	20	0100031496644861	29-12-2014	1 set	Asli
	21	0100031496644860	29-12-2014	1 set	Asli
	22	0100031496644885	30-12-2014	1 set	Asli
	<b>II. Faktur Pajak dan bukti pendukung tahun 2015</b>				
		<b>Nomor FP</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
	23	0100001551855400	12-01-2015	1 set	Asli
	24	0100001551855462	05-02-2015	1 set	Asli
	25	0100001551855515	26-02-2015	1 set	Asli
	26	0100001551855577	27-03-2015	1 set	Asli
	27	0100001551855552	18-03-2015	1 set	Asli
	28	0100001551855643	28-04-2015	1 set	Asli
	29	0100001551855655	30-04-2015	1 set	Asli
	30	0100001551855608	07-04-2015	1 set	Asli
	31	0100001551855613	09-04-2015	1 set	Asli
	32	0100021527831598	29-05-2015	1 set	Asli
	33	0100021527831555	22-05-2015	1 set	Asli
	34	0100021527831538	19-05-2015	1 set	Asli
	35	0100021527831666	29-06-2015	1 set	Asli
	36	0100021527831699	27-07-2015	1 set	Asli
	37	0100031563258510	31-08-2015	1 set	Asli
	38	0100021527831769	18-08-2015	1 set	Asli
	39	0100031563258534	09-09-2015	1 set	Asli
	40	0100031563258597	28-09-2015	1 set	Asli
	41	0100031563258695	30-10-2015	1 set	Asli
	42	0100031563258742	13-11-2015	1 set	Asli
00.	<b>Faktur Pajak dan Lampirannya :</b>				
	<b>I. Masa Januari s.d. Desember 2014</b>				
		<b>Nomor Faktur Pajak</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
	1	0100021487053628	13-09-2014	1 set	asli
	2	0100031433163634	30-10-2014	1 set	asli
	3	0100021487054198	17-10-2014	1 set	asli
	4	0100031433163866	29-11-2014	1 set	asli
	5	0100031433163758	15-11-2014	1 set	asli
	6	0100031433163650	01-11-2014	1 set	asli
	7	0100031433163859	28-11-2014	1 set	asli
	8	0100031433163744	13-11-2014	1 set	asli
	9	0100031433163948	10-12-2014	1 set	asli
	10	0100031433164032	20-12-2014	1 set	asli
	11	0100031433164003	17-12-2014	1 set	asli
	<b>II. Masa Januari s.d. Desember 2015</b>				
		<b>Nomor Faktur Pajak</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
	12	0100001582226070	31-01-2015	1 set	asli
	13	0100001582225937	12-01-2015	1 set	asli
	14	0100001582225955	15-01-2015	1 set	asli
	15	0100001582226503	07-02-2015	1 set	asli
	16	0100001582226531	14-02-2015	1 set	asli
	17	0100001582226627	07-03-2015	1 set	asli
	18	0100001582226753	30-03-2015	1 set	asli
	19	0100001582226706	20-03-2015	1 set	asli
	<b>ALAN JEFRI</b> Karyawan PT CATUR KENCANA SAKTI				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20	0100001582226712	23-03-2015	1 set	asli	
	21	0100001582226820	10-04-2015	1 set	asli	
	22	0100001582226832	13-04-2015	1 set	asli	
	23	0100001582226890	25-04-2015	1 set	asli	
	24	0100011559709702	15-05-2015	1 set	asli	
	25	0100011559709764	30-05-2015	1 set	asli	
	26	0100011559709717	19-05-2015	1 set	asli	
	27	0100011559709739	23-05-2015	1 set	asli	
	28	0100011559709825	15-06-2015	1 set	asli	
	29	0100011559709889	30-06-2015	1 set	asli	
	30	0100011559709804	10-06-2015	1 set	asli	
	31	0100011559709779	04-06-2015	1 set	asli	
	32	0100011559709880	27-06-2015	1 set	asli	
	33	0100011559710063	23-07-2015	1 set	asli	
	34	0100011559710006	04-07-2015	1 set	asli	
	35	0100011559710280	27-08-2015	1 set	asli	
	36	0100011559710236	13-08-2015	1 set	asli	
	37	0100011559710212	06-08-2015	1 set	asli	
	38	0100031579144306	29-09-2015	1 set	asli	
	39	0100031579144225	20-09-2015	1 set	asli	
	40	0100031579144200	15-09-2015	1 set	asli	
	41	0100031579144388	05-10-2015	1 set	asli	
	42	0100031579144566	28-10-2015	1 set	asli	
	43	0100031579144650	03-11-2015	1 set	asli	
pp.	No.	Jenis Dokumen Yang Disita			Banyaknya	ANDRI IRAWAN, SE Finance Manager PT MONIER
	1.	A/R Customer Tansactions (ARCTRN01) tanggal 11/06/2019 pukul 10:38:42			1 set	
	2.	Invoice, Faktur Pajak, Delivery Docket, Purchase Order			9 set	
	3.	Rekap setoran dari PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI senilai Rp. 496.460.000 dan lampiran rekening koran no 0182719003			1 set	
	4.	Faktur Pajak No. 010.000-15.97740055 dengan DPP PPN senilai Rp. 4.772.727			1 set	
qq.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan		RUDYANTO Direktur PT KEPUH KENCANA ARUM
	1	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854868	1 set			
	2	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854563	1 set			
	3	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54853976	1 set			
	4	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54853975	1 set			
	5	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54854857	1 set			
	6	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54855566	1 set			
	7	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54856533	1 set			
	8	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54860823	1 set			
	9	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54860856	1 set			
	10	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54863593	1 set			
	11	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.54865020	1 set			
	12	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48566424	1 set			
	13	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48566163	1 set			
	14	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48565209	1 set			
	15	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48565173	1 set			
	16	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48564937	1 set			
	17	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48575431	1 set			
	18	Faktur Pajak Nomor 010.000-15.48578082	1 set			
	19	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788408	1 set			
	20	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30787208	1 set			
	21	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30786587	1 set			
	22	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788058	1 set			

Halaman 134 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30789104	1 set		
	24	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30788825	1 set		
	25	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30790390	1 set		
	26	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30792241	1 set		
	27	Faktur Pajak Nomor 010.003-15.30791214	1 set		
	28	Daftar Faktur Pajak dari PT KEPUH KENCANAARUM	3 lembar		
rr.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	<b>MARKUS YAN RAHARJO</b> , Accounting Manager PT SURYA PERTIWI
	1	Rekap Invoice dan Surat Jalan kepada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 set	Asli	
	2	Invoice dan Surat Jalan PT AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 set	Asli	
	3	Faktur Pajak Kepada PT AYARO MULYA KOSNTRUKSI	16 lembar	Asli	
SS.	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	<b>AGUS PURWO SANTOSO</b> Branch Operation Service Manager Bank CIMB NIAGA KC Malang Basuki Rakhmad
	1	Aplikasi Pembukaan Rekening & Electronic Banking CIMB NIAGA	6 lembar	Fotokopi dan sudah dilegalisasi	
	2	Print Out Mutasi Bank periode mutasi 15 Juni s/d Desember 2015 bank CIMB NIAGA	3 lembar	Asli	
	3	Salinan Akta No: 01 tanggal 06-01-2015 Notaris HILDA,S.H., M.M., M.Kn. mengenai : Penjualan Saham Perubahan Susunan Direksi	9 lembar	Fotokopi	
	4	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI Nomor 22 tanggal 27 September 2007 Notaris ANIEK YULAICHAH, S.H.	9 lembar	Fotokopi	
	5	Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama Bandung Cicadas No. Pem-2893/WPJ.09/KP.0303/2009 tanggal 02 September 2019 atas nama DINA MARANETTA	1 lembar	Fotokopi	
	6	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 230815201244 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 lembar	Fotokopi	
	7	Surat Keterangan Terdaftar dari No. Pem-0004118ER/WPJ.12/KP.0103/2007 tanggal 10 Oktober 2007 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 lembar	Fotokopi	
	8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 517/19/35.73.311/2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama PT. AYARO MULYA KONSTRUKSI	1 lembar	Fotokopi	
tt.	7. Fotokopi Akte Nomor : 27 tanggal 24 Maret 2009 tentang Berita Acara Rapat umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000; 8. Fotokopi Akte Nomor : 28 tanggal 24 Maret 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000;				<b>CHUSEN BISRI, SH, M.Kn</b> Notaris di Malang.
uu.	- Copy Legalisir Minuta Nomor : 34 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Perubahan Susunan Pengurus dan Pengalihan Saham a.n. PT				<b>GALUH EVA PURNAMA</b> ,

Halaman 135 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	AYARO MULYA KONSTRUKSI NPWP : 21.014.497.8-623.000	<b>SH, M.Kn</b> Notaris di Malang.
vv.	7. Salinan Akte Nomor : 04 tanggal 15 Juli 2010 tentang Rapat umum Luar Biasa para Perseroan Terbatas a.n. PT AYARO MULYA KONSTRUKSI berkedudukan di Kota Malang; 8. Salinan Akte Nomor : 05, tanggal 15 Juli 2010 tentang Jual Beli Saham pada PT AYARO MULYA KONSTRUKSI berkedudukan di Kota Malang;	<b>SRI HENDROWATI, SH, M.Kn</b> Notaris di Malang.

Dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita melalui Kantor Wilayah  
DJP Jawa Timur III;

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Hj.  
Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H.,  
M.Hum, Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Rosni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang,  
serta dihadiri oleh Muhammad Faisal, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum,  
dan Terdakwa hadir secara virtual dalam persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosni, S.H., M.H.

Halaman 136 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg